

SERI OTONOMI DAERAH
(SERI 1 - 2016)

PENGALAMAN PRAKTEK TERBAIK **OTONOMI DAERAH** **DI INDONESIA** **2016**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH



PENGALAMAN PRAKTEK TERBAIK **OTONOMI DAERAH** **DI INDONESIA** **2016**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110





PENGALAMAN PRAKTEK TERBAIK OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 2016

Penulis :

Tim Direktorat EKPDK, Ditjen Otda

Cetakan Pertama

2016

Disain / layout :

Singgih Sawaras

Editor :

GENSLY, SE, MPA

Diterbitkan oleh :

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia





PETA WILAYAH KEDAULATAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Samudera Hindia

Waktu Indonesia Bagian Barat, Jam 7:00

Legenda

- ★ Ibukota Negara
- Ibukota Provinsi
- - - Batas Provinsi
- Batas Negara



DAFTAR PROVINSI DI INDONESIA

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| ● 1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam | Ibukota Banda Aceh | ● 12. Provinsi Bant |
| ● 2. Provinsi Sumatera Utara | Ibukota Medan | ● 13. Provinsi Jawa |
| ● 3. Provinsi Sumatera Barat | Ibukota Padang | ● 14. Provinsi Daer |
| ● 4. Provinsi Riau | Ibukota Pekanbaru | ● 15. Provinsi Jawa |
| ● 5. Provinsi Jambi | Ibukota Jambi | ● 16. Provinsi Jawa |
| ● 6. Provinsi Riau Kepulauan | Ibukota Tanjung Pinang | ● 17. Provinsi Kalir |
| ● 7. Provinsi Bengkulu | Ibukota Bengkulu | ● 18. Provinsi Kalir |
| ● 8. Provinsi Sumatera Selatan | Ibukota Palembang | ● 19. Provinsi Kalir |
| ● 9. Provinsi Bangka Belitung | Ibukota Pangkal Pinang | ● 20. Provinsi Kalir |
| ● 10. Provinsi Lampung | Ibukota Bandar Lampung | ● 21. Provinsi Sula |
| ● 11. Provinsi DKI Jakarta | Ibukota Jakarta | ● 22. Provinsi Goro |

ULATAN DAN YURIDIKSI UBLIK INDONESIA



Provinsi Banten	Ibukota Serang	● 23. Provinsi Sulawesi Tengah	Ibukota Palu
Provinsi Jawa Barat	Ibukota Bandung	● 24. Provinsi Sulawesi Barat	Ibukota Mamuju
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Ibukota Yogyakarta	● 25. Provinsi Sulawesi Selatan	Ibukota Makassar
Provinsi Jawa Tengah	Ibukota Semarang	● 26. Provinsi Sulawesi Tenggara	Ibukota Kendari
Provinsi Jawa Timur	Ibukota Surabaya	● 27. Provinsi Bali	Ibukota Denpasar
Provinsi Kalimantan Barat	Ibukota Pontianak	● 28. Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ibukota Mataram
Provinsi Kalimantan Tengah	Ibukota Palangkaraya	● 29. Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ibukota Kupang
Provinsi Kalimantan Selatan	Ibukota Banjarmasin	● 30. Provinsi Maluku Utara	Ibukota Ternate
Provinsi Kalimantan Timur	Ibukota Samarinda	● 31. Provinsi Maluku	Ibukota Ambon
Provinsi Sulawesi Utara	Ibukota Manado	● 32. Provinsi Papua Barat	Ibukota Manokwari
Provinsi Gorontalo	Ibukota Gorontalo	● 33. Provinsi Papua	Ibukota Jayapura
		● 34. Provinsi Kalimantan Utara	Ibukota Tanjung Selor



NAWACITA

SEMBILAN PROGRAM PRIORITAS

1. Perkuat **PERAN NEGARA**
2. Perkuat **PELAYANAN PUBLIK**
3. Penguatan **ANTI KORUPSI**
4. Membangun dari **DAERAH & DESA**
5. Meningkatkan **PRODUKTIVITAS RAKYAT**
6. Ekonomi berbasis **KOMODITI STRATEGIS DOMESTIK**
7. Menjaga **KUALITAS HIDUP RAKYAT**
8. **REVOLUSI KARAKTER BANGSA**
9. Perkokoh **BHINEKA TUNGGAL IKA**



DAFTAR ISI

viii	Pengantar
x	Sekapur Sirih
xii	Sambutan Menteri Dalam Negeri RI
1	Pendahuluan
9	Provinsi Jawa Barat
17	Provinsi Jawa Tengah
25	Provinsi Jawa Timur
33	Kabupaten Bantul
41	Kabupaten Bintan
49	Kabupaten Kudus
57	Kabupaten Kulonprogo
65	Kabupaten Lamongan
73	Kabupaten Tulungagung
81	Kabupaten Nganjuk
89	Kabupaten Pasaman
97	Kabupaten Pinrang
105	Kabupaten Sidoarjo
113	Kota Balikpapan
121	Kota Blitar
129	Kota Madiun
137	Kota Malang
145	Kota Mojokerto
153	Kota Probolinggo
161	Kota Samarinda
169	Kota Semarang
177	Kota Surabaya
185	Kota Surakarta

ALHAMDULILLAH. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Berkat pertolongannya pula, kami berhasil mempersembahkan sebuah buku "Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah di Indonesia 2016" ini. Harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat bagi Kementerian Dalam Negeri maupun para pimpinan daerah di seluruh Indonesia.

Buku "Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah di Indonesia 2016" ini kami susun melalui proses pendokumentasian terhadap 3 (tiga) provinsi, 10 (sepuluh) Kabupaten, dan 10 (sepuluh) Kota yang berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2014.

Dari masing-masing daerah itu, kami mengumpulkan dan menganalisa praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Harapannya, agar upaya-upaya inovatif dalam



Ir. Gunawan, MA

Direktur Evaluasi Kinerja dan
Peningkatan Kapasitas Daerah

penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat, dipelajari, atau bahkan jika perlu direplikasi oleh daerah lain.

Kami memahami, setiap daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah pun tak sama. Hal itu membuat proses replikasi tak bisa dilakukan dengan mudah dan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Tetapi, setidaknya, dengan menunjukkan adanya praktik terbaik yang ada di daerah-daerah ini, kami berharap agar daerah lain pun terpacu untuk melakukan inovasi-inovasi lanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Intinya, melalui penerbitan buku ini, kami berharap agar seluruh Pemerintah Daerah dapat mampu mendesain kebijakan yang cepat dan tepat bagi terwujudnya Indonesia yang lebih adil dan makmur, dengan kualitas hidup warga yang lebih baik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Buku ini memuat 23 pengalaman baik yang dilakukan oleh daerah-daerah yang kami dokumentasikan selama periode Februari-Maret 2016 tersebut. Kesemua itu setidaknya akan memberikan gambaran bagi kita bahwa cukup banyak daerah yang pantas mendapatkan gelar sebagai *pioneer* sebuah inovasi. Bahkan, dari hasil pendokumentasian yang kami lakukan, sejatinya banyak daerah yang memiliki inovasi lebih dari satu. Sesuatu yang tentu saja sangat membanggakan kita semua.

Munculnya berbagai inovasi itu sekaligus memberikan indikasi bahwa penerapan otonomi daerah adalah sebuah kebijakan yang tepat dan efektif untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang efektif dan birokrasi yang efisien.

Akhir kata, izinkanlah saya mengucapkan terimakasih kepada para pimpinan daerah yang telah bekerjasama dan membantu kami dalam proses pendokumentasian pengalaman-pengalaman baik yang mereka miliki tersebut. Semoga Tuhan membalas jasa baik mereka semua. Sekali lagi, kami berharap buku ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. ●

Jakarta, April 2016

DO THE BEST!

SAYA menyambut baik penerbitan buku ini. Dengan hadirnya buku ini, kita semua akan memiliki referensi mengenai praktik-praktik terbaik yang dikembangkan oleh berbagai Provinsi, Kabupaten, maupun kota. Dengan hadirnya buku ini, kita bisa berbangga hati bahwa banyak daerah yang berhasil mengembangkan inovasi agar dapat mewujudkan pemerintah daerah yang terpercaya, efektif, efisien, dan demokratis.

Penerbitan buku ini sangat sesuai dengan kebutuhan daerah yang ingin belajar berbagai kelebihan yang dimiliki oleh daerah lain. Bahkan, jika daerah-daerah yang memiliki potensi dan tantangan yang relatif sama, bisa langsung mereplikasikan "Pengalaman Praktik Terbaik" di daerah lain untuk diterapkan di daerahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi dan tantangan yang berbeda, kehadiran buku "Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah di Indonesia 2016" ini diharapkan juga akan dapat memicu lahirnya inovasi yang benar-benar tepat untuk diterapkan di daerahnya.

Inovasi daerah sesungguhnya merupakan inti dari spirit otonomi daerah.



Dr. Sumarsono, MDM
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah

Inovasi daerah sekaligus juga merupakan bentuk dari strategi pembangunan dan kebijakan daerah untuk mendorong optimalisasi dari potensinya masing-masing. Otonomi daerah hanya akan memiliki makna jika setiap daerah mampu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa belum semua daerah mampu menciptakan inovasi sendiri dalam untuk melaksanakan otonomi daerah. Untuk melakukan inovasi, memang diperlukan banyak hal. Pertama, adalah kualitas sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah. Faktor yang kedua kualitas kepemimpinan daerah.

Alhasil, untuk mendorong terciptanya inovasi daerah, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur dan juga peningkatan kualitas para pemimpin daerah agar mereka menjadi kepala-kepala daerah yang visioner. Kepala daerah yang visioner akan mampu membaca potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Mereka juga mampu menyusun road map pembangunan sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi daerahnya dalam 5,10, atau 20 tahun ke depan. Kepala daerah juga mampu membuat keputusan mengenai kebijakan daerah dan strategi pembangunan yang sesuai untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang dipimpinnya itu.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memacu semua pihak untuk bekerja dengan lebih baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, demokratis, dan akuntabel. ●

Jakarta, April 2016

Sambutan Menteri Dalam Negeri

PERATURAN Presiden No.11/2015, khususnya dalam Pasal 2 dan 3, secara tegas menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri diwajibkan untuk menjalankan 10 fungsi, di antaranya adalah melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil.

Kementerian Dalam Negeri merupakan organisasi di Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab atas terlaksananya otonomi daerah secara baik, bersih, dan akuntabel. Menteri Dalam Negeri, melalui organ-organ yang ada di dalam Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk mendorong dan memastikan agar seluruh daerah otonomi mampu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepadanya dengan baik pula.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan kegiatan aktivasi, fasilitasi, training, bimbingan teknis, dan sebagainya untuk tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu. Kapasitasi tak hanya dilakukan kepada aparatur, tetapi juga kepada para kepala daerah dan para pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).



Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri RI

Kami mengakui, kegiatan kapasitas yang dilakukan selama ini masih bersifat reguler dan bersifat rutin belaka. Belum ada *frame* dan *framework* yang lebih spesifik, misalnya, mengadakan pelatihan kepala daerah yang daerahnya memiliki potensi tambang besar, atau yang memiliki potensi pertanian sangat besar. Semuanya masih dilakukan secara bersama-sama dengan menu bahan kapasitas yang sama pula.

Hal ini pula yang sepertinya membuat sedikit saja daerah yang mampu melakukan inovasi secara signifikan. Hingga detik ini, masih sangat banyak daerah yang bergantung pada arahan, petunjuk, dan instruksi dari Pemerintah Pusat.

Apalagi, di sisi lain, sangat banyak daerah yang sebenarnya memiliki keterbatasan kemampuan fiskal sehingga mereka hanya bisa berperan menjadi pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu saja masih sangat jauh dari cita-cita awal penerapan otonomi daerah.

Dalam orde otonomi, daerah memiliki sejumlah urusan yang benar-benar menjadi otonomi mereka sendiri. Tetapi banyak daerah yang belum bisa melaksanakan kewenangan itu karena kondisi fiskalnya tidak mendukung. Hal ini pula yang kemudian membuat urusan yang harus mereka tangani itu tidak terlaksana dengan baik karena mereka menunggu dana dari pusat untuk melaksanakannya.

Akibat dari belum tergarapnya ruang-ruang urusan daerah yang belum digarap itu pendapatan asli daerah (PAD) pun hingga saat ini sangat kecil. Banyak daerah yang PAD-nya hanya sekitar 10 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Bahkan, banyak daerah otonomi baru yang PAD-nya hanya mencapai 5 persen. Memang ada sejumlah daerah yang mampu mencatat PAD besar, tapi jumlahnya sangat sedikit. Secara nasional, porsi PAD dalam sistem fiskal nasional kita masih berada di angka sekitar 20 persen.

Kondisi itu tentu masih sangat jauh dari ideal. Apalagi, di sisi lain, banyak daerah yang menghabiskan hampir semua anggaran dalam APBD-nya untuk biaya operasional seperti gaji, perawatan kantor, dan sebagainya. Hal ini membuat ruang fiskal mereka untuk berinvestasi pembangunan menjadi sangat kecil. Banyak daerah yang pengeluaran untuk investasi pembangunan di bawah 15 persen APBD-nya. Dengan kondisi semacam itu, sangat kecil peluang mereka untuk melakukan inovasi dalam menerapkan otonomi di daerahnya masing-masing.

Terus terang, situasi ini telah membuat Presiden Joko Widodo sangat prihatin. Beliau bertanya, kenapa kemampuan daerah tak kunjung meningkat meskipun APBN dan APBD kita naik dua kali lipat setiap 5 tahun? Mengapa kenaikan APBD dan APBN sebesar itu tak mampu menjadi faktor pendorong tumbuhnya ekonomi dalam level yang tinggi? Mengapa kenaikan APBN dan APBD tak banyak mengurangi angka pengangguran?

Bahkan, secara spesifik, Presiden Jokowi juga bertanya mengapa PAD di daerah-daerah tak mampu tumbuh signifikan sesuai dengan pertumbuhan APBD.

Dari waktu ke waktu, di banyak daerah, peranan PAD dalam APBD justru menurun.

Presiden Jokowi lalu mencari akar permasalahannya. Ternyata, salah satu akar masalahnya adalah karena banyaknya aturan, baik yang berbentuk Perda maupun aturan dari pemerintah pusat yang menghambat investasi dan perkembangan daerah. Ditjen Otonomi Daerah telah diminta untuk mengkaji aturan-aturan yang dinilai menghambat itu.

Salah satu langkah yang dilakukan di antaranya adalah dengan menghapus sekitar 3.000 Perda yang dinilai menghambat investasi. Kami sudah memberikan target agar penghapusan aturan-aturan yang menghambat itu harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan dengan penghapusan itu iklim investasi di daerah akan lebih baik. Berbagai peraturan mengenai perizinan yang dinilai sangat panjang harus dihapuskan. Peraturan yang membuat proses perizinan terlalu rumit harus disederhanakan.

Sejumlah peraturan pusat pun dihapuskan. Kewajiban mengurus izin gangguan (Hinder Ordonantie), misalnya, kini ditiadakan karena dianggap tumpang tindih dengan aturan mengenai Analisis Dampak Lingkungan. Kita juga mengenal adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di samping Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dua izin ini sejatinya memiliki esensi yang sama, namun dua-duanya harus diurus karena masing-masing memiliki payung hukum yang berbeda. Ke depan, hal itu juga akan disederhanakan. Bisa salah satunya dihapus, atau sekali pengusaha mengurus izin yang keluar adalah dua dokumen: SIUP dan TDP.

Selain melakukan penyederhanaan aturan, kelembagaan di daerah pun akan dilakukan penyesuaian. Meski saat ini semua daerah sudah memiliki PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), nyatanya orang juga masih harus berhubungan dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) untuk mengurus perizinan. Hal ini tentu tak bisa diteruskan.

Penyederhanaan tak hanya terbatas pada dua lembaga itu. Presiden Jokowi juga meminta agar daerah lebih hemat. Ke depan, jangan lagi ada daerah yang menghabiskan 75 persen hingga 85 persen APBD untuk membiayai perangkat pemerintahan yang ada.

Untuk itu, ke depan, struktur anggaran dalam APBD pun akan diubah. Dulu, kita menerapkan azas *money follows functions*, ke depan kita akan menerapkan kebijakan *money follows programs*. Dalam azas *money follows function*, semua struktur akan mendapatkan anggaran. Akibatnya, dampak dari dana itu menjadi tidak kentara hasilnya.

Sementara, dalam azas *money follows programs* yang akan diterapkan, anggaran diarahkan pada sejumlah program pokok yang direncanakan, dan pengerjaannya akan dilaksanakan oleh masing-masing struktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Selain itu, struktur organisasi perangkat daerah juga akan dirampingkan. Saat

ini, sebuah peraturan pemerintah mengenai masalah tersebut sudah disiapkan. Ke depan, struktur organisasi di daerah harus disesuaikan dengan beban kerja yang ada. Organisasi pemerintahan di Jawa Timur yang besar, pasti akan berbeda dengan struktur organisasi di Bangka Belitung yang relatif lebih kecil, misalnya.

Selain itu, juga akan dilakukan standar kompetensi untuk menjadi kepala SKPD. Setiap kotak jabatan memerlukan standar kompetensi yang harus dipenuhi. Tak boleh lagi ada kepala dinas pekerjaan umum yang lulusan sekolah keguruan atau lulusan jurusan sastra. Sebaliknya, jabatan kepala dinas pendidikan juga tak boleh diisi dengan insinyur sipil. Penataan standar kompetensi jabatan itu sudah akan dimulai pada tahun ini.

Untuk itu, Kemendagri akan memberikan pembekalan kepada para calon kepala SKPD dengan pengetahuan tentang pemerintahan melalui pelatihan di Badan Pengembangan SDM, serta melakukan pemetaan urusan di masing-masing daerah akan dilakukan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Ditjen Otonomi Daerah dalam konteks pekerjaan besar ini akan melakukan proses penataan kelembagaannya.

Berbagai penyempurnaan dan peningkatan efisiensi di daerah itu diharapkan akan memperbesar manfaat dari APBD dan APBN untuk pembangunan. Hal ini sangat penting. Makin besar dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan identik artinya dengan memperbesar kehadiran negara sesuai dengan cita pertama Nawacita, yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Jika sebagian besar dana habis untuk mengongkosi birokrasi, harapan untuk kehadiran negara itu akan sulit diwujudkan. Apalagi, pada saat yang sama, pemerintah kita juga punya beban untuk mewujudkan cita ketiga dari Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Cita ini menuntut adanya investasi pembangunan secara besar-besaran. Cita pertama dan ketiga ini muncul sebagai bentuk koreksi karena di masa lalu kehadiran negara masih minim dan kondisi daerah pinggiran dan perbatasan nyaris tak terlayani dan tak terjangkau.

Kita tak ingin bangsa Indonesia yang ada di pinggiran akhirnya harus mencari kehidupan di luar negeri dengan cara yang kurang terhormat dan dapat melukai rasa kebangsaan kita.

Akhirnya, saya berharap buku ini benar-benar mampu menginspirasi semua pihak untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya masing-masing. Hal ini sangat penting agar tujuan nasional kita juga dapat segera dicapai. ●

Jakarta, April 2016

Praktek Pemerintahan yang Baik untuk Menggapai Kemakmuran Negeri

PADA dasarnya, pemerintah di semua tingkatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni untuk mencapai tujuan negara kita. Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tujuan negara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tentu, setiap tingkatan pemerintahan memiliki porsi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks pemerintahan daerah, kita tentu harus berpegang pada ketentuan Undang-undang Nomor 23/2004. Undang-undang itu secara tegas menyatakan kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.



Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. contoh dari urusan pemerintahan wajib adalah seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar.

Kesemuanya itu tentu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena daerah merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan pemerintahan yang baik (good government) sesungguhnya merupakan prasyarat utama bagi upaya pencapaian seluruh tujuan negara tersebut. Pemerintahan yang baik, menurut pakar ilmu pemerintahan Profesor Bintoro Tjokroamidjojo, adalah sebuah bentuk manajemen pembangunan yang menempatkan pemerintah sebagai agen perubahan.

Selain itu, melalui kebijakan dan regulasi yang dibuatnya, pemerintah mendorong program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri untuk berkembang di wilayahnya. Pemerintah, melalui perannya yang besar dalam perencanaan dan anggaran yang dimilikinya, juga memberikan stimulus kepada sektor swasta untuk berkembang.

Peran seperti itu pula lah yang sebenarnya diharapkan dapat dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Jika semua pemerintah daerah mampu melaksanakan hal itu secara baik, maka kemakmuran negeri akan lebih mudah dicapai.

Di seluruh dunia memang sedang berkembang sebuah kesadaran bahwa pemerintah daerah lah yang harus memainkan peran terbesar dalam memakmurkan rakyatnya. Hal itu terlihat dari lahirnya kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebuah kesepakatan PBB yang ditanda tangani di Rio de Janeiro pada 2012, yang di dalamnya secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerahlah yang seharusnya menangani masalah kesejahteraan penduduk.

Dokumen SDGs itu ditandatangani oleh 192 negara termasuk Indonesia. Agenda pembangunan SDGs sesungguhnya merupakan keberlanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati PBB pada tahun 2000. Deklarasi MDGs ditandatangani pada September 2000 oleh 147 negara pada KTT Millennium di New York. MDGs berisi delapan agenda pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan



dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan malaria serta penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Bagi Indonesia, meskipun masih perlu melakukan banyak perbaikan, terdapat tidak sedikit pencapaian dari target MDGs yang positif. Laporan MDGs yang dikeluarkan Bappenas menunjukkan sejumlah pencapaian untuk memenuhi target pembangunan milenium. Meskipun mengalami perlambatan penurunan, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat diturunkan dari 15,1% di tahun 1990 menjadi 10,96% di 2014.

Prevalensi balita dengan berat badan rendah atau gizi buruk dapat diturunkan dari 31% di tahun 1980 menjadi 19,60% di 2013. Di sektor pendidikan dasar, Indonesia telah mampu meningkatkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat dari 88,70% di tahun 1990 menjadi 95,71% di tahun 2012. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun meningkat menjadi 99,08% di tahun 2012.

Di tahun yang sama, Indonesia mendapatkan penghargaan dari UNESCO karena sukses melawan buta huruf. Indikator ketimpangan gender untuk akses ke pendidikan juga mengalami perbaikan yang berarti dan terlihat dari porsi rasio APM perempuan dan laki-laki baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Angka kematian bayi juga berhasil diturunkan dari 97/kelahiran di tahun 1990 menjadi 41/kelahiran di tahun 2012. Akses terhadap air bersih juga meningkat dari 37,73% di tahun 1990 menjadi 67,73% di tahun 2013. Meskipun MDGs telah mencapai sejumlah pencapaian berarti, beberapa tantangan masih membutuhkan usaha bersama untuk mempercepat perbaikannya. Misalnya emisi karbondioksida (CO₂) terus meningkat di mana jumlahnya meningkat 50% di tahun 2011 dari level 1990.

Nah, dalam dokumen SDGs, terdapat 17 tujuan dan 169 target yang meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan inklusif, kesehatan, kesamaan gender, kesediaan air bersih dan sanitasi untuk semua, serta akses dan ketersediaan sumber energi untuk semua. Kemudian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketersediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan inovasi, mengurangi kesenjangan, mengatasi dampak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya laut yang



berkelanjutan, mendorong tatanan masyarakat yang damai, dan mendorong kerja sama global.

Masing-masing dari 17 tujuan kemudian dipecah menjadi target yang lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Rumusan SDGs dan target pencapaiannya itu telah diserap dalam RPJMN maupun rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan hingga pelaksanaannya. Dengan demikian, selayaknya target SDGs itu juga masuk ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) di tiap provinsi, dan kabupaten/kota.

Keberhasilan SDGs ini tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Mengingat pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi; serta menjadi ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

Bahkan, jika disimak, terdapat persinggungan yang cukup banyak antara 15 wewenang Pemda yang termaktub dalam UU No.32/2004 dengan 17 tujuan SDGs ini.

NAWACITA DAN SDGs

Tak salah jika kita katakan bahwa SDGs juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Bukan saja karena kita terikat dengan kesepakatan itu karena Indonesia ikut menandatangani kesepakatan SDGs, tetapi karena SDGs memang memiliki keselarasan dengan **Nawacita** dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019.

Terdapat beberapa fokus SDGs yang sesuai dengan 9 agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita). Di antaranya, keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti penuntasan masalah kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis; peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria; pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi

Keterkaitan antara 15 wewenang Pemda dan 17 Goals SDGs

15 Wewenang Pemda (UU 32/2004)	17 Goal SDGs
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 11. Melestarikan lingkungan hidup. 12. Mengelola administrasi kependudukan. 13. Melestarikan nilai sosial budaya. 14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. 15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Goal 1. Menghapus kemiskinan • Goal 2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan • Goal 3. Kesehatan untuk semua umur • Goal 4. Pendidikan yang berkualitas dan merata • Goal 5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan • Goal 6. Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua • Goal 7. Energi untuk semua • Goal 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak • Goal 9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan • Goal 10. Menurunkan ketimpangan • Goal 11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan • Goal 12. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan • Goal 13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya • Goal 14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam • Goal 15. Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan • Goal 16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi • Goal 17. Kerja sama internasional untuk pembangunan yang berkelanjutan

pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan; dan perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

SDGs adalah milik dan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintah kabupaten dan kota merupakan ujung tombak pencapaian tujuan SDGs. Tanpa peran aktif mereka, SDGs akan gagal.

PRAKTIK TERBAIK DALAM BINGKAI NAWACITA

Poin kedua nawacita berbunyi, tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen membangun *good government*, tetapi juga *good governance*. Itu berarti bahwa melalui *good governance* pemerintah akan dikelola melalui proses mengedepankan hubungan sinergis-konstruktif: profesional, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, dan supermasi hukum. Makna dari *governance* dan *good government* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU).

Good government adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau *management* (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan dan lain-lain).

Indonesia merupakan suatu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*. Namun, keadaan saat ini, menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum tercapai. Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan yang baik di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good*

Perbedaan antara MDGs dan SDGs

MDGs-2000-2015	SDGs-2015-2030
<p>50 persen Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya</p>	<p>100 persen Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri kemiskinan • 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran • memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.
<p>Dari negara maju, untuk negara berkembang MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana.</p>	<p>Berlaku universal SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.</p>
<p>Dari Atas (top down) Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.</p>	<p>Dari Bawah (bottom up) dan partisipatif Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga.</p>
<p>Solusi parsial atau tambal sulam 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui</p>	<p>Solusi yang menyeluruh Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan gender • Tata pemerintahan

governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil hendaknya saling berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Praktik pemerintahan yang baik sebenarnya merupakan pelaksanaan *good government* untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena masing-masing daerah memiliki tantangan dan potensinya sendiri-sendiri yang mungkin saja berbeda dengan tantangan yang dimiliki oleh daerah lain, maka praktik pemerintahan yang baik di suatu daerah bisa saja berbeda bentuknya dengan daerah lain.

Tetapi, yang pasti, usaha untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan negeri ini hanya akan dapat dicapai jika daerah berani melakukan aneka inovasi guna mengefisienkan roda pemerintahan. ●



PROVINSI JAWA BARAT



PROVINSI JAWA BARAT



H. Ahmad Heryawan
Gubernur Jawa Barat



Dedy Mizwar
Wakil Gubernur Jawa Barat

VISI:**Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua****MISI:**

- Makna yang terkandung dalam visi Jawa Barat yang terkandung dalam tiga kata, yakni Maju, Sejahtera, dan Untuk Semua tentu saja sangat mendalam. Untuk kata Maju, Provinsi Jawa Barat memaknainya sebagai sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif. Semua kemajuan itu dengan tetap menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Namun tentu saja tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
- Sedangkan makna untuk kata Sejahtera, Provinsi Jawa Barat menafsirkannya dengan sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Lalu untuk kata Untuk Semua, adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat
- Sementara itu untuk misinya terangkum dalam lima komponen. Misi pertama, membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Kedua, membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Dan misi ketiga, adalah meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik.
- Lalu misi keempat adalah mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Dan misi kelima adalah meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.



MEMANTAU KONDISI WARGA LEWAT TELEPON PINTAR

KONDISI keluarga miskin di Jawa Barat kini dapat dipantau melalui aplikasi yang ada di smart phone. Upaya penanggulangan kemiskinan pun jadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Bangunan yang berada di sepanjang Jalan Ciungwanara, Kota Bandung, tergolong megah nan modern. Kawasan yang hanya berjarak satu kilometer dari Gedung Sate, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari perkantoran, café, penginapan dan juga restoran.

Namun siapa sangka, diantara deretan bangunan megah itu terdapat pemukiman yang dihuni oleh kalangan yang tergolong miskin. Diantaranya Asep Cahyadi dan Juhana, warga Kota Bandung ini termasuk dalam 4,3 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) -- keluarga miskin-- di Jawa Barat.

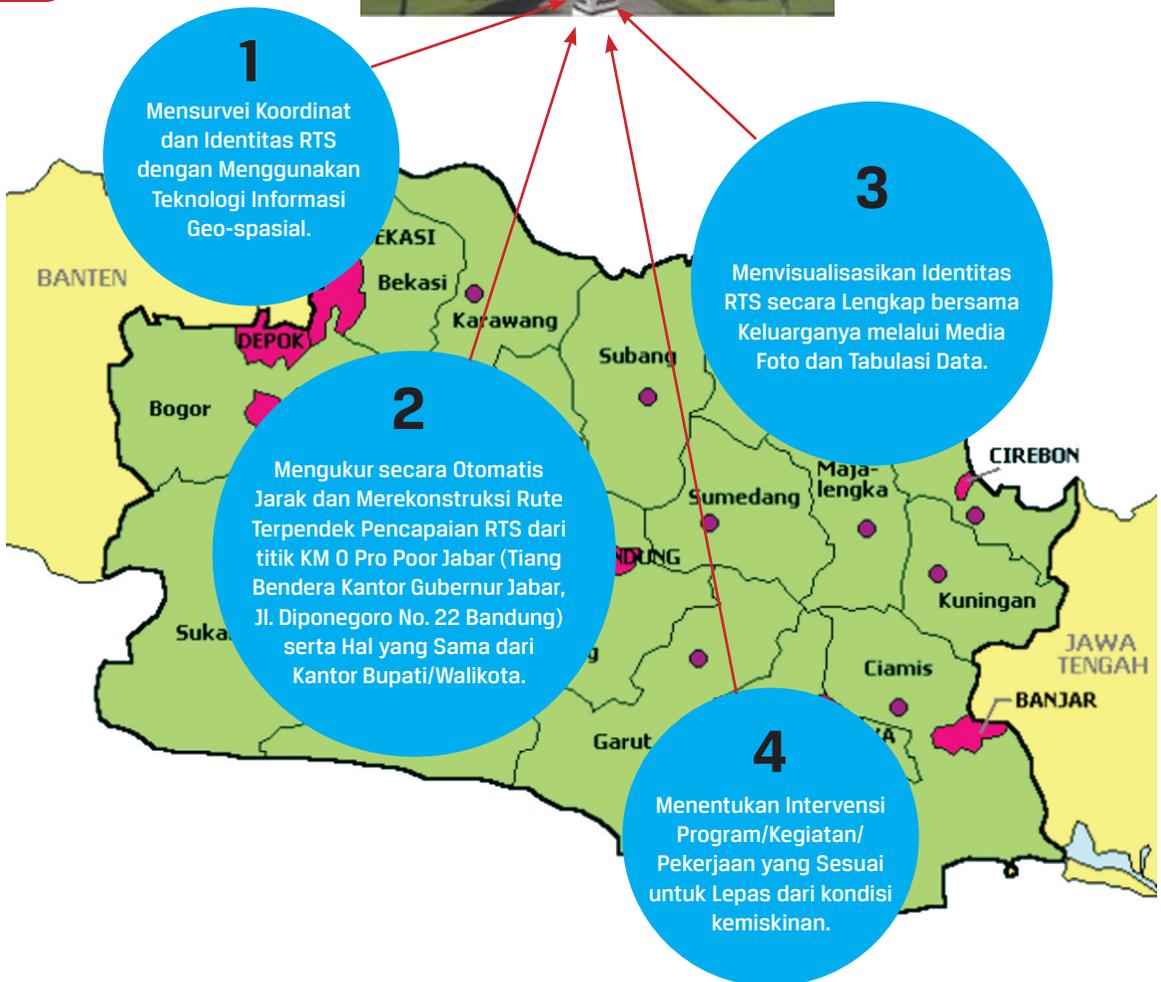
Kini keberadaan warga miskin di Jawa Barat dapat terpantau langsung oleh para pemangku kepentingan di provinsi tersebut, berkat aplikasi KM o *Pro Poor*, yang sudah tersedia di sistem Android.

Melalui aplikasi ini, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Kurniwa, seluruh pimpinan daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa, beserta kepala dinas terkait dapat mengetahui kondisi masyarakat miskin di lingkungan wilayahnya masing-masing. Misalnya untuk gubernur, bisa mengetahui data penduduk miskin seantero Jawa Barat. Sementara untuk bupati, hanya dapat memantau penduduk miskin di kabupaten yang dipimpinnya.

Iwa Kurniwa menjelaskan, inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memuat data penduduk miskin yang dapat diakses melalui *handphone* pintar ini (*smartphone*), berawal dari kendala yang dihadapi, yakni tidak efisiennya alokasi pembiayaan dalam program penanggulangan kemiskinan. Padahal pada 2011 lalu sudah memiliki data RTS dari Pendataan Program



PRINSIP SISTEM INFORMASI KM 0 PRO POOR JABAR



Perlindungan Sosial (PPPS).

Meskipun sudah memiliki data, sering terjadi perbedaan dalam menentukan apakah keluarga tersebut memang layak disebut keluarga miskin atau tidak,” kata Iwa Kurniwa.

Lalu ada juga kepala daerah yang tidak mengetahui ada penduduk miskin, padahal mereka berada di radius satu kilometer dari pusat pemerintahan daerah tersebut. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut munculah ide untuk membuat *data based* penduduk prasejahtera yang dapat diakses dengan mudah oleh pimpinan daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Aplikasi Kilometer 0 (nol) ini digunakan untuk memantau penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dimulai dari tiang bendera utama yang berada di Gedung Sate (Km 0). “Lalu dalam radius 1 Km berapa banyak penduduk miskinnya, lalu radius 5 Km dan seterusnya,” jelas Iwa.

Hal yang sama juga berlaku di lingkup semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Perhitungan Km 0, dimulai dari pusat pemerintahan daerah tersebut, yakni Kantor Bupati, Kantor Camat dan seterusnya.

Data penduduk miskin yang ada di aplikasi tersebut cukup lengkap dan akurat. Mulai dari identitas diri, nama anggota keluarga, alamat, pekerjaan, lokasi berdasarkan titik koordinat, foto keluarga yang bersangkutan, foto rumah, foto kondisi ruang tamu (kondisi di dalam rumah) hingga riwayat penyakit yang diderita keluarga. Program apa saja yang selama ini sudah diterima, seperti beras untuk warga miskin (Raskin), bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya.

Melihat lengkapnya data yang berhasil dihimpun ini memudahkan pemerintah provinsi dengan cepat dan tepat membantu RTS tersebut sesuai dengan yang mereka butuhkan. Apakah memerlukan pekerjaan, rumahnya diperbaiki, perlu pertolongan medis dan sebagainya.

Camat Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Anton Sugiana, menegaskan bahwa aplikasi KM 0 *Pro Poor* sangat membantu dirinya sebagai kepala daerah di tingkat kecamatan. Ia langsung bisa mengetahui lokasi dimana RTS berada. Sehingga dengan data itu, dengan cepat pihak kecamatan dapat mengetahui siapa saja yang menerima bantuan dari berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah.

“Sejak aplikasi ini mulai digunakan pada 2012, *alhamdulillah* hingga saat ini keluarga miskin yang berada di Kecamatan Coblong

sudah semakin berkurang 15%,” ujarnya. Secara umum tingkat kemiskinan di Jawa Barat juga menurun dari 9,89% pada tahun 2012, menjadi hanya 9.18% pada tahun 2014.

LANDASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Sebagai provinsi yang telah membangun simpul jaringan dan telah memanfaatkan in-geoportal sebagai portal nasional, Jawa Barat menjadi daerah yang layak jadi panutan. Bahkan untuk inovasinya itu Badan Informasi Geospasial (BIG) memberikan penghargaan berupa Bhumandala Award kategori Pembangunan Simpul Jaringan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bertempat di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat yang juga merupakan rumah dinas gubernur, Kepala BIG menyerahkan Bhumandala Award untuk kategori Pembangunan Simpul Jaringan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pada Rabu 28 Mei 2014.

Bhumandala Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh BIG kepada berbagai kalangan dalam beberapa kategori. Adapun kategorinya meliputi pembangunan simpul jaringan tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; Pembangunan Aplikasi Berbasis WebGIS dengan memanfaatkan Ina-Geoportal dan Kategori Olimpiade Geografi dan Geosains.

Dalam acara penyerahan penghargaan yang dilaksanakan pada Rabu pagi tersebut yang berjalan suasana yang jauh dari kesan formal. Dalam pemberian penghargaan pada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala BIG menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah merupakan satu-satunya pemerintahan daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah yang terkait dengan pemanfaatan informasi geospasial. Payung hukum itu berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2012, tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

Terbentuknya payung hukum ini tentunya tidak semata-mata muncul, tetapi tentu saja lahir karena Pemerintahan Provinsi Jawa Barat meyakini akan sisi penting peran informasi geospasial dalam mendukung pengambilan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan provinsi.

Terkait inovasi itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa peranan informasi geospasial di lingkungan Provinsi Jawa Barat lahir karena adanya kebutuhan untuk mengetahui

berbagai potensi dan informasi yang ada di daerahnya. Beberapa informasi yang dimaksud misalnya informasi tentang pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. “Semua informasi itu haruslah bisa dengan mudah untuk dilihat dan dicari secara spasial,” paparnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki layanan spasial untuk mengetahui peta kemiskinan di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Layanan berbasis web tersebut mengambil data secara *channelling* dari BPS dan kemudian dilakukan verifikasi oleh unit terkait dengan mengambil foto dan koordinat lokasi rumah penduduk miskin tersebut.

Sistem ini dapat menampilkan rekapitulasi dari data penduduk miskin, data *detail by name, by address, by coordinate* dan *by picture* (foto diri, foto rumah tampak depan, dapur, kamar mandi, dan sebagainya). “Sistem ini dinamakan KM 0 Pro Poor Jabar,” imbuh Heryawan.

Dibangunnya sistem data kependudukan yang akurat dan lengkap ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya untuk mengikuti perkembangan teknologi saja. Menurut Ahmad Heryawan, dengan tersedianya data kependudukan yang akurat dan lengkap sangat penting untuk menunjang program pembangunan.

“Data kependudukan yang ada selama ini belum maksimal, karena belum menyajikan secara pasti kondisi masyarakat. Data sekarang ini kan, datanya proksi. Tenaga kerja bertambah sekian, kemiskinan berkurang sekian. Baru proksi, siapa orangnya kan enggak ketahuan,” tegas Heryawan.

Menurutnya, data kependudukan memang harus akurat. Oleh karena itu data kependudukan perlu diperbaharui setiap waktunya agar mampu menampilkan kondisi warga terkini. Hal tersebut akan terwujud, jika aparatur negara yang bertugas mendata penduduk benar-benar fokus dan profesional di bidangnya. Teknologi yang telah dibangun secanggih apapun, tidak akan ada maknanya jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni.

“Hal ini sangat penting, harus profesional untuk urusan kependudukan. Urusan kependudukan jangan salah. Ketika tidak akurat, maka program pembangunan pun akan salah,” tegasnya.

Keakuratan data kependudukan memang sangat penting, untuk segala persoalan. Termasuk untuk program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan akan berdampak signifikan, jika diberikan

kepada warga yang benar-benar masuk dalam kategori miskin.

“Seperti halnya pemberian dana bantuan usaha kecil. Kan jelas kalau ada data. Kita khawatir kalau enggak ada data, dana-dana kesetiakawanan sosial dari negara tidak merata, salah sasaran,” katanya.

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, data penduduk yang akurat pun sangat membantu penyaluran program beras miskin. Menurutnya, penyaluran beras bagi warga kurang mampu ini harus tepat sasaran agar keberadaannya efektif. “Data penerima kan harus diperiksa, diverifikasi. Jadi kelihatan, ada yang perekonomiannya berkembang, jadi tak mendapat raskin lagi. Itu harus ada datanya,” katanya.

Begitu juga untuk kebutuhan pemilu. Penentuan daftar pemilih tetap (DPT) untuk setiap pemilihan umum pun sangat bergantung pada data penduduk yang ada. “Kalau ketahuan, menyeluruh, kan sudah kelihatan pada hari H berumur 17 tahun,” katanya.

Inovasi Jawa Barat yang punya banyak manfaat dalam menentukan strategi pembangunan ini memikat daerah lain untuk belajar. Hingga saat ini beberapa daerah, baik kota/kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia telah melakukan pembelajaran program KM 0 *Pro Poor* Jabar ini.

Pada 1 Juni 2015, rombongan dari Pemerintah Kabupaten Sragen berkunjung ke Bandung. Kunjungan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen. Sebagai salah satu inovasi pelayanan publik penanggulangan kemiskinan di Sragen, UPTPK terdorong untuk melakukan studi banding inovasi Pelaksanaan Aplikasi Km 0 *Pro Poor* Jabar dalam mendukung program-program penanggulangan kemiskinan.

Kemudian, jauh sebelum itu pada September 2013, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke yang saat itu siap-siap membangun pusat data berkunjung juga ke Bandung. *Kepala Bappeda Papua*, Muhammad Musa’ad mengatakan, dengan melakukan kunjungan ke Jawa Barat ini, pihaknya mau belajar bagaimana pemerintah daerah mengelola data dan informasinya agar bisa bermanfaat untuk kemajuan pembangunan. ●



PROVINSI JAWA TENGAH



PROVINSI JAWA TENGAH



H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP
Gubernur Jawa Tengah



Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si
Wakil Gubernur Jawa Tengah

VISI:**Mboten Korupsi Mboten Ngapusi****MISI:**

- Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
- Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ";
- Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

LAYANAN PACAR BINAL DAN BARCODE UNTUK NELAYAN

SALAH satu persoalan yang dihadapi nelayan di Indonesia saat ini terkait masalah rumitnya prosedur pengurusan perizinan. Tak sedikit nelayan Indonesia yang menjadi bermasalah hukum lantaran tidak mengantongi izin. Bukan hanya itu, dalam proses pelayanan perizinan yang kurang baik pun secara langsung juga merugikan nelayan.

Begitulah fakta yang harus dialami oleh para nelayan di Jawa Tengah sebelum dilakukan terobosan pada tahun lalu. Sebelum inovasi dilakukan, nelayan dari Tegal, misalnya, harus pergi ke Semarang untuk mengurus perizinan kapal di atas 30 DWT.



Pasalnya, perizinan untuk kapal berukuran itu memang harus dilakukan di Ibukota Provinsi.

Hal ini tentu saja memaksa nelayan harus meluangkan waktu, tenaga, dan uang cukup besar. Contoh, sekali pengurusan izin saja, nelayan di Tegal harus menempuh jarak 175 kilometer ke Semarang. Bila menggunakan kereta api, maka nelayan sedikitnya merogoh kocek Rp240 ribu. Bila menggunakan sepeda motor, kocek yang keluar sedikitnya Rp200 ribu. Kocek ini di luar makan-minum dan jasa calo. Jasa calo dipakai nelayan karena tidak cukup mudah juga mengurusnya.

Tengok, dalam pengurusan perizinan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) baru, ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi pemohon dan dilakukan di beberapa instansi. Sebut saja untuk kelengkapan berkas Daftar Isian Permohonan dilakukan UPT PTSP BPMD Provinsi Jateng; berkas rekomendasi pembuatan kapal ikan dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Jateng; berkas legalisir gross akte dilakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan setempat; berkas spesifikasi jenis dan alat tangkap ke instansi Pelabuhan Perikanan Pantai setempat, dan masih banyak lagi lainnya.

Chandra dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah bahkan mengakui bahwa perizinan di masa lalu sangatlah rumit. Dia mengungkapkan, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Bahkan, bila menggunakan jasa calo biayanya bisa mencapai Rp2,5 juta hingga Rp6 juta.

Jauhnya jarak dan prosedur yang panjang membuat nelayan pasif mengurus perizinan kapal tangkap. “Saat itu, 70 persen pemohon lebih memilih menggunakan jasa calo,” terangnya di Kantor Pemprov Jawa Tengah.

Beruntung, sekarang ini, Pemprov Jawa Tengah telah melakukan inisiatif dengan penerapan gerai investasi “Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan” atau disingkat “Pacar Binal”. Lewat gerai ini, nelayan secara langsung dapat mengurus izin di lokasi yang dekat dengan domisili para nelayan sehingga waktu, tenaga dan biaya lebih efisien. “Pengurusan dilakukan secara mandiri. Biaya calo menjadi

nol rupiah. Keluar ongkos jalan paling banyak Rp50 ribu,” jelasnya.

Melalui Pacar Binal itu pula, jumlah pemohon meningkat. Sejak berdirinya pelayanan perizinan perikanan pada Oktober 2015, rata-rata pemohon naik dari hanya 70-80 izin per bulan, menjadi 90-100 per bulan atau naik 15 persen. “Dari Oktober hingga Desember 2015, jumlah perizinan mencapai 353 izin,” ungkap Chandra.

Pemprov Jateng juga meluncurkan sistem barcode untuk pendataan Kapal Penangkap Ikan (KPI). Barcode ini bukan saja meminimalisir tindakan pemalsuan dokumentasi tidak ada terjadi. “Sebelum ada barcode pada SK Perizinan, ditemukan 11 pemalsuan dokumen. Setelah dilakukan, sampai sekarang belum ada lagi ditemukan pemalsuan,” kata Chandra.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng meluncurkan sistem barcode pada kapal penangkap ikan pada November 2015. Gagasan inovasi datang dari AKBP Sugeng Tiyarto, anggota Polri yang bertugas di Mapolda Jawa Tengah sebagai Kasubdit 2 Eksus Ditreskrimsus. Inovasi ini didukung pula oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lalu M Safriadi.

Lalu Safriadi yakin, sistem barcode ini akan memudahkan proses perizinan dan membuat pemilik kapal merasa nyaman saat melaut. Dengan barcode, para nelayan tidak perlu lagi membawa seluruh dokumen perizinan kapal. “Kalau kapal sudah ada barcode, tidak ada alasan untuk aparat penegak hukum menangkap. Sebab, barcode berisi seluruh data terkait kapal, mulai dari ukuran hingga jenis alat tangkap yang digunakan. Jadi, ini untuk jaminan keamanan nelayan saat melaut. Kapal sudah tercatat di provinsi maupun kabupaten,” terangnya.

Dia berharap, 4 ribu lebih nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 30 GT yang ada di Jateng juga segera mengurus perpanjangan perijinan dan mendapatkan barcode ini. “Barcode ini sarana teknologi yang dapat dimanfaatkan nelayan untuk memonitor perijinan kapal yang jumlahnya lebih dari 20,” tambahnya.

Hal senada dilontarkan Sugeng Tiyarto, penemu sistem barcode itu. Menurutnya, sistem barcode sangat membantu nelayan dalam proses pengurusan dokumen perizinan kapal maupun saat melaut. “Lewat barcode ini nelayan tidak lagi bisa dipersulit di lautan dan darat. Nelayan bisa tenang,” cetusnya.

Maklum, dalam barcode itu tersedia berbagai informasi tentang kapal seperti, identifikasi perizinan kapal, identifikasi fitur kapal, identifikasi user interface, pengkodean (coding), perancangan sistem aplikasi, dan pengujian aplikasi.

Sistim barcode ini juga membuat DKP Jateng memiliki database kapal perikanan di Jawa Tengah. Barcode juga menjadi sarana pencegahan penyalahgunaan dokumen kapal. Sebab, sering kali ditemukan satu dokumen dipakai untuk lebih dari satu kapal. Dengan barcode yang menempel di kapal, hal seperti itu tak bisa lagi dilakukan.

Berkat system barcode ini, tertib administrasi perkapalan di Jawa Tengah menjadi lebih efektif dan efisien. Database kapal penangkap ikan pun jadi lebih baik. Melalui penerapan sistem barcode, nelayan dapat memperoleh pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan dokumen perizinan dan sertifikasi kelayakan kapal di Jawa Tengah.

Sistem barcode ini juga membantu mempermudah dalam pendataan semua kapal di Jawa Tengah, sehingga kapal penangkap ikan terdata lebih akurat, termasuk untuk pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan di Jawa Tengah.

Selain itu, sistem ini berkontribusi pada peningkatan Pendapatan daerah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Lalu M. Syafriadi, menargetkan akan memasang barcode sebanyak 1200 bagi kapal nelayan di tahun 2015 dan sebanyak 24.000 barcode pada kapal nelayan di tahun 2016.

Pada 2015, gerai investasi Pacar Binal dibuka di BPPT Kota Tegal dan BPMPT Kabupaten Banyumas, serta Kantor Perwakilan Jawa Tengah di DKI Jakarta. Ke depan, replikasi pelaksanaan Pacar Binal akan dilakukan di kota lain dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait perizinan, khususnya perizinan untuk kaum marjinal.

PEDULI PANTAI PEDULI NELAYAN

Jawa Tengah merupakan provinsi yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara dan Samudera Indonesia di bagian selatan. Total panjang garis pantai Provinsi Jawa Tengah adalah 828,82 km, yang terdiri dari 540,27 km adalah panjang garis pantai utara dan 288,55 km merupakan garis pantai selatan, dengan luas kawasan pesisir sebesar 122.739,79 ha.



Bisa dipahami jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pesisir dan masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Maklum, Jawa Tengah yang bermatapencaharian sebagai nelayan, tersebar di semua garis pantainya.

Di Pantai Utara, nelayan tersebar di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Sementara, di bagian selatan, nelayan juga hidup di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.

Panjangnya garis pantai dan besarnya populasi nelayan itu jelas membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus membuat sejumlah terobosan demi terwujudnya kemakmuran bagi warganya.

Harus diakui, masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir boleh dibilang masih tertinggal dalam banyak hal. Umumnya, tingkat kesejahteraan mereka masih berada di bawah rata-rata. Masalah kemiskinan masih mendera sebagian warga masyarakat pesisir. Sektor perikanan pada hakekatnya memang dapat dikembangkan untuk menopang perbaikan ekonomi masyarakat nelayan.

Namun, realitasnya, penghasilan nelayan dari melaut sangatlah kecil.

Tak sedikit yang hanya bisa membawa pulang uang Rp30 ribu per hari. Runyamnya, biasanya mereka tak punya pekerjaan lain selain melaut.

KEBIJAKAN PENDUKUNG

Untuk memajukan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, Pemprov Jateng telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Yang pertama, Pemprov bertekad untuk meningkatkan kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat, utamanya masyarakat pesisir dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Kedua, Pemprov Jateng berusaha meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar peran serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Ketiga, melaksanakan optimalisasi usaha perikanan tangkap, memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;

Keempat, meningkatkan usaha perikanan budidaya dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan serta meningkatkan kemampuan teknis pembudidayaan ikan, terutama dalam penerapan *good agriculture practices*.

Kelima, optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan kemampuan teknis pembudidayaan ikan, terutama dalam penerapan *good agriculture practices*.

Terakhir, melakukan rehabilitasi dan konservasi di laut/pesisir baik dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem/lingkungan. ●





PROVINSI JAWA TIMUR





Dr. H. Soekarwo, SH, MHum
Gubernur Jawa Timur



Drs. H. Saifullah Yusuf
Wakil Gubernur Jawa Timur

VISI:

Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak

MISI:

- Pada periode 2014-2019, Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa misi pembangunan. Pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan perluasan lapangan kerja. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Dalam hal ini dilakukan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi.
- Sementara itu, misi ketiga adalah meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang. Lalu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya. Lalu yang keempat adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- Sedangkan yang kelima adalah meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Dalam hal ini meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama. Lalu meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib serta meningkatkan penguatan kearifan lokal (*local wisdom*).



PENGELOLAAN DATA UNTUK ATASI PENGANGGURAN

PENGANGGURAN menjadi masalah penting bagi suatu daerah. Di sisi lain, berbagai industri yang ada di wilayah itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Untuk menjembatannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengelola dua hal itu dalam satu aplikasi AyoKerja.

Dari dulu hingga sekarang ini, “pengangguran” menjadi kata yang menghantui benak penduduk Indonesia. Tak hanya penduduk Indonesia yang memang sudah memasuki usia kerja, tapi juga bagi pemerintah. Pengangguran menjadi momok persoalan yang harus terus menerus diatasi pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah Indonesia juga sudah menepakati berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tantangan semakin berat.

Tengok saja, misalnya, tantangan yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduknya cukup banyak, mencapai 39 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sekitar 20,27 juta. Sementara yang mendapat kesempatan kerja sangat terbatas. Sedikitnya 19,36 juta. “Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini tugas yang berat. Wilayah Jatim luas dengan jumlah penduduk banyak, tapi kesempatan kerja terbatas,” aku Mukadi, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Lantaran itu, berbagai upaya pun dilakukan. *Alhamdulillah*, dalam lima tahun terakhir, upaya tersebut membawa hasil positif. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur selalu di bawah rata-rata nasional. Tapi hasil positif ini tak menghentikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus berupaya dan mencari jalan mengatasi persoalan pengangguran. Pasalnya, pengangguran di Jawa Timur sebesar 4,19 persen pada 2014, meningkat menjadi





4,47 persen pada 2015. Kemudian, penganggur usia muda dan berpendidikan SLTA, SMK, D3 serta sarjana, kenaikannya rata-rata 1,9 persen per tahun.

Sehingga, sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pemberian Layanan yang Berprinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan lainnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat terobosan dengan layanan berbasis *online* yang dinamai “Layanan Inovasi Ayo Kerja”.

Menurut Mukadi, dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan kota, selama ini tidak memiliki contoh model layanan penempatan tenaga kerja. Alhasil, layanan berbasis *online* “Ayo Kerja” yang dibikin Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, sangat membantu para pencari kerja lebih cepat mendapatkan informasi dan memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan.

Di sisi lain, perusahaan juga cepat mendapatkan calon tenaga kerja sesuai kebutuhannya. “Hasilnya, ada perbaikan layanan langsung ke masyarakat pencari kerja dan sistem penempatan kerja, khususnya di level provinsi, serta menjadi model untuk diduplikasi di dinas-dinas pada tingkat kabupaten dan kota,” kata Mukadi.

Kepala Seksi Bursa Kerja Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo, menambahkan, berkat “Layanan Inovasi Ayo Kerja”, setiap tahun ada peningkatan jumlah anggota perusahaan yang aktif memasang lowongan pekerjaan. Jumlah lembaga baik SMK, universitas, BLK dan lembaga lainnya yang tergabung dalam jejaring bursa kerja, setiap tahunnya juga mengalami peningkatan sebanyak 31 persen.

“Pada tahun 2014 tercatat jumlah anggota perusahaan sebanyak 880 perusahaan. Sedangkan yang aktif memasang lowongan mencapai 75 persen. Kemudian lembaga yang telah tergabung dalam bursa kerja, sebanyak 93 SMK, 15 PT, 16 BLK, dan lainnya sebanyak 29 lembaga,” ungkapnya.

Budi menegaskan, inovasi layanan Ayo Kerja sangat banyak manfaatnya. Antara lain, meningkatkan pelayanan di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan merupakan pendekatan baru yang dilakukan dinas di tingkat provinsi dalam rangka perbaikan layanan yang lebih bersifat proaktif (promotif), informatif dan partisipatif, serta berbasis *e-government*. Masyarakat pun ikut berpartisipasi langsung menyampaikan apresiasi, pengaduan, dan saran terkait permasalahan di dunia kerja. “Informasi lowongan terjamin dan terlindungi kepastiannya. SOP didukung oleh pengakuan ISO 9001:2008,” tandas Budi.

PERKUAT BASIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Ayo Kerja menjadi nama aplikasi layanan online yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sama dengan tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2015. Tentu saja aplikasi itu menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pemerintah pusat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas.

“Tujuannya agar basis ekonomi nasional menjadi lebih kuat, serta mampu memperkuat rupiah,” kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Pakde Karwo, panggilan akrabnya itu pun menegaskan implementasinya di Jawa Timur dilakukan dengan memperkuat perdagangan dalam negeri dan memperkuat industri sebagai *backbone* dari ekonomi.



Nilai slogan AyoKerja mendorong partisipasi, kerjasama dan kemitraan antara para pihak merupakan dorongan kuat untuk mempercepat pelaksanaan keberhasilan model ini.



Meningkatkan nilai pelayanan publik dan perubahan terhadap budaya kerja terutama kristalisasi budaya kerja lembaga yang Akurat, Ramah, Cepat, Aktual dan Memuaskan dengan konsep pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan aktual (faster, cheaper, easier, newer)

Merubah mind set birokrasi melalui spirit dan budaya kerja di provinsi yang lebih bersifat koordinatif, monitoring dan evaluatif menjadi reformasi dan perbaikan pelayanan yang lebih bersifat proaktif, informatif dan partisipatif berbasis e-government.

NILAI-NILAI INOVASI AYO KERJA

1

2

3

4

5



Mendorong Reflikasi, Duplikasi dan Sinergitas di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota.



Administrasi layanan pemerintah bersifat kolaboratif



“Perdagangan dalam dan luar negeri merupakan satu kesatuan. Ayo kerja agar rupiah jangan sampai melemah. Dalam perdagangan, Jawa Timur pun menjalin hubungan dagang dengan 26 provinsi. Kami juga tetap memperkuat industri sebagai *backbone* dari ekonomi. Sebab industri memberikan nilai tambah,” ujar Pakde Karwo.

Ia menegaskan, melalui gerakan “Ayo Kerja”, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kerja. “Untuk mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan, dengan tetap menjaga stabilitas politik dan kemasyarakatan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Menurutnya, “Ayo Kerja” bukan sekadar kerja biasa. Kerja dengan keinsyafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia dan selalu bergotong royong dari anak bangsa tanpa terkecuali. “Hanya dengan kerja keras, cerdas dan nyata, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan raganya untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya dengan kerja, Republik Indonesia dapat berdiri kokoh untuk selamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” paparnya

Di bagian lain, Pakde Karwo menyampaikan, nilai transaksi perdagangan dalam negeri tahun 2014 Provinsi Jawa Timur mencapai Rp90,33 triliun naik Rp19,91 triliun (28,2 persen) dibanding dengan tahun 2013. Tren perdagangan dalam negeri tahun 2009-2014 surplus meningkat 936 persen dan rata-rata tumbuh 187 persen per tahun. Yang lebih menggembirakan lagi, nilai transaksi perdagangan dalam negeri sampai dengan semester satu tahun 2015 sudah mencapai Rp56,59 triliun.

“Meski sudah memasuki era MEA, kita akan tetap menjaga dan mengoptimalkan potensi perdagangan antar pulau karena ekspor dalam negeri ini tak kalah pentingnya dengan ekspor ke luar negeri,” tegasnya.

Tak hanya puas dengan pembangunan aplikasi AyoKerja, dalam mengatasi pengangguran Pemerintah Provinsi Jawa timur terus melakukan inovasi. Salahsatu upaya lainnya adalah mendorong pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). “Keberadaan koperasi dan UMKM itu nyatanya mampu menyerap pengangguran,” kata Pakde Karwo.

Hingga saat ini, jumlah koperasi dan UMKM di Jawa Timur jumlahnya tidak kurang dari 30 ribu unit. Jumlah tersebut mampu merekrut tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di provinsi ini. “Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada yang berani mengurangi jatah atau bantuan untuk koperasi dan UMKM. Dosanya besar. Sebab, koperasi ada dari masyarakat dan hasilnya pun kembali untuk masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya mampu mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan, sektor koperasi dan UMKM juga telah menyumbang jumlah yang cukup fantastis untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur. “Kontribusinya bisa mencapai 58,8 persen,” imbuh Soekarwo.

Dalam perjalannya, Provinsi Jawa Timur selalu menjadi nomor satu di Indonesia dalam hal perkoperasian. Hal itu bukan karena banyaknya jumlah koperasi di Jawa Timur, tetapi lebih karena program-program yang disusun dan dibuat oleh pemerintah provinsi dapat dilaksanakan dan berkembang dengan baik. “Sehingga, koperasi bisa menjadi penggerak perekonomian, baik bagi masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan,” kata Gubernur.

Keberhasilan koperasi dan UMKM di Jawa Timur dalam meningkatkan perekonomian tercermin dari kinerjanya yang sangat memuaskan. Saat ini omzet koperasi per tahun bisa mencapai Rp40 triliun dengan jumlah aset sebesar Rp30 triliun. Sedangkan anggota yang dimiliki sekitar delapan juta orang di seluruh wilayah Jawa Timur.

Agar terus berkembang dan meningkatkan perekonomian serta menyerap lapangan kerja yang semakin banyak, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Di antaranya dengan memberikan bantuan hibah modal hingga puluhan juta rupiah dan program lainnya. ●



KABUPATEN BANTUL



KABUPATEN BANTUL



Drs. H. Suharsono
Bupati Bantul



H. Abdul Halim Muslih
Wakil Bupati Bantul

VISI:**Bantul Projotamansari Sejahtera,
Demokratis, dan Agamis****MISI:**

- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
- Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

MENJAGA KESEHATAN JIWA DENGAN PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT

JIKA Anda bertandang ke Bantul, sudah sulit menemukan sisa-sisa jejak gempa luar biasa yang mengguncang wilayah itu pada 27 Mei 2006. Tak ada lagi sisa bangunan ambruk. Juga tak ada puing bangunan berserakan.

Tetapi, meski secara fisik telah kembali utuh, Bantul ternyata masih memendam luka. “Saat ini, seperti yang juga terjadi di daerah lain yang pernah terlanda bencana besar, Bantul adalah wilayah dengan gangguan kejiwaan yang terbilang tinggi,” kata Drg. Maya Sintowati Panji, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

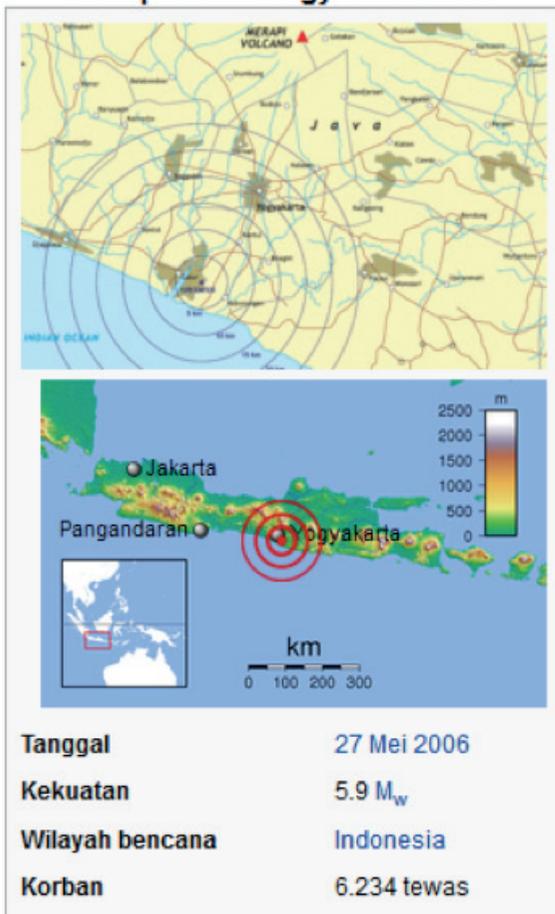
Secara teoritis, ujar dokter Maya, setiap manusia memiliki potensi terkena gangguan kejiwaan. Potensi itu akan benar-benar menjadi gangguan jiwa jika seseorang mengalami trauma fisik ataupun mental yang dahsyat.

Trauma yang terjadi akibat gempa 2006 di Yogyakarta itu lah yang membuat angka gangguan jiwa di Bantul - dan daerah lain yang terpapar gempa di Yogyakarta dan sekitarnya - mengalami peningkatan.

Gempa yang melanda Bantul pada 2006 itu memang luar biasa dampaknya. Tak kurang dari 4.000 warga Bantul yang tewas. Yang mengalami luka dan menjadi cacat jumlahnya. Bahkan, tak sedikit orang yang kehilangan rumah dan seluruh anggota keluarganya dalam bencana itu.

Kondisi itulah yang membuat angka orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Bantul menjadi sangat tinggi. Beruntung, pada kondisi yang demikian, muncullah sebuah prakarsa masyarakat yang membentuk

Gempa Bumi Yogyakarta 2006



organisasi bernama Gelimasjiwo (Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa).

Gelimasjiwo didirikan pada 2007 oleh para kader kesehatan di Puskesmas Kasian II, Kecamatan Kasian, Bantul. Pendirian Gelimasjiwo dimotori oleh perawat di Puskesmas II Kasihan (ibu Diah, ibu Siti) dan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY (ibu Warih dan ibu Shanti). Mereka kemudian mendapatkan bantuan penuh dari para kader kesehatan masyarakat di dua desa itu.

Menurut Diah, salah satu tokoh yang membidani lahirnya Gelimasjiwo itu, salah satu pemicu berdirinya organisasi ini adalah karena tingginya kasus bunuh diri di kalangan masyarakat setelah terjadinya gempa tersebut. Banyak orang yang mengalami trauma fisik ataupun kejiwaan akhirnya melakukan bunuh diri karena tak mampu menahan beban jiwa.

Hal pertama yang dilakukan oleh Gelimasjiwo adalah mendata jumlah ODGJ di dua desa yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Kasian II, yakni Desa Ngestiharjo dan Desa Tirtonirmolo, Kecamatan

Kasian, Kabupaten Bantul.

Para kader yang sudah dibekali dengan pengetahuan tentang tanda-tanda awal ODGJ langsung terjun ke masyarakat. Hasilnya luar biasa mengejutkan. Dari dua desa itu, terdapat lebih dari 200 ODGJ yang perlu penanganan. Para kader itu kemudian merayu agar para penderita mau berobat ke Puskesmas.

Ini bukan pekerjaan yang mudah. Berbeda dengan orang yang berpenyakit fisik, ODGJ umumnya tak menyadari bahwa dirinya sakit. Bahkan, banyak orang yang berusaha menutup-nutupi ketika ada anggota keluarganya yang terkena gangguan jiwa.

Gara-gara dua hal itu, WHO memperkirakan bahwa ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan tak lebih dari 2 persen penderita. Sementara, 98 persen lainnya, sama sekali tak tersentuh oleh layanan kesehatan. Nah, berkat konsep yang dikembangkan oleh Gelimasjiwo, jumlah ODGJ yang mendapat layanan pengobatan di dua desa itu kini telah mencapai sekitar 47 persen.

“Makanya, dalam konsep Gelimasjiwo, yang kami dekati bukan hanya pasien saja, tapi juga keluarganya,” ujar Eko Budi Santoso, SST., M.Kes, Kepala Puskesmas Kasian II. Masyarakat dan keluarga dilatih untuk menerima keberadaan ODGJ di lingkungannya secara ikhlas. Keluarga juga dibekali pengetahuan tentang pengawasan konsumsi obat, dan tata cara menangani kekambuhan. Jika keluarga tak mampu menangani sendiri, mereka bisa minta bantuan kepada kader dan masyarakat.

Dalam penanganan ODGJ, menurut drg. Maya, konsep yang dikembangkan di Bantul adalah dengan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat. Masyarakat menjadi subyek dan sekaligus obyek pembangunan kesehatan. Nyatanya, konsep ini terbukti manjur untuk mengatasi masalah gangguan kejiwaan di Bantul pasca-bencana.

Keberhasilan Gelimasjiwo yang lahir di sebuah Puskesmas itu kini bahkan telah direplikasi oleh seluruh Puskesmas di tujuh –dari 17–kecamatan di Kabupaten Bantul. “Seluruh kabupaten/kota di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah mereplikasi program ini untuk penanganan ODGJ di daerah masing-masing. Pada tahap ujicoba, setiap kabupaten/kota melaksanakan program seperti ini masing-masing di 2 Puskesmas,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Drs. Riyantono, M.Si.

JANGAN DISISIHKAN

drg. Maya menambahkan, prinsip pentatalaksanaan ODGJ memang lebih rumit dibandingkan dengan pentatalaksanaan penyakit fisik. Penanganan ODGJ harus diintegrasikan dengan semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, hukum, perlindungan anak dan perempuan, kesehatan, sosial, politik dan keamanan.

Di sisi lain, ODGJ juga cenderung dimarginalkan dan tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka mendapat stigma seakan mereka adalah sosok yang membahayakan keselamatan masyarakat, sumber gangguan, dan sebagainya. Stigma itu pada akhirnya menjadikan banyak ODGJ yang dieksploitasi dan bahkan tak jarang menjadi korban pelanggaran HAM.

Padahal, di sisi lain, stigma dan penolakan dari masyarakat itu sesungguhnya akan berpengaruh negatif pada pasien ODGJ. Kondisi pasien yang merasa disisihkan justru akan semakin memburuk. Bahkan, pasien yang mendapatkan perawatan medis secara baik pun akan mengalami penurunan kondisi jika pasien merasa bahwa keluarga dan masyarakat tak menerima dirinya.

Prinsip-prinsip pentatalaksanaan ODGJ ini nyaris sudah diimplementasikan dalam gerakan Gelimasjiwo. Dr. Shanti Wardaningsih, dosen ilmu keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang juga ikut membidani lahirnya Gelimasjiwo secara tegas menyatakan bahwa dari awal pihaknya mendorong masyarakat agar bersikap lebih terbuka dan menerima keberadaan ODGJ sebagai bagian dari masyarakat dan keluarga.

Bahkan, konsep penerimaan masyarakat dan keluarga ini menjadi nilai pertama yang ditanamkan Gelimasjiwo dalam penanganan masalah ODGJ. Jadi, ujar Shanti, pada prinsipnya Gelimasjiwo menerapkan dua pendekatan dalam penanganan ODGJ. Pendekatan pertama adalah pendekatan pengobatan, sedangkan yang kedua adalah pendekatan pendampingan.

Dr. Shanti yang memiliki latar belakang profesi perawat ini menyatakan, pendekatan pengobatan sangat penting dalam penanganan pasien ODGJ. Namun, tambah dia, ODGJ yang mendapatkan pengobatan biasanya memang dapat sembuh.



Meskipun demikian, mereka tetap memiliki potensi untuk kembali mendapatkan gangguan jiwa jika mereka mendapatkan tekanan. “Daya tahan mereka terhadap stres biasanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tak pernah terkena gangguan jiwa,” ujarnya.

Di sinilah peranan pendekatan pendampingan menjadi sangat penting. Pendamping yang telah terlatih akan segera tahu jika pasien ODGJ mengalami kekambuhan dan bisa segera membawa ke instalasi pengobatan. Di sisi lain, pendamping juga dapat menjadi katalisator jika ada faktor pemicu stres terhadap pasien dan mantan pasien ODGJ. “Misalnya, saat ada orang yang bilang ‘kamu gila’, pendamping akan segera berusaha mengalihkan perhatian sang pasien atau mantan pasien itu,” ujar Shanti.

Lebih jauh dari itu, doktor ilmu keperawatan lulusan Jepang ini menyatakan bahwa pendamping juga berperan besar agar sang pasien atau mantan pasien ODGJ dapat hidup produktif dan tidak menjadi beban keluarga maupun masyarakat.

Berangkat dari sini, para pendamping pun memberikan pelatihan ketrampilan kepada pasien ODGJ maupun mantan pasien ODGJ. Dalam kasus Gelimasjiwo, mereka diajari membuat taplak meja dan aneka rupa kerajinan serta membuat makanan.

Produk dari mereka itu kemudian dijual kepada masyarakat luas. Untuk kepentingan ini, Gelimasjiwo pun kemudian membuat angkringan (kedai makanan dan minuman khas Jogjakarta) yang menjual produk dari para pasien dan mantan pasien ODGJ ini.

Angkringan Gelimasjiwo dikelola oleh para kader dan para pasien dan mantan pasien ODGJ. Hal itu dilakukan dengan sejumlah alasan. Dengan dilibatkan langsung pada pengelolaan angkringan, para mantan pasien akan merasa bahwa dirinya punya makna dan dihargai. Mereka tak lagi merasa sebagai orang yang disisihkan dari lingkungannya.

Di sisi lain, dengan terlibat dalam pengelolaan angkringan, mereka juga bisa bertemu dengan berbagai macam orang yang tak seluruhnya memiliki tabiat dan perilaku yang baik saat berhadapan dengan ODGJ. Ada risiko bahwa hal ini bisa memicu kekambuhan, memang. Namun, berdasarkan pengalaman para kader, tabiat dan perilaku konsumen yang beragam itu justru meningkatkan daya tahan ODGJ terhadap faktor-faktor pemicu stres.

Inovasi yang dilakukan di Bantul ini tentu dapat memberikan inspirasi bagi daerah lain yang mungkin mengalami masalah serupa. Maklum, Indonesia memang memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi karena wilayah negeri ini berada di sabuk api dunia. Di kawasan ini, banjir, gempa, gunung meletus, bahkan tsunami dan sebagainya bisa terjadi setiap saat.

Tak heran, Sekda Bantul secara tegas menyatakan bahwa meskipun Gelimasjiwo lahir dan berkembang dari inisiatif masyarakat, Pemkab Bantul senantiasa mendukung perkembangannya dengan memberikan keberpihakan dalam bidang aturan dan pendanaan. ●



KABUPATEN BINTAN



KABUPATEN BINTAN



Apri Sujadi, S.Sos
Bupati Bintan



Dalmasri Syam, MM
Wakil Bupati Bintan

Visi:

Menuju Bintan yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya

Misi:

- Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertakwa
- Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan
- Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis.
- Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.
- Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan diseluruh wilayah Kabupaten Bintan.
- Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender.
- Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan lingkungan (*Sustainable Development*).

MELESTARIKAN MANGROVE UNTUK WISATA DAN KESEJAHTERAAN WARGA

SUDAH lama Kabupaten Bintan menjadi salah satu icon pariwisata di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Saban akhir pekan, Bintan selalu ramai dikunjungi wisatawan dari Jakarta dan berbagai negara. Mereka tumpah ruah datang ke Bintan untuk menikmati keindahan alam yang luar biasa indahnya itu.

Posisi geografis Bintan memang sangat menguntungkan. Bintan sangat dekat dengan sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN, Batam, Johor, dan Singapura. Penyeberangan Bintan-Johor hanya makan waktu puluhan menit. Penerbangan Jakarta - Bintan dan Singapura - Bintan pun tersedia. Hal itu makin menaikkan daya tarik Bintan di mata para wisatawan.

Tak heran, Anda bisa menemukan puluhan hotel mewah di Bintan. Bahkan, jangan kaget, di kota kecil ini ada bungalow yang disewakan dengan harga Rp120 juta per malam. Kabupaten Bintan juga dikenal memiliki fasilitas olahraga golf kelas dunia.

Tetapi, di tengah berbagai kehebatannya itu, Kabupaten Bintan justru menjadi salah satu kabupaten yang mampu mempertahankan keaslian lingkungan pantainya. Di Bintan, hutan mangrove yang tumbuh lebat di hampir semua wilayah pantainya justru dipertahankan. Hutan mangrove di kawasan ini nyaris tak terkoyak oleh tumbuhnya industri kepariwisataan.

Pemerintah Kabupaten Bintan menyadari bahwa hutan mangrove memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai penyedia bahan pangan, papan, dan kesehatan serta lingkungan. Di Bintan, hutan mangrove tak boleh dibabat sembarangan dan dialihfungsikan menjadi tambak atau dijadikan

lahan pembangunan hotel.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bahkan menggalakkan program pelestarian dan pemberdayaan hutan Mangrove dengan konsep yang ramah lingkungan. Pemkab Bintan setidaknya memiliki enam prinsip pengelolaan kawasan Mangrove yang secara tegas mengedepankan unsur prinsip kelestarian. “Hampir semua wilayah kita insya Allah Mangrove-nya masih terjaga dengan baik,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Bintan, Setioso dalam paparannya.

Setioso menambahkan, Bintan punya aturan bahwa setiap pembangunan infrastruktur atau sarana penunjang pariwisata tidak diperkenankan merusak ekosistem mangrove yang ada. Terbukti, di sepanjang jalan Bintan lintas barat yang terdapat banyak jembatan pun terlihat tidak sama sekali menghilangkan keberadaan hutan Mangrove. Justru pemandangan indah nan sejuk terhampar luas dan memanjakan mata siapapun yang melintasi jembatan penghubung antar kecamatan itu.

Hal serupa juga diterapkan kepada investor yang ingin mengembangkan kawasan wisata. Alhasil, banyak kawasan wisata di Bintan yang justru menjadikan hutan bakau sebagai area konservasi. Bahkan, Pemkab Bintan memanfaatkan hutan bakaunya untuk dijadikan sarana wisata. Salah satunya adalah hutan Mangrove yang berlokasi di Sungai Sebong dan berada di kawasan wisata Bintan Resort. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Banyak turis yang suka dengan indahnya kelestarian hutan Mangrove yang ada di Bintan.

“Pemkab Bintan memasang target untuk menjadikan hutan bakau sebagai obyek wisata alam yang berbasis pendidikan dan lingkungan,” ujar Setioso. Salah satu wisata mangrove yang dikembangkan adalah Sungai Sebong yang membelah kawasan Kampung Lagoi. Sungai Sebong, airnya yang sangat jernih membentang sepanjang 6,8 kilometer dari danau di sebuah bukit.

Menurut Setioso, hutan mangrove di Sungai Sebong ini berhasil diselamatkan dari ancaman kerusakan berkat usaha serius dari pemerintah dan masyarakat. Tidaklah heran jika pada 2003, *Bintan Mangrove Discovery Tours* mendapatkan penghargaan PATA (*Pacific Asia Travel Association*) Gold Award untuk kategori ekowisata.

Begitu masuk ke kawasan wisata ini, suara monyet akan segera

terdengar bersahutan karena populasinya memang masih cukup banyak. Aneka tumbuhan bakau di kawasan ini memang merupakan habitat yang cocok untuk kehidupan monyet abu-abu. Jika beruntung, kita juga bisa bertemu dengan burung raja udang (kingfishers) atau burung kuntul yang cantik di kawasan ini. Binatang lain seperti berang-berang, ular pohon, dan ribuan kunang-kunang kadangkala juga muncul dan menambah pesona wisata mangrove ini.

Pepohonan bakau di hutan mangrove Sungai Sebung ini juga cukup beragam. Ada *Avicennia*, yang sering juga disebut pohon api-api yang hidup di pantai berpasir. Lalu ada bakau *Rhizophora* yang akarnya tumbuh hingga melayang di atas tanah sebagai pelindung pantai. Terdapat juga akar lutut alias *Bruguiera* yang tumbuh subur di



kawasan campuran air asin dan air tawar, tanaman ini dapat tumbuh hingga 30 meter. Terakhir adalah *Xylocarpus* yang tumbuh di air tawar dan memiliki buah besar seukuran bola sepak.

Sebenarnya, di luar kawasan Sebong, vegetasi bakau di Bintan masih sangat beragam. Setidaknya, ada 50 jenis yang termasuk ke dalam 27 famili yang tersebar di Pulau Siolong, Pulau Kelong, dan Teluk Bakau. Beberapa jenis mangrove yang umum dijumpai adalah *Avicenia Mariana*, *A. Officinalis*, *A. Alba*, *Bruguera Gymnarrhiza*, *B. Parviflora*, *B. Sexangula*, *Rhizophora Apiculata*, *R. Mucronata*, *Sonneratia Alba*, *S. Caseolaris*, *Excoecaria Agalloca*, *Xylocarpus Granatum*, *X. Moluccensis*, *Nypa Fruticans*, dan lainnya. Di samping itu, di tengah hutan mangrove di Bintan, juga kerap ditemui aneka tumbuhan nonbakau seperti waru, ketapang, kelapa, butun, dan sebagainya.

Karena tingginya perhatian terhadap mangrove, menurut Setioso, tak lama lagi Bintan akan memiliki museum Mangrove di Tanjung Berakit. Lokasinya bersebelahan langsung dengan museum dapur arang lengkap dengan pemukiman suku laut yang sukses didaratkan oleh Pemkab. Tidak jauh dari situ pun tengah dibangun sebuah pelabuhan internasional, yang akan menjadikan Tanjung Berakit sebagai pintu masuk turis mancanegara. Para wisatawan asing yang



masuk akan langsung disambut oleh museum mangrove yang megah.

Maklum, lokasi Tanjung Berakit berdekatan dengan Johor Baru (Malaysia). Pembangunan ini sekaligus merupakan kegiatan revitalisasi lingkungan. “Tanjung Berakit dulu merupakan daerah kumuh dan kerap jadi tempat pengiriman TKI ilegal dan narkoba. Kami akan menyulapnya menjadi kawasan pelabuhan yang dilengkapi langsung wisata alam dan wisata sejarah,” tambah Lamidi, Sekertaris Daerah Kabupaten Bintan.

Tentu, untuk menjaga kelestarian hutan mangrove ini, masyarakat harus mendapatkan keuntungan langsung sehingga mereka akan secara aktif untuk ikut menjaga. Untuk itu, Pemkab Bintan bertekad untuk melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan ekosistem mangrove ini.

Sesuai dengan PP No 73 Tahun 2012, arah kebijakan dari pengelolaan ekosistem mangrove memang diarahkan untuk sebanyak mungkin melibatkan masyarakat. Pengelolaan hutan mangrove harus berfungsi untuk meningkatkan dan melestarikan nilai penting ekologis, ekonomi dan sosial budaya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan berbagai kepentingan (pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral dan masyarakat umum).

Untuk itu, Pemkab Bintan telah menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Bintan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan pengolahan produk, serta memberikan penyuluhan dan fasilitasi kepada masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Dengan kebijakan ini, semua stakeholder menjadi tahu tentang fungsi dan peran masing-masing. Lebih jauh dari itu, masyarakat juga mendapatkan peluang untuk memanfaatkan hutan mangrove untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Yang pasti, kehadiran hutan mangrove ini sudah berhasil memperkaya portofolio kepariwisataan Kabupaten Bintan yang pada dasarnya memang sudah kaya. Kabupaten Bintan kini memiliki sangat banyak tujuan wisata unggulan, seperti Pantai Trikora, Pantai Lagoi,



Vihara Avalokitesvara, Desa Nelayan Sri Bintan, Waduk Bintan Resort, dan kawasan wisata mangrove ini. Jika mau ditambah, Ria Bintan Golf juga pantas dimasukkan ke dalam wisata unggulan kawasan ini.

Pantai Trikora merupakan pantai dengan garis panjang di pesisir timur Pulau Bintan. Berjemur di pinggir pantai sambil memandang ke laut lepas sambil menikmati sepoi-sepoi angin pantai.

Sementara Pantai Lagoi indah karena “dihiasi” batu-batu granit. Nuansa Lagoi yang berhadapan dengan Malaysia dan Singapura ini dikenal sebagai kawasan wisata yang terbilang mahal. Jika ingin berwisata yang sedikit lebih murah, kawasan sekitar waduk Bintan Resort bisa dijadikan pilihan.

Di waduk ini, kita bisa, mendayung, atau bermain kayak. Tapi, apa pun pilihannya, kita akan sepakat bahwa Pemkab Bintan sukses mengajari kita bahwa pembangunan dalam bidang apa pun bisa dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan hutan mangrove. ●



KABUPATEN KUDUS



KABUPATEN KUDUS



H. Musthofa
Bupati Kudus



H. Abdul Hamid
Wakil Bupati Kudus

VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

- **Terwujudnya Kudus yang Makin Sejahtera.** Demikian visi Pemerintahan Kabupaten Kudus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, yang saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Kudus, H. Musthofa, dan Wakil Bupati, H. Abdul Hamid.
- Tentunya, mewujudkan visi tersebut, bukan perkara mudah seperti membalik telapak tangan. Guna mencapai visi itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai leading sektor, harus aktif dan inovatif merealisasikan melalui sejumlah misi. Setidaknya, ada delapan (8) misi.
- Pertama, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan dan Menengah (UMKM), bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan pengembangan UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
- Kedua, mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. Tujuan, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
- Ketiga, tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. Tujuan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.
- Keempat, perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. Tujuan, pengembangan kesempatan kerja dan berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja.
- Kelima, meningkatkan ekonomi daerah yang berdaya saing. Tujuan terbagi dua, yakni peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah, dan peningkatan sektor pertanian.
- Keenam, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Misi keenam ini ada empat tujuan, yakni peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah; perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan; peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, dan perwujudan tertib pertanahan.
- Ketujuh, perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tujuannya antarlain, terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, ketertiban sosial dan masyarakat.
- Kedelapan, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial. Pada misi yang terakhir ini tujuannya meliputi perwujudan nilai kehidupan beragama di masyarakat; peningkatan pelestarian seni budaya daerah; pembangunan potensi pemuda dalam pembangunan; perwujudan pembangunan yang berkeadilan sosial, dan; peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial.

MENCETAK PELAKU USAHA MIKRO YANG JUJUR DAN HANDAL

KUDUS adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ia berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat, Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, Kabupaten Pati di sebelah timur, dan Kabupaten Jepara dan Pati di sebelah Utara.

Secara administratif, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan luas wilayah sebesar 425,60 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kudus ini, terbagi atas 20.620 hektar (48,50 persen) lahan sawah dan 21.896 hektar (51,50 persen) bukan lahan sawah.

Kudus termasuk kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi diantara kabupaten lain dalam wilayah eks-karesidenan Pati. Setiap tahun, tingkat kepadatan penduduk Kudus kerap meningkat karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, sementara luas wilayahnya tetap sama alias tidak berubah.

Nah, lantaran itu, tentunya dibutuhkan berbagai upaya terobosan dan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk mencapai visi yang telah ditetapkan yakni terwujudnya masyarakat Kudus yang sejahtera. Ini bukanlah sebuah perkara yang sepele. Ambil contoh, misalnya, dalam upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pemberian kredit.

Toh, kenyataan, selama ini masih banyak dari mereka, khususnya pelaku usaha mikro yang belum bahkan tidak tersentuh kredit tersebut. Padahal, jumlah usaha mikro di Indonesia terbilang sangat besar, mencapai 58 juta unit. Program kredit yang ada lebih banyak menyentuh pada kredit komersil dan tidak merata ke semua sektor, sehingga tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera maupun program pengentasan kemiskinan belum maksimal.

Hal seperti itu juga dialami pelaku usaha mikro di Kudus. Dari 13.200 unit usaha mikro yang ada di Kudus, banyak yang tidak tersentuh perbankan. Permodalan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya. Memprihatinkan lagi, banyak dari mereka akhirnya terjerumus pinjaman modal dari rentenir.

Pertanyaannya, mengapa kebanyakan pelaku usaha mikro tidak tersentuh perbankan? Jawabannya, mereka dianggap memiliki *moral hazard* kurang baik dan bermasalah. Benarkah anggapan seperti itu? Nah, inilah yang menjadi pembuktian Pemkab Kudus dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Anggapan pelaku usaha mikro mempunyai *moral hazard* dan bermasalah dalam pinjaman kredit sama sekali jauh dari kebenaran. Program Kredit Usaha Produktif (KUP) yang merupakan inisiatif Bupati Kudus, Musthofa, dan digulirkan Pemkab Kudus, membuktikan pelaku usaha mikro di Kudus adalah pelaku usaha yang benar-benar jujur dan handal. Mereka mampu mengembangkan usahanya, bahkan menaikkan kelas usahanya dari pelaku mikro menjadi usaha kecil.

Seperti halnya dialami Solihin, seorang pengrajin tas batik dan pembuat parsel di Kudus. Sekarang ini, bisa dibilang ia bukan lagi pelaku usaha berkategori mikro. Berkat KUP, dia sudah naik kelas menjadi pelaku usaha kecil dan menengah.

Awalnya, usaha Solihin hanya beromset Rp3 juta per bulan dengan sedikit tenaga kerja. Namun, setelah menerima dan memanfaatkan bantuan program KUP, omset usaha Solihin meningkat drastis mencapai Rp22 juta per bulan. Tenaga kerja yang membantu usahanya pun bertambah banyak. “Sekarang tenaga kerja saya ada 29 orang,” tuturnya dalam satu kesempatan pertemuan dengan Bupati Musthofa di Kantor Bupati.

Selain omset dan tenaga kerja yang bertambah banyak, Solihin kini bahkan sudah memiliki transportasi sendiri untuk menjalankan usahanya. Lewat transportasi itu ia mampu melayani permintaan konsumen dari luar Kudus. “Saya mendapat pinjaman KUP sebesar



Rp20 juta. Pinjaman saya gunakan membeli bahan dan peralatan untuk pengembangan usaha. Alhamdulillah seperti sekarang ini,” ujarnya dengan wajah yang sumringah.

Hal serupa dialami Arif, pelaku usaha kreatif pembuatan kerudung “Aila”. Setelah mendapatkan pinjaman KUP sebesar Rp20 juta, ia berhasil menaikkan omset penjualannya hingga 50 persen. “Omset naik kisaran Rp10 sampai Rp12 juta,” tuturnya seraya menambahkan pinjaman KUP itu dia gunakan untuk membeli peralatan dan bahan.

Begitu juga pengalaman Suhartini dan Suherni. Suherni yang membuka usaha jajanan kue di sekolah-sekolah dan *catering* berhasil meningkatkan pendapatan antara Rp5 juta hingga Rp10 juta. Suherni meminjam KUP sebesar Rp15 juta yang digunakan membeli peralatan. “Cicilan kredit setiap bulan sebesar Rp540 ribu. Dari awal sampai sekarang lancar,” cetusnya bangga.

Sedangkan Suhartini mengaku berkat pinjaman KUP sebesar Rp10 juta, usaha jajanan kue yang pada awalnya hanya sekitar lingkungan rumah, kini juga banyak datang dari tempat tetangga yang jauh. Pendapatannya menjadi naik rata-rata Rp3 juta setiap bulannya.

Keberhasilan mengembangkan usaha mikro bisa dibilang dialami semua warga Kudus yang menjadi pemanfaat KUP yang hingga sekarang ini berjumlah kurang lebih 900 orang. Keberhasilan pengembangan usaha mikro ini dapat dilihat dari pengembalian KUP yang lancar alias sama sekali tidak ada yang macet. “Sampai sekarang NPL nol persen,” kata Edi Riyanto, Kasi Analisis Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.

Ia menambahkan, KUP yang disalurkan BPD Jawa Tengah untuk pelaku usaha mikro di Kudus mencapai Rp7 miliar lebih. Dari awal pengucuran KUP berjalan lancar. Tidak ada satu pun pemanfaat yang gagal bayar. “Termasuk penjual gorengan yang meminjam KUP sebesar Rp1 juta,” jelasnya.

Patut diketahui, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

Adapun usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga s/d Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 juta.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

Sementara Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

KREDIT USAHA PRODUKTIF

Kredit Usaha Produktif atau disingkat KUP adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*).

“KUP merupakan pinjaman modal tanpa jaminan bagi para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Karena banyak di antara para pelaku UKM yang tidak tersentuh perbankan,” terang Bupati Kudus yang sekaligus menjadi pencetus dan inisiator program KUP.

Ia pun memaparkan, program KUP digulirkan Pemkab Kudus karena keprihatinan selama ini pinjaman pelaku usaha mikro ke bank memerlukan agunan atau jaminan. Kehadiran KUP adalah sebagai solusi bagi pelaku UMKM yang “*feasible*” namun belum “*bankable*” dalam mengembangkan usahanya. “Kredit ini diperuntukkan bagi yang telah mempunyai usaha. Bukan bagi yang ingin memulai usaha,” kata Musthofa seraya menegaskan hal itu akan terlihat dari rekam jejak usaha pada saat verifikasi dilakukan.

KUP adalah program pemberian kredit dengan nilai dibawah Rp500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan

besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya.

Adapun masyarakat penerima kredit adalah masyarakat lapisan bawah yang bergerak pada usaha tani, pedagang, dan peternakan. Masing-masing penerima berhak mendapat pinjaman tanpa jaminan mulai dari Rp 5 juta – Rp 20 juta dengan bunga 6 persen. Lembaga penjamin yang terlibat dalam program KUP ini adalah 2 lembaga penjamin nasional, yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo; dan 2 lembaga penjamin daerah, yaitu PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (Jamkrida Jateng).

Meskipun jumlah debiturnya baru tercatat sebanyak 715 per 19 Desember 2015, namun tenaga kerja yang terserap pada sektor-sektor usaha di Kudus juga semakin meningkat. Selain itu, hingga kini para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan permodalan juga masih menjaga komitmennya untuk mengangsur pinjaman tepat waktu.

Bank Jateng Cabang Kudus yang menjadi mitra Pemkab Kudus dalam menggulirkan program KUP tersebut, mencatat sejak KUP digulirkan pada Maret 2015 hingga 19 Desember 2015 tingkat rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) masih nol persen. Sementara plafon pinjamannya minimal Rp5 juta dan maksimal Rp20 juta dengan jangka waktu kredit maksimal 36 bulan.

Terkait peluang program KUP menjadi program nasional, kata Musthofa, sangat terbuka. Hal ini menyusul banyaknya daerah yang mulai menerapkan program serupa. Apalagi, pada 28 Desember 2015, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) yang menyelenggarakan evaluasi program KUP, mendorong agar program KUP tersebut menjadi program nasional.

Hadir pada pertemuan tersebut antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Jateng, Pemkab Kudus dan Perum Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia). Selama ini, lembaga perbankan yang menjadi penyalur KUP memang mendapatkan penjaminan dari Jamkrindo.

Musthofa kembali menegaskan, tujuan program KUP adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Lewat program KUP tersebut, kata dia, pelaku usaha diharapkan memiliki akses pinjaman yang lebih luas dan peran usaha mikro dalam rangka mendukung perluasan kesempatan

kerja masyarakat juga semakin meningkat.

Pinjaman KUP jauh berbeda dengan program pinjaman permodalan yang sudah bergulir selama ini karena ada persyaratan agunan. Secara lebih rinci, tujuan program KUP adalah mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK; meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKMK kepada Lembaga Keuangan; dan sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Leading sektor program KUP ada di Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan 6 dinas yang selama ini membina UMKM. Program KUP melibatkan pula Kades dan Camat. Kades dan camat bertugas mensosialisasikan program, menghimpun data, mengidentifikasi kelayakan pelaku usaha, monitoring pelaksanaan usaha, dan menyerahkan data ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kemudian Bappeda berperan memberi rekomendasi calon penerima KUP, monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha, dan menyerahkan data yang sudah diverifikasi kepada Bank Jateng. Selanjutnya, adalah tugas Bank Jateng melaksanakan analisis kredit, menetapkan penerima dan plafon kredit, melakukan perjanjian kredit, dan lain sebagainya. “Bank Jateng sangat merasa terbantu. *Mindset*nya pun berubah,” kata Musthofa seraya menegaskan Pemkab Kudus berkeinginan kuat menciptakan pelaku-pelaku usaha mikro yang jujur dalam menjalankan usahanya. “Mereka ini *wong cilik* yang betul-betul bekerja. Kegagalan sebuah kredit itu bukan soal jaminan tapi mentalitas,” imbuhnya.

Kemudian, bagaimana cara usaha mikro di Kudus mendapatkan KUP dari bank pelaksana, dalam hal ini Bank Jateng? Usaha mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Putusan pemberian KUP sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana (Bank Jateng), sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Pelaku usaha mikro hanya menyerahkan identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.

Namun patut dicatat, KUP bukanlah merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat. Pelaku usaha mikro wajib mengembalikan dana pinjaman KUP tersebut kepada Bank pemberi KUP. Program KUP tidak menggunakan dana APBD. Pemkab Kudus hanya menggandeng BPD Jawa Tengah dan PT Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia sehingga kewajiban pelaku usaha mengembalikan KUP kepada Bank sampai lunas. ●



KABUPATEN KULONPROGO





dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)
Bupati Kulonprogo



Drs. H. Sutedjo
Wakil Bupati Kulonprogo

VISI:

Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

MISI:

- Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan
- Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*
- Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
- Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

UNIVERSAL COVERAGE MENJAMIN PASIEN GAKIN BISA DIRAWAT

PENERAPAN kebijakan *universal coverage* di Kabupaten Kulonprogo tampaknya menjadi jawaban dari masalah pelik dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Kebijakan *universal coverage* membuat masyarakat miskin bisa tetap dirawat di rumah sakit meskipun ruang rawat kelas 3 habis.

Sejak 2011 lalu, Bupati Kulonprogo sudah membuat sebuah terobosan yang memungkinkan pasien keluarga miskin dirawat di ruang klas 2, klas 1, ruang VIP, atau bahkan ruangan VVIP. Tak perlu khawatir soal biaya rumah sakit. Kendati dirawat di luar ruang kelas 3, para pasien keluarga miskin hanya perlu membayar biaya perawatan kelas 3.

“Artinya, pasien yang dijamin oleh BPJS ya kami klaim ke BPJS dengan biaya rawat kelas 3. Begitu pun jika mereka ditanggung oleh Jamkesda (jaminan yang dibiayai APBD Kabupaten), ataupun Jamkesus (yang dibiayai oleh APBD Provinsi),” kata Kepala RSUD Wates dr. Lies Indriyati Sp.A, kepada tim Kemendagri yang mengunjungi salah satu rumah sakit milik Pemkab Kulonprogo ini.

Terobosan yang kelihatannya kecil ini rupanya berdampak sangat besar. Berkat Peraturan Bupati No.65 Tahun 2011, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.6 tahun 2009 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah ini, rumah sakit tak bisa lagi menolak pasien dari keluarga miskin dengan alasan ruang rawat kelas 3 habis.

“Saya kira, pelayanan bagi rakyat itu harus dibuat sesederhana mungkin,” ujar Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG. Dia yakin, sebagian besar rakyat akan lebih menyukai pelayanan



yang mudah meskipun mereka harus keluar sedikit uang daripada layanan gratis namun pengurusannya berbelit-belit. Secara terbuka, sang bupati mengkritik berbagai kebijakan BPJS Kesehatan yang dinilainya menyulitkan rakyat.

“Daripada BPJS kebingungan, serahkan saja dana premi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada BPJS itu kepada kabupaten dan kota. Biarkan kami yang menangani penjaminan layanan kesehatan warga. Kalau kurang akan kami tambahi,” ujar bupati yang dua hari seminggu masih berpraktik sebagai dokter ahli kandungan ini. “Bupati dan Walikota lain juga berpendapat serupa kok,” tandasnya. Mekanisme itu, selain akan memudahkan BPJS, juga akan memperkuat kemampuan daerah dalam memberikan layanan kesehatan.

Layanan kesehatan di Kulonprogo sendiri, menurut Hasto, berjalan relatif baik dengan diterapkannya kebijakan rumah sakit tanpa kelas untuk keluarga miskin ini. Data yang dimiliki RSUD Wates pun menunjukkan hal serupa. Selama 2013, misalnya, dari total 8.863 pasien gakin yang dirawat, hanya ada 351 pasien yang terpaksa dimasukkan ke kelas lebih tinggi karena ruang rawat kelas 3 penuh.

Tahun berikutnya, pada 2014, dari jumlah 10.362 pasien gakin yang dirawat, hanya ada 292 pasien yang tempat perawatannya menggunakan kelas di atasnya.”Untuk yang 2014 itu, jika

diperhitungkan selisih biaya perawatan, hanya ada selisih penerimaan sebesar Rp84,8 juta selama setahun,” ujar dr Lies. Artinya, jika dibagi 12 bulan, jumlah selisih penerimaan per bulan hanya sekitar Rp7 juta. Nyaris tak berarti apa-apa dibandingkan dengan total penerimaan rumah sakit yang dia pimpin.

Dia mengakui, selama ini perbedaan tarif di RSUD Wates memang sangat kecil karena yang dibedakan hanyalah biaya akomodasi. Sementara biaya layanan kesehatan seperti visite dokter, laboratorium, dan sebagainya disamaratakan untuk semua kelas. “Pernah ada dokter yang berkeberatan dengan kebijakan ini, tapi akhirnya semua dapat menerima,” ujar Lies.

MENGATASI MASALAH

Kebijakan *universal coverage* sesungguhnya adalah jawaban atas masalah yang mungkin dihadapi oleh hampir semua daerah. Pada saat-saat terjadi kejadian luar biasa seperti demam berdarah (atau penyakit musiman lain), kerap kali rumah sakit kehabisan ruang rawat untuk menampung pasien dari kalangan keluarga miskin. Mereka kerap ditolak rumah sakit karena tak mampu membayar jika harus dirawat di kelas 2, 1, atau VIP.

RSUD Wates pernah mencatat sebuah rekor di mana *bed of rate* (BoR) ruang rawat kelas 3 mencapai 114,5 persen. Angka ini sangat tinggi, tentu saja. Idealnya, BoR sebuah rumah sakit berkisar antara 75 persen hingga 80 persen. Padahal, jumlah ruang rawat di rumah sakit ini sebenarnya cukup besar, yakni 48 persen dari total ruang yang dimilikinya. Menurut data terakhir, RSUD Wates memiliki 150 ruang rawat.

Nah, dengan kebijakan *universal coverage*, pasien Gakin tetap dapat memperoleh perawatan meskipun ruang rawat kelas 3 sedang penuh. Hal ini membuat seluruh pasien Gakin terlayani, dan komplain terhadap rumah sakit dan pemerintah menjadi sangat rendah.

Bagi Kabupaten Kulonprogo, keberpihakan terhadap pasien Gakin ini memang sangat dibutuhkan. Maklum, meskipun dari waktu ke waktu terus menurun, Kulonprogo masih merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang lumayan tinggi. Menurut catatan, angka kemiskinan di Kulon Progo mencapai angka 23,32 persen pada 2012, menurun menjadi 21,39 persen pada 2013, dan 19,02 persen pada 2014.

Di satu sisi, kita harus mengakui keberhasilan Pemkab Kulonprogo dalam menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kulonprogo bisa turun di atas dua persen per tahun. Keberhasilan Kabupaten Kulonprogo dalam menurunkan angka kemiskinan bahkan lebih baik dari angka nasional. Namun, di sisi yang lain, kita juga harus memahami bahwa Kulonprogo masih berhadapan dengan angka kemiskinan yang terbilang tinggi. Kondisi itu membuat pasien Gakin yang dirawat di RSUD Wates juga sangat dominan jumlahnya.

Jauh hari sebelum inovasi *universal coverage* diluncurkan, jumlah pasien Gakin sebenarnya terbilang rendah. Namun, hal itu bukanlah cerminan bahwa pasien Gakin tak membutuhkan perawatan. Yang sebenarnya terjadi adalah, pasien Gakin gagal mendapatkan akses layanan kesehatan di rumah sakit.

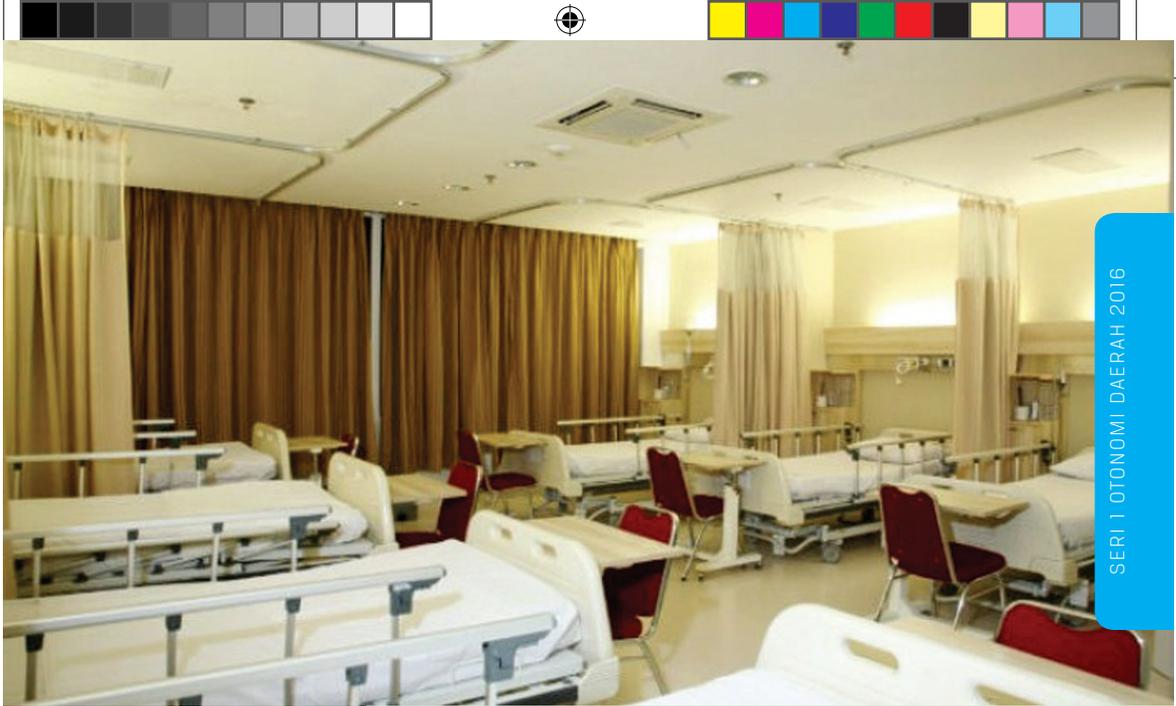
Mari kita simak data yang diberikan oleh dokter Lies Indriyati, dirut RSUD Wates ini. Dia mengatakan, bahwa rasio kunjungan Gakin pada tahun 2011 sebesar 39,60% dari total pasien dan naik menjadi 43,42% di tahun 2012 dan tahun 2013 mencapai 56,35%. “Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan *universal coverage* ini berhasil menaikkan akses layanan rumah sakit bagi pasien Gakin,” ungkap dokter spesialis anak ini.

Bupati Kulonprogo menyadari bahwa kebijakannya ini mungkin saja akan diprotes oleh mereka yang ingin dirawat di kelas 2, kelas 1, ataupun VIP. Namun, dia yakin bahwa pasien yang ingin dirawat di luar kelas 3 itu memiliki banyak alternatif untuk diri mereka.

“Mereka bisa pergi ke rumah sakit swasta ataupun ke rumah sakit lain yang memberikan layanan akomodasi lebih baik,” ujarnya. Sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, RSUD harus mengutamakan pemberian layanan kepada orang kebanyakan yang tak memiliki pilihan alternatif. “Itu makna dari pelaksanaan Nawa Cita bahwa negara harus hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

SARAT INOVASI

Kabupaten Kulonprogo memang pantas dicatat sebagai daerah yang kaya inovasi. Sejak 2012, Pemkab Kulonprogo meluncurkan program Warungmiskin untuk bersaing dengan menjamurnya waralaba modern di pedesaan. Dengan menggandeng Yayasan Damandiri, Pemkab mendirikan Toserba Posdaya yang menyuplai



pasokan barang di warung miskin.

Bupati Kulon Progo juga mendorong warganya untuk membeli produk lokal guna memperkuat perekonomian masyarakat melalui peluncuran slogan Bela Beli Kulonprogo. Jika ingin membela Kulonprogo, belilah produk Kulonprogo. “Slogan itu mengandung pesan bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya bisa lebih mandiri secara ekonomi jika ada *political will*. Bangsa Indonesia ini bisa lebih sejahtera jika ada *political will*,” ujarnya.

“Di Kulon Progo kami bisa lantang bicara bahwa untuk membela Kulon Progo, semua orang harus didorong untuk membeli produk-produk Kulon Progo. Di Indonesia, kita juga bisa bilang Bela Beli Indonesia. Cintailah Indonesia dan belalah kepentingan Indonesia dengan membeli produk Indonesia,” ujarnya.

Berkat slogan itu, perusahaan-perusahaan batik di Kulon Progo yang semula sudah sekarat, bangkit dan berjaya lagi. Cara yang ditempuh Pemkab Kulonprogo adalah dengan mewajibkan pelajar dan PNS di wilayah itu mengenakan seragam batik setiap Kamis.

Petani yang semula susah menjual beras dengan harga bagus juga bisa tersenyum ceria. PNS di Kulonprogo diwajibkan untuk membeli beras yang dipasok oleh sejumlah gabungan kelompok tani (Gapoktan). Tiap PNS wajib membeli minimal 5 kilogram “beras jatah” itu. Tetapi, karena kualitas berasnya bagus dan harganya lebih murah dibanding harga di pasaran, banyak PNS yang membeli lebih dari 5



kilogram beras lokal ini.

Kabupaten Kulonprogo juga menetapkan kebijakan unik dalam menangani masuknya waralaba minimarket. Di Kulonprogo, kehadiran minimarket yang biasanya berpotensi mematikan pasar tradisional tak merugikan perekonomian rakyat secara keseluruhan karena minimarket di Kulon Progo adalah milik koperasi. Selain itu, tiap minimarket juga diwajibkan untuk menyediakan dagangan produk lokal minimal 10 persen dari jumlah item barang dagangannya.

Bukan itu saja. PDAM Kulon Progo yang semula kembang kempis juga bisa berdiri gagah. Dalam konteks slogan Bela Beli Kulonprogo ini, Bupati Kulonprogo memang memerintahkan agar PDAM Kulon Progo memproduksi air minum kemasan yang diberi nama AirKu, singkatan dari Air Kulonprogo. Produksi air dalam kemasan itu mampu membuat uang rakyat Kulonprogo tak perlu mengalir ke luar hanya untuk membeli air. PDAM Kulonprogo yang semula selalu merugi pun belakangan sudah bisa menyetorkan dividen yang bisa memperbesar PAD. ●



KABUPATEN LAMONGAN



KABUPATEN LAMONGAN



H. Fadeli, SH, MM
Bupati Lamongan



Kartika Hidayati
Wakil Bupati Lamongan

VISI:

**Terwujudnya Masyarakat Lamongan
Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika
dan Berdaya Saing.**

MISI:

- Untuk menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi masyarakat Lamongan yang sejahtera, berkeadilan, beretika dan berdaya saing Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusunnya dalam beberapa misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas).
- Kedua, memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktifitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam. Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Dan yang keempat memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal serta kesetaraan gender.

GEMERLAP EKONOMI DI PEDESAAN

BERBAGAI program bantuan pemerintah pada masyarakat kerap salah sasaran sehingga tak sesuai dengan tujuannya. Belajar dari itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menginisiasi Program Gemerlap dengan pendekatan khusus dan intensif.

Musyarofah dan itik nyaris tak bisa dipisahkan. Setiap harinya, dia berinteraksi dengan itik sepanjang hari. Dalam sehari, dia menyambangi ratusan itik ternaknya dua kali untuk memberi pakan. “Pagi dan sore,” katanya.

Tak hanya Musyarofah, puluhan ibu-ibu di Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan itu juga punya aktivitas yang sama dengannya. Bahkan, mereka berhimpun dalam sebuah kelompok peternak itik bernama Sumber Rejeki. “Anggota kelompok ini jumlahnya mencapai 40 orang,” kata Musyarofah.

Tapi, dari puluhan anggota inti kelompok ternak ini memiliki anggota binaan yang jumlahnya tak kurang dari 120 ibu-ibu. Menurut Ketua Kelompok Ternak Sumber Rejeki ini, jumlah peternak itu yang berkelompok. “Di luar itu, dari 856 keluarga yang ada di Desa Tawangrejo sekitar 800an keluarga punya itik. Artinya ya semua warga sini peternak itik,” imbuhnya.

Minat warga Tambakrejo terhadap ternak itik yang begitu tinggi lantaran penghasilan dari ternak ini sangat menguntungkan. Setiap 100 ekor bebek yang dimiliki, bisa memberikan penghasilan hingga Rp1,3 juta setiap bulannya. Sedangkan bibit calon indukan bisa mencapai harga Rp60 ribu per kilogram.

Upaya kelompok ternak Sumber Rejeki membina para peternak ini menuai berbagai penghargaan. Pada tahun 2012, mereka menerima dua penghargaan tingkat nasional sekaligus. Pertama sebagai juara

pertama kelompok peternak itik dalam lomba kelompok peternak dan petugas berprestasi dari Menteri Pertanian. Kedua penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Ketahanan Pangan tahun 2012 kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan dari Presiden.

Berbagai penghargaan yang diterima itu membuat para peternak semakin giat. Kelompok peternakan ini sendiri berawal dari kegiatan ibu-ibu rumah tangga di Desa Tawangrejo pada awal tahun 2008. Kemudian terus berkembang dan semakin membesar hingga saat ini. Apalagi sejak tahun 2009, ada berbagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Program Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Lamongan berbasis Pedesaan (Gemerlap).

Jika Musyarofah dan kawan-kawannya di Desa Tawangrejo setiap hari mengasuh itik, Tawi dan puluhan tetangganya di Desa Wedoro, memilih memelihara lele. Dengan bermodalkan terpal, Tawi dan anggota Kelompok Ternak Fajar Indah Desa Wedoro Kecamatan Sukorame bisa meraup penghasilan tambahan hingga Rp300 ribu setiap kali panen.

Penghasilan itu adalah keuntungan bersih setelah dikurangi ongkos produksi dan untuk pembelian benih lagi. Dengan sumber daya air yang melimpah, berternak lele media terpal menjadi alternatif baginya untuk mencari penghasilan tambahan. “Cukup lumayan, untuk membantu kebutuhan memasak di dapur. Semoga harga jual lele bisa stabil tinggi sehingga kami masih bisa mendapatkan untung,” papar Tawi.

Pendapatan sekitar Rp300 ribu sekali panen itu, menurut Bupati Lamongan Fadel, masih dianggap kecil. Sehingga dia mendorong kelompok itu agar melakukan inovasi lebih sehingga keuntungan yang diperoleh bisa berlipat. Terutama dalam manajemen budidaya dan penggunaan pakan yang lebih ekonomis.

“Jangan hanya mengandalkan pakan buatan pabrik yang tentunya cukup mahal. Bisa dikembangkan pakan organik buatan sendiri yang bukan hanya murah namun bisa meningkatkan produksi ikan lele,” tutur Fadel.

Kepala bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Lamongan Tri Wahyudi, mengatakan terdapat 36 warga di Kecamatan Sukorame yang tergabung dalam 3 kelompok yang



menerima bantuan ikan lele dengan media terpal. Adapun total benih yang diberikan mencapai 86.400 ekor.

“Selain benih, kepada setiap anggota kelompok penerima program Gemerlap ini juga diberikan bantuan 2 set perangkat untuk membuat kolam ikan lele bermedia terpal dan pakan ikan,” katanya.

Tak hanya itu, Wahyudi juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kerap mendorong pembudidaya ikan lele agar membuat manajemen budidaya. Terutama agar menyesuaikan masa budidaya dengan siklus harga di pasar.

“Seperti di bulan-bulan awal tahun, harga ikan cenderung tinggi karena belum banyak ikan yang beredar di pasar. Seperti saat ini, harga ikan lele mencapai Rp15 ribu per kilogram sehingga bisa memberi keuntungan lebih,” imbuhnya.

Selain itik dan lele, potensi desa yang dikembangkan Kabupaten Lamongan lainnya adalah peternakan kambing. Pola peternakan kambing di di Desa Weduni Kecamatan Deket terbilang unik. Yakni

membuat kandang-kandang kambing bertingkat yang diletakkan di tegalan areal tambak.

Di Kawasan Ternak Kambing Terpadu Ramah Lingkungan Kelompok Kapal Mandiri di Dusun Kudu Desa Weduni, anggotanya membuat kandang-kandang kambing di atas tegalan sawah tambak. Dan satu-satunya alat transportasi untuk bisa menuju kesana adalah dengan menggunakan perahu.

Program Gemerlap sendiri tak hanya membantu peternak itik di Tawangrejo, ternak lele di Kecamatan Sukorame, dan ternak kambing di Kecamatan Deket. Program ini juga membantu perekonomian warga lamongan lainnya seperti peternakan kambing di Dusun Kudu, Desa Weduni, Kecamatan Deket. Lalu pengrajin songkok di Desa pengangsalan Kecamatan Kalitengah, dan pengrajin batik di Desa Sendang Agung dan Sendang Dhuwur, kawasan Paciran.

Batik Lamongan merupakan satu unsur penggerak ekonomi Kabupaten Lamongan yang cukup penting. Hingga saat ini, di Lamongan setidaknya terdapat 467 pengrajin batik yang sebagian besar berada di Desa Sendang Dhuwur dan Sendang Agung.

Untuk meningkatkan citra Batik Lamongan, pemerintah kabupaten berencana akan mematenkan motif batik bandeng lele. Menurut Bupati Lamongan Fadeli, motif ini sudah dilombakan sejak 2012 dan terus memunculkan berbagai varian motif yang unik. Dengan dipatenkannya motif bandeng lele, dia berharap motif batik khas Lamongan itu bisa menjadi identitas budaya Lamongan.

Selain berupaya mematenkan motif bandeng lele, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Lamongan selalu menggelar lomba desain motif batik. Dengan lomba seperti ini, kata Fadeli, dapat memberikan motivasi kepada para pembatik. “Hal tersebut terbukti dari meningkatnya jumlah pembatik di Lamongan,” imbuhnya.

MEMBERDAYAKAN POTENSI PEDESAAN

Program Gemerlap yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada dasarnya bertujuan menstimulasi produk-produk unggulan di setiap desa dan kecamatan agar produktivitasnya meningkat. Stimulasi itu berbentuk bantuan permodalan maupun pembinaan teknis secara intensif. Terutama merangsang mentalitas masyarakat agar tidak pantang menyerah dan berjuang hingga

berhasil.

Gemerlap sendiri adalah program andalan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mulai bergulir ketika Sekretaris Kabupaten Yuhronur Efendi masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tahun 2011 silam. “Bergulirnya Gemerlap berawal dari kesadaran kami bahwa Lamongan memiliki potensi lokal dan sumberdaya manusia yang unggul, khususnya di wilayah perdesaan,” kata Yuhronur.

Sementara itu, sambungnya, berbagai program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama ini masih berkuat pada pengentasan kemiskinan. Namun masih terjadi ketimpangan ekonomi antara masyarakat kota dan di perdesaan. “Sehingga Pemkab Lamongan mengeluarkan kebijakan pembangunan yang berfokus pada ekonomi pedesaan.”

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dari pelaksanaan Gemerlap, sambungnya, adalah adanya pendamping di setiap kelompok masyarakat yang menjalankan program. “Dan tentu saja antusiasme masyarakat dalam menjalankan program Gemerlap,” katanya.

Selain itu, Gemerlap menyasar desa-desa yang sudah memiliki potensi untuk dikembangkan. Misalnya peternakan itik, peternakan kambing, pengrajin songkok, batik, dan konveksi. Sehingga mereka menjalankan program yang nyata dan memang merupakan bagian dari kehidupannya selama ini. “Jika peternak itik dibantu sapi, atau pembuat songkok dikasih itik, tentu saja akan terlantar. Karena dunia dan kebutuhannya mereka bukan itu,” sambung Yuhronur.

Dampak dari Gemerlap sendiri saat ini sudah terlihat jelas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pendapatan per kapita warga Lamongan pada 2011 baru Rp11,3 juta per tahun dengan PDRB Rp13,4 triliun. Pada 2013, nilainya naik menjadi Rp15 juta per tahun dengan PDRB Rp17,6 triliun.

“Dan pada akhirnya tingkat kemiskinan warga Lamongan pun menurun signifikan, yakni dari 18,7 persen pada 2011 menjadi 14,5 persen pada 2013,” katanya.

Tak hanya mendorong peningkatan produksi, Gemerlap juga memastikan kelancaran alur ekonomi hulu hingga hilir terkait pemasarannya. Maka pasar-pasar desa pun direhabilitasi untuk

menjadi titik pertemuan para produsen dan konsumen yang dekat dengan lingkungannya. “Bila pasar desa bergairah, berarti pusaran ekonomi desa akan bergerak cepat sehingga semakin mendorong percepatan ekonomi di desa,” papar Yuhronur.

Di Kabupaten Lamongan setidaknya terdapat 118 pasar tradisional, tapi hanya 10 unit yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Otomatis ada sekitar 108 pasar yang menunggu sentuhan manajemen PD Pasar Lamongan untuk meningkatkan potensi perekonomian di pedesaan. Maka, sejak 2011 Pemerintah Kabupaten Lamongan memfasilitasi perbaikan pasar desa sebanyak 97 unit dengan pola hibah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Lamongan Mohammad Nalikan, mengatakan bahwa pada 2015 setidaknya ada 42 unit pasar desa yang dirombak lebih representatif. “Pasar tradisional ini nantinya diharapkan dapat melayani dan memberikan lapangan usaha untuk masyarakat di pedesaan, sekaligus meningkatkan denyut ekonomi kalangan menengah ke bawah,” katanya.

Hal ini tentunya selaras dengan program Gemerlap yang menjangkau berbagai sektor potensi pedesaan di Lamongan. Melalui program ini, Lanjut Nalikan, pemerintah kabupaten bersama dengan segenap unsur masyarakat melakukan kerja sama dalam upaya peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam yang ada. “Sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan daerah setempat,” imbuhnya.

Wujud nyata program Gemerlap dalam sektor ini adalah renovasi Pasar Blimbing di Kecamatan Paciran yang dilakukan PD Pasar dan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) beberapa waktu lalu. Lokasi pasar yang sudah tidak representatif dan kerap dikeluhkan pengunjung, terutama di musih hujan, jadi faktor utama program ini.

Langkah terpadu pengembangan ekonomi pedesaan berbasis masyarakat dari hulu ke hilir ala Lamongan ini pantas menjadi contoh daerah lain. Sehingga dalam membuat program disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi warga. Dan tentunya, pendampingan dari dinas terkait menjadi kunci sukses untuk mengawal program pemberdayaan masyarakat itu. ●



KABUPATEN TULUNGAGUNG



KABUPATEN TULUNGAGUNG



Syahri Mulyo, SE
Bupati Tulungagung



Drs. H. Maryoto Birowo, MM
Wakil Bupati Tulungagung

VISI:

**Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Dalam
Suasana Kerukunan dan Kebersamaan Melalui
Pembangunan DIHATIKU INGANDAYA.**

Misi:

- Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis dihatiku ingandaya dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia;
- Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa guna menjamin pencapaian masyarakat maju dan mandiri yang berkeadilan sosial;
- Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis, yang didukung oleh terpeliharanya ketertiban, ketentraman di masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.

MENCIPTAKAN CIKAL BAKAL *NATIONAL PUBLIC SAFETY CENTRE*

NOMOR telepon (0355) 320119 kini menjadi sebuah angka penting yang kini diingat oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung. Maklum, lewat nomor telepon itu, seluruh warga Kabupaten Tulungagung dapat melaporkan berbagai peristiwa kegawatdaruratan seperti kecelakaan lalu lintas, orang sakit, bencana alam, hingga kebakaran.

“Sistem kegawatdaruratan di Tulungagung ini awalnya akan dinamai dengan Tulungagung Emergency Medical Sistem (TEMS). Namun, kami kemudian memberi nama Public Safety Center (PSC) Tulungagung untuk menyesuaikan dengan Sistem yang ada secara nasional,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Ir. Indra Fauzi, MM.

Indra secara garis besar menjelaskan bahwa PSC disusun dengan satu tubuh dan dua sayap. Yang dimaksud dengan bagian tubuh adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak. Sementara dua sayapnya adalah Kepolisian Resort Tulungagung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Tulungagung.

Indra menambahkan, program layanan keselamatan masyarakat di Tulungagung ini sempat mencuri perhatian Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek. Menkes bahkan menyebut program ini sudah hampir sama dengan layanan “911” di berbagai negara maju di barat. Nila juga menyebut layanan ini sebagai satu-satunya program layanan kedaruratan yang berjalan di Indonesia. Hal itu pula yang kemudian mendorong Menteri Kesehatan melakukan lawatan kerja ke Tulungagung pada pekan kedua Januari tahun ini.

Layanan ini memang terbilang luar biasa. Begitu menerima telepon dari warga masyarakat, operator akan mengaktifkan sistem

komunikasi berbasis web untuk memberitahukan kejadian itu kepada sejumlah instansi terkait. Jika telepon yang masuk berisi informasi tentang orang sakit, yang akan datang tentu hanya mobil ambulans.

Namun, jika peristiwanya adalah kecelakaan lalu lintas, yang diminta datang oleh operator di Pusat Komando PSC adalah ambulans dan polisi ke lokasi kejadian. Sistem yang ada di Pusat Komando PSC sudah menentukan polisi mana dan ambulans mana yang harus meluncur. Intinya, ujar Indra, yang harus datang adalah polisi dan ambulans yang posisinya paling dekat dengan lokasi kejadian.

Lain halnya jika yang terjadi adalah kebakaran. Dalam kegawatdaruratan berupa kebakaran, Pusat Komando PSC akan memberikan informasi kepada BNPD, yang di dalamnya ada unsur petugas pemadam kebakaran dan polisi. Petugas pemadam kebakaran bertugas memadamkan api, sementara polisi menjaga ketertiban lingkungan di sekitar lokasi kejadian. Dalam peristiwa kebakaran pun, ambulans akan dikirimkan untuk mengantisipasi adanya korban manusia.

PSC juga memegang kendali manakala terjadi bencana alam. Untuk kejadian bencana alam, pihak yang dihubungi adalah ambulans, polisi, BNPD, Dinas Perhubungan dan Komando Distrik Militer 0807 Dhirot Sahajaya Tulungagung. Masing-masing lembaga ini tentu punya tugas dan perannya masing-masing.

Dalam kegawatdaruratan seperti ini, ambulans bertugas menangani korban manusia, petugas kepolisian menangani pengamanan dan ketertiban di sekitar wilayah bencana, tentara dan BNPD melakukan tindakan penyelamatan yang diperlukan. Sedangkan DLLAJR bertugas memperlancar jalur transportasi dari dan menuju ke lokasi bencana. Indra menambahkan, semua sistem dan mekanisme koordinasi antarinstansi dan lembaga ini sudah berjalan dengan baik di Tulungagung.

SESUAI KEBUTUHAN

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “Dr. Iskak” Tulungagung, dr. Supriyanto, SpB yang merupakan inisiator dari pengembangan PSC ini menyatakan, sistem penanganan kegawatdaruratan di Tulungagung ini awalnya muncul dari diskusi dengan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. “Pak Bupati bertanya, bagaimana cara



menterjemahkan Nawa Cita ke dalam kehidupan nyata,” kata dokter Pri, panggilan keseharian sang direktur.

Dalam diskusi itu, dokter Pri menyatakan bahwa Nawa Cita pertama menuntut kehadiran negara dalam masyarakat, artinya pemerintah harus hadir pada saat rakyat memerlukan bantuan. Artinya, pada saat terjadi peristiwa kegawatdaruratan, pemerintah harus segera terjun langsung memberikan penanganan. Dokter Pri pun lalu mengajukan konsep penanganan kegawatdaruratan ini dan langsung disetujui oleh Bupati Sahri Mulyo.

Apalagi, konsep ini juga sejalan dengan visi dan misi Sahri, yakni mewujudkan Tulungagung yang *Ayem Tentrem, Mulyo, lan Tinoto*. “Nawa Cita pertama menuntut kehadiran negara dalam masyarakat, sementara *ayem tentrem* kami terjemahkan sebagai usaha untuk meminimalisir kekhawatiran di kalangan masyarakat,” ujar dokter Pri.

Setelah melalui serangkaian diskusi, pemikiran ini kemudian dibawa ke rapat yang dihadiri para kepala dinas. Setelah dilakukan penajaman-penajaman dan penyempurnaan, konsep TEMS pun akhirnya dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati Tulungagung yang dikeluarkan pada akhir 2015.

Meski usianya masih sangat muda, layanan ini langsung

KABUPATEN TULUNGAGUNG

mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hartini Masruroh, warga Kecamatan Kauman Tulungagung bertutur tentang betapa cepatnya respons dari layanan ini. Dia berkisah bahwa akhir Februari lalu, dia berjalan-jalan bersama keluarganya ke Pantai Popoh. Sesampai di daerah Campurdarat, sekitar 15 kilometer dari pusat kota Tulungagung, dia melihat kecelakaan tunggal. Seorang pengendara sepeda motor jatuh.

Dia pun kemudian menelepon ke nomor 0355 320119 melalui telepon genggamnya. Tak sampai 10 menit, sebuah ambulans sudah datang ke tempat kejadian. Setelah itu, dia tak tahu bagaimana sang korban ditangani karena dia memilih untuk melanjutkan perjalanan.

Menanggapi cerita ini, dokter Pri menjelaskan bahwa sistem yang ada di Pusat Komando yang berada di RSUD Dokter Iskak memang langsung memerintahkan ambulans yang sedang berada di lokasi terdekat untuk meluncur ke tempat kejadian. Hal ini bisa dengan mudah dilakukan karena seluruh ambulans milik RSUD Dr. Iskak Tulungagung sudah dilengkapi dengan fitur GPS sehingga operator dapat mengetahui posisi ambulans itu sedang berada.

Dokter Pri menambahkan, dengan menganalisa informasi



telepon yang masuk ke Pusat Komando PEC, operator bahkan dapat menunjuk jenis ambulans yang dikirim ke lokasi agar sesuai dengan kondisi pasien. Jika pasien memerlukan tindakan medis berat, maka yang dikirim adalah ambulans kelas advance, yakni ambulans yang dilengkapi dengan fasilitas alat kejut jantung, alat bantu pernafasan, dan di dalamnya ada pula seorang dokter yang bertugas. Ambulans jenis advance ini, kata dokter Pri, lumayan canggih hingga tindakan operasi pun bisa dilakukan di dalamnya.

Sementara jika kasusnya tak terlalu serius, yang dikirim adalah ambulans biasa yang membawa perawat dan sejumlah alat bantu medis. Meski hanya didukung oleh tenaga perawat, pasien yang ditangani dengan ambulans biasa ini tetap dapat memperoleh tindakan yang cepat. Pasalnya, dalam sistem yang dikembangkan di Tulungagung ini, perawat diwajibkan untuk mengirimkan foto pasien ke data center melalui alat komunikasi berbasis web.

Dengan melihat gambar yang dikirimkan perawat di dalam ambulans itu, dokter jaga yang ada di pusat layanan dapat memberikan petunjuk penanganan yang diperlukan seperti pemberian infus atau suntikan obat yang sesuai dengan kondisi pasien. Dokter jaga di pusat komando juga bisa memerintahkan kepada ambulans agar pasien dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih dekat seperti Puskesmas jika kondisi pasien dianggap tak membahayakan.

TERINTEGRASI DENGAN UGD MODERN

Sebagai sebuah layanan kegawatdaruratan, PSC sebenarnya tak berdiri sendiri. PSC juga terintegrasi dengan layanan di unit gawat darurat (UGD) yang dimiliki RSUD dr. Iskak. Layanan di UGD milik RSUD Tulungagung dibagi ke dalam tiga bagian, yakni *green zone* untuk pasien tanpa kegawatdaruratan, *yellow zone* untuk pasien dengan kegawatan tingkat sedang dan *red zone*.

Menurut dokter Pri, pasien yang masuk di *green zone* akan mendapatkan pelayanan selambat-lambatnya 30 menit setelah kedatangannya. Yang masuk ke *yellow zone* akan mendapatkan pelayanan selambat-lambatnya 15 menit setelah kedatangan, dan yang masuk ke *red zone* harus dilayani 0 menit setelah kedatangan.

Bagaimana pemisahan pasien dilakukan? Pertama, tentu berdasarkan informasi dari pusat informasi PSC. Yang kedua,

dilakukan melalui pos triase yang ada di pintu masuk UGD. Begitu datang, pasien akan diterima di triase pertama yang dijaga sejumlah perawat senior. Perawat ini akan memutuskan ke zona mana pasien akan dikirimkan. Penentuan dilakukan dengan melihat kondisi fisik sang pasien. Pasien dengan keparahan tinggi langsung dikirim ke *red zone*, yang sedang dimasukkan ke *yellow zone*, dan yang ringan diarahkan masuk ke *green zone*.

Namun, keputusan perawat di triase pertama itu bisa saja diubah oleh perawat yang berjaga di triase kedua. Dengan melihat kondisi pasien, perawat di triase kedua dapat memutuskan untuk menaikkan status pasien dari *green ke yellow* atau dari *yellow ke red* jika kondisi pasien yang bersangkutan memburuk.

Dokter Pri menambahkan, rumah sakit yang dipimpinnya menerapkan aturan khusus tentang UGD. Di banyak rumah sakit, pasien UGD umumnya dilayani oleh dokter-dokter yang baru lulus. Sementara di RSUD Dokter Iskak, dokter yang bertugas di UGD adalah dokter spesialis kegawatdaruratan dan dokter-dokter senior.

UGD di rumah sakit ini juga dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus untuk penderita gangguan kejiwaan dan penderita asma. Tembok di ruangan khusus penderita gangguan jiwa dilapisi dengan busa empuk sehingga tak membahayakan jika pasien membenturkan diri ke tembok. Ruangan juga dibuat tertutup agar pasien gangguan jiwa tak mengganggu pasien lain.

Lain halnya dengan fasilitas yang ada di ruang khusus penderita asma. Ruangan ini dilengkapi dengan alat bantu pernafasan dan kursi tempat pasien duduk. Menurut dokter Pri, pasien asma sebaiknya memang tidak berbaring saat mengalami serangan. Dokter Pri menambahkan, kecepatan dalam penanganan kegawatdaruratan ini memiliki peranan yang besar untuk mengurangi tingkat kematian dan kecacatan yang timbul dari kasus kegawatdaruratan.

Tak heran jika Menteri Kesehatan pun menyebut PSC yang diterapkan di Tulungagung ini pantas dijadikan sebagai model dalam pembentukan PSC tingkat nasional. ●



KABUPATEN NGANJUK



KABUPATEN NGANJUK



Drs. H. Taufiqurrahman
Bupati Nganjuk



KH. Abdul Wahid Badrus, MPdI
Wakil Bupati Nganjuk

VISI:

**Terwujudnya Kejayaan Masyarakat
Kabupaten Nganjuk yang Maju, Adil, Sejahtera,
Tenteram, dan Demokratis Berlandaskan Moral Agama.**

MISI:

- Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.
- Meningkatkan pelayanan prima melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung oleh profesionalisme aparatur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DENGAN SILOKDES

KIAN hari, tuntutan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa semakin membesar. Maklum, Pemerintah Desa kini menguasai uang dalam jumlah besar, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Di sisi lain, penguasaan aparat desa terhadap penatalaksanaan keuangan desa masih jauh dari harapan.

Bukan mengada-ada. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mencatat bahwa pada 2013, ada 83 persen desa di wilayahnya yang tak melakukan penatalaksanaan keuangan desa dengan baik. Beruntunglah pada 2013, sebuah embrio solusi berhasil ditemukan. Solusi itu adalah sebuah sistem akuntansi berbasis computer yang diberi nama Silokdes (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa).

Adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nganjuk, Drs Gunawan Widagdo MSi bersama tim yang merintis kelahiran sistem ini. Kehadiran Silokdes kemudian diberi payung hukum berupa Peraturan Bupati. “Sebenarnya sudah ada Perda mengenai Silokdes ini. Tetapi sekarang masih sedang dipelajari di Pemprov,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Masduqi.

Menurut Gunawan, cara kerja Silokdes ini sangat sederhana, namun efektif untuk menatalaksanakan keuangan desa. Sistem ini bahkan juga sangat mudah dioperasikan. Di hampir semua desa, Silokdes dioperasikan oleh perangkat desa yang sebagian besar hanya berpendidikan SMP atau sederajat.

Hal itu dibenarkan oleh Gudianto (Bayan Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor) dan Tasirin (Kasie Pemerintahan Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang). Dua orang operator Silokdes ini menuturkan

KABUPATEN NGANJUK

bahwa *software* yang disediakan ini sangat sederhana. “Cukup sekali memasukkan angka, catatan di beberapa buku akan terisi dengan sendirinya,” kata Tasirin.

Pengoperasian Silokdes, menurut Gunawan, tak menuntut adanya sambungan internet. Datanya bisa dimasukkan secara *off line* dan setiap bulan hasil catatannya dikonsolidasikan dengan sistem yang ada di kabupaten.

Meski demikian, sistem yang mulai dioperasikan pada akhir 2014 ini sudah terbukti andal. Menurut Gunawan, 100 persen desa di Kabupaten Nganjuk mampu melaksanakan penatalaksanaan keuangan dengan baik semester pertama 2015. Sementara, untuk penatalaksanaan keuangan semester kedua 2015, sebagian besar desa sudah melaksanakan dan tinggal mengkonsolidasikan dengan sistem yang ada di kabupaten.

Gunawan menceritakan, pembangunan Silokdes ini terbilang murah. Untuk penyediaan *software*, Kabupaten Nganjuk hanya perlu



mengeluarkan dana sebesar Rp75 juta. Sementara, untuk kegiatan pelatihan bagi para operator dan kepala desa, hanya butuh dana Rp125 juta.

Gunawan juga yakin bahwa Silokdes akan menjamin akuntabilitas dan transparansi anggaran di tingkat desa. Apalagi, kata Sekda Masduqi, para kepala desa juga diwajibkan untuk mencetak baliho besar untuk menggambarkan penggunaan anggaran di desanya masing-masing. “Jadi, semua rakyat tahu berapa duit yang ada dan dipakai apa saja,” tambah Masduqi.

MENUJU TERTIB ADMINISTRASI

Sebenarnya, tujuan dari penerapan Silokdes ini jauh lebih luas dari sekadar mengajari aparat desa untuk menangani keuangan desa. Silokdes pada akhirnya juga akan meningkatkan efektivitas pendapatan daerah dengan memadukan sumber-sumber pendapatan desa dari Alokasi Anggaran Desa (AAD), BHPRD, BK menjadi satu kesatuan sumber pendapatan yang pengelolaannya terpadu untuk pembiayaan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diinformasikan kepada desa setelah ditetapkan KUA-PPA. Dengan demikian, desa akan mampu mengelola anggaran mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban dengan tepat waktu dan benar.

Di sisi perencanaan, pemerintahan desa dituntut untuk melibatkan partisipasi warga. Pemerintah desa melibatkan secara aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, RT/RW, Kelompok pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), Kader posyandu, Guru, Bidan, Kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya dalam setiap perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintahan desa juga menginformasikan di tempat-tempat terbuka tentang pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat melalui spanduk/banner.

Silokdes juga akan menambah daya dukung terhadap program pemerintah. Kemampuan desa untuk merencanakan anggaran dalam bentuk program kegiatan akan mendukung capaian program pemerintah desa dan daerah.

Dalam jangka panjang, penerapan Silokdes juga akan membuat

desa mampu mengelola sumber pendapatan dalam bentuk program kegiatan ekonomi produktif untuk menambah pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Silokdes pada 2015 nyatanya juga sudah memberikan hasil positif. Keberhasilan pertama ditunjukkan dengan tersusunnya Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2015 dengan baik dan cepat. Berdasarkan catatan, 264 desa yang ada di Kabupaten Nganjuk mampu menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) 2015 tepat waktu.

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 2015 telah sesuai Permendagri 113/2014, 114/2014, Permendes 1/2015, dan Permendes 5/2015. Bahkan, proses penyusunan APB Desa 2015 telah melalui mekanisme evaluasi oleh Tim Evaluasi APB Desa.

Selain itu, Silokdes juga berhasil mendorong tersusunnya penatausahaan keuangan desa dengan cepat dan tepat. Hal itu dibuktikan dengan selesainya laporan penatausahaan keuangan bulanan (Januari – Juli 2015) sebelum tenggat waktu berakhir. Begitu pula halnya dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2015 Semester Pertama dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 2015 Semester I.

Hal itu pada ujungnya juga mempercepat proses penyerapan anggaran karena Pemkab dapat menyalurkan dana kepada desa secara cepat dan tepat.

Bagi Pemkab, ketersediaan laporan yang baik itu sangat penting untuk bahan monitoring dan penyusunan kebijakan. Semua bisa diakses dengan mudah lewat data yang tertata dengan baik. Untuk melihat data tren penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), BK, BHPRD, PAD, baik untuk program fisik maupun non fisik bisa dilakukan melalui Server Silokdes.

Begitu pun dengan data realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa, peng-SPJ-an keuangan. Yang tak kalah penting, Pemkab bisa melakukan deteksi dini jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada suatu desa dan kemudian melakukan tindakan pencegahan dan pembinaan.

Jika semua target dan tujuan itu sudah dapat dicapai, ke depan semua dana yang akan dikelola desa baik yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi



Dae (BHPRD), Bantuan Kewilayahan (BK) dapat dicairkan secara cepat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

PERLU PENINGKATAN

Meski sudah menunjukkan hasil yang bagus, Silokdes yang dikembangkan di Kabupaten Nganjuk ini masih memerlukan penyempurnaan. Setidaknya, sampai hari ini, Silokdes masih belum terhubung melalui jaringan internet. Salah satu pertimbangannya, kata Kepala Bapemaspemdes Nganjuk Gunawan Widagdo, adalah keterbatasan sumber dana. “Butuh biaya yang cukup besar. Karena itu tahun ini belum online sistemnya,” ujarnya.

Selain masalah anggaran, kesiapan sejumlah desa, terutama yang berada di lokasi pinggiran juga menjadi pertimbangan. Apalagi, banyak hal yang harus disiapkan sampai akhirnya sistem online ini bisa diterapkan di 264 desa se-Kabupaten Nganjuk. “Terutama jaringannya, apakah bisa menjangkau desa-desa itu atau belum, kan semua harus disiapkan,” lanjutnya.

Karena itu, penerapan Silokdes pada tahun ini masih akan menggunakan sistem offline seperti tahun lalu. Artinya, petugas silokdes di masing-masing desa akan memasukkan data di



komputernya masing-masing. Data yang sudah tersimpan di peranti penyimpanan ini kemudian dikirimkan ke Bapemaspemdes dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DP2KAD) sebagai bentuk pelaporan anggaran. “Jadi tetap pakai software silokdes untuk pelaporan,” terangnya.

Namun, meski masih tetap offline, penerapan Silokdes akan tetap dilanjutkan. Apalagi, aparat desa pada saat ini sudah lancar menggunakan software pelaporan ini. “Tidak ada masalah dengan sistem dan aplikasinya,” ujar mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Nganjuk ini.

Tahun ini Kabupaten Nganjuk kembali mendapat kucuran dana desa yang bersumber dari APBN. Alokasinya bahkan bertambah lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2015 lalu. Tahun ini, Nganjuk bakal mendapat kucuran Rp 168,8 miliar. Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya akan dibagi merata untuk 264 desa, dengan jatah alokasi masing-masing desa Rp 565,6 juta. Sementara sebanyak 10 persen atau sebesar Rp 19,5 miliar dibagikan sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Dana itu akan dicairkan secara bertahap kepada masing-masing desa dengan komposisi 40:40:20. Artinya, untuk tahap I dan II akan dicairkan masing-masing 40 persen. Sedangkan tahap III akan dicairkan 20 persen. Pencairan tahap I akan dilaksanakan April nanti. ●



KABUPATEN PASAMAN



KABUPATEN PASAMAN



H. Yusuf Lubis, SH MS.i
Bupati Pasaman



Atos Pratama
Wakil Bupati Pasaman

VISI:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman
yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya**

MISI:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.
- Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatkan kualitas keimanan dan pengalaman ajaran agama.
- Melestarikan nilai-nilai budaya daerah.

MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BAGI warga Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Jembatan gantung sepanjang 45 meter yang melintasi Sungai Sungai Situmpu ini memiliki makna sangat penting. Saban hari, jembatan gantung selebar 2,5 meter yang lantainya terbuat dari lempengan baja itu selalu ramai dilalui orang, sepeda motor, ataupun becak motor yang mengangkut karet, kakao, padi, ataupun pupuk.

Keberadaan jembatan ini membuat akses warga --yang sebagian



KABUPATEN PASAMAN

besar adalah petani dan pekebun, dari perkampungan ke ladang, sawah, dan kebun mereka menjadi lebih mudah. Hasil panen atau pupuk tak perlu dipikul, tapi bisa diangkut dengan kendaraan.

Jembatan gantung ini adalah salah satu hasil nyata dari pelaksanaan program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pasaman sejak 2012 lalu. “Program ini berintikan pada partisipasi warga masyarakat yang dikoordinasikan oleh tokoh dan aparat di tingkat nagari,” ujar Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama. Sekadar dicatat, Nagari adalah sebutan untuk satuan pemerintahan terkecil di berbagai daerah di Sumatera Barat.

Proyek-proyek yang dilaksanakan dalam program P2BN ini direncanakan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat warga nagari. “Tapi ini berbeda dengan padat karya,” tukas Sekda Pasaman, A. Syafei. Inti dari padat karya adalah memberikan penghasilan kepada warga yang ikut bekerja. Sementara dalam P2BN masyarakat justru memberikan sumbangan. Atau, jika dibayar pun, upah yang diberikan tak sebesar tarif yang berlaku di pasaran.

Bukan hanya tenaga yang disumbangkan oleh warga. Dalam



pembangunan jalan-jalan yang dikerjakan melalui proyek P2BN, seluruh tanahnya berasal dari sumbangan warga masyarakat. Tak perlu dibeli, juga tak diberi ganti rugi. Bahkan, tak jarang, masyarakat yang mengerjakan proyek-proyek P2BN ini juga tak minta bayaran. Inilah yang membuat pembangunan yang dilakukan lewat program ini menjadi sangat murah.

Penggantian pelat baja di jembatan gantung Jambak itu, misalnya, hanya makan biaya Rp90 juta. Lantas, pengecoran jalan sepanjang 3.000 meter di Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah hanya makan biaya Rp150 juta. Padahal, jalan itu lumayan lebar. Dua kendaraan roda empat bisa bersimpangan dengan leluasa di jalan yang baru dibangun itu.

Sekda Pasaman menambahkan, keunggulan dari program P2BN ini tak hanya terletak pada harga proyek yang lebih murah. Keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada akhirnya juga melahirkan perasaan memiliki di kalangan masyarakat.

Rasa memiliki itu membuat masyarakat tak segan ikut melakukan pemeliharaan proyek-proyek yang mereka bangun itu agar lebih awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. “Apalagi proyek-proyek yang dilaksanakan lewat kegiatan P2BM ini berasal dari usulan warga dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” ujar sang Sekda.

Pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan kawasan perkampungan dengan kawasan ladang dan sawah, misalnya, meringankan pekerjaan warga. Sebelum adanya jalan, warga harus memikul hasil panen dari ladang atau sawah milik mereka yang jaraknya bisa berkilo-kilo jauhnya. Dengan kehadiran jalan-jalan baru ini, hasil panen bisa diangkut dengan aneka rupa kendaraan sehingga tak menghabiskan tenaga.

Tak pelak, P2BN adalah salah satu bentuk inovasi yang menghasilkan efisiensi penggunaan dana. Program ini juga didukung oleh masyarakat hingga dapat berjalan mulus dan berkelanjutan. Pada 2011 dan 2012, saat diujicobakan, Pemkab Pasaman hanya mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk program ini. Namun, pada 2013, dana yang dikucurkan dinaikkan menjadi Rp10 miliar dan naik lagi menjadi Rp15 miliar (2014) dan Rp20 miliar (2015). Pada tahun ini, dana yang disiapkan dinaikkan lagi menjadi Rp30 miliar.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Puji Radial,

jumlah dana P2BN untuk tahun anggaran 2016 dan akan segera disalurkan kepada Nagari setelah proses verifikasi atas rencana penggunaan dana selesai. Puji menambahkan, Pemkab dan DPRD Pasaman telah sepakat menambah jumlah dana P2BN karena manfaat dana ini memang sangat dirasakan oleh warga. “Kegiatan P2BN tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi, namun juga berdampak pula pada pengurangan angka pengangguran di Pasaman,” ujarnya.

Dengan P2BN ini, jumlah lahan tidur di Kabupaten Pasaman secara drastis mengalami penurunan. Warga yang dulunya enggan membuka lahan tidur karena tidak adanya infrastruktur jalan kini mulai menanami kebun mereka dengan aneka ragam tanaman. Menurut Puji, pengucuran dana P2BN memang diniatkan untuk mendukung produktivitas perekonomian daerah. Nagari menggunakan dana ini untuk pembukaan jalan usaha tani, jalan perkebunan, jaringan irigasi, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya.

Tokoh masyarakat Nagari Jambak, Dt Rangkayo Basa (52), juga mengakui bahwa kehadiran proyek-proyek P2BN yang diluncurkan oleh Pemkab Pasaman nyata-nyata berdampak positif dalam mengangkat perekonomian masyarakat. Meski tak memberikan data dan angka, Rangkayo Basa menyatakan bahwa semenjak dimulainya pembangunan berbasis masyarakat ini, cukup banyak warga yang membuka areal pertanian dan perkebunan baru.

MEKANISME

Penyaluran dana B2PN sejatinya selalu berangkat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Nagari (istilah yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat untuk menyebut lembaga pemerintahan tingkat terendah di wilayahnya). Yang membedakan dengan dana pembangunan infrastruktur lainnya adalah proses pengerjaannya. Proyek-proyek non-P2BN dikerjakan dengan mekanisme mekanisme tender. Sedangkan proyek P2BN dilakukan oleh masyarakat melalui Kelompok Pelaksana Kegiatan. Biasanya, kelompok pelaksana kegiatan itu terdiri dari warga masyarakat satu Jorong (bagian dari Nagari) dan memiliki kepentingan dengan infrastruktur yang akan dibangun itu.

Memang, pembangunan yang dilakukan melalui P2BN selalu mengedepankan prinsip demokratisasi dan partisipasi. Hal ini sejalan



dengan nilai kearifan lokal, yang mengharuskan pemerintahan Nagari untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Musyawah Nagari dan Lembaga Nagari lainnya. Sementara prinsip partisipasi diwujudkan dengan memberikan peran kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.

Sekda Pasaman mengakui, bahwa P2BN adalah sebuah terobosan yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi digunakan untuk menerapkan cara pandang baru dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berbasis pada masyarakat.

Pemkab Pasaman menilai, desentralisasi bukanlah sekadar pembagian kekuasaan, kewenangan dan keuangan dari pusat ke daerah atau dari pemerintah daerah kepada Pemerintahan Nagari. Desentralisasi mempunyai banyak tujuan yang antara lain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong

demokrasi lokal, menghargai keragaman lokal, mendekatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat, serta membangkitkan potensi dan prakarsa masyarakat lokal.

Berbagai hal itulah yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 tahun 2012 tentang P2BN. Dengan adanya Perda ini, peran masing-masing pihak menjadi lebih jelas. Dalam Perda ini, secara tegas dinyatakan bahwa untuk mewujudkan akselerasi peningkatan pembangunan di Nagari, perlu diberikan bantuan kepada Pemerintahan nagari dalam bentuk Alokasi Dana Khusus Nagari dengan kriteria tertentu yang perencanaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Masyarakat.

Dengan kata lain, P2BN sejatinya adalah sebuah proses pembangunan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat guna mempercepat pembangunan di Nagari. Program ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Nagari, dengan mendorong kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, P2BN dilakukan dengan mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat, melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal, mengembangkan kapasitas Pemerintah Nagari dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat, menjalin kerjasama antara Pemerintah Nagari dengan Masyarakat dan kerjasama antar-Nagari, serta Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemkab Pasaman menekankan agar P2BN mengedepankan prinsip desentralisasi dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. Proyek-proyek P2BN juga harus berorientasi pada masyarakat miskin.

Yang tak kalah pentingnya, prinsip transparansi dan akuntabel juga harus diterapkan dalam penyelenggaraan proyek-proyek P2BN ini. Masyarakat harus memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. Pelaksanaan proyek-proyek P2BN juga mesti memperhitungkan aspek keberlanjutan. ●



KABUPATEN PINRANG



KABUPATEN PINRANG



H. A. Aslam Patonangi, SH, M.Si
Bupati Pinrang



Muh. Darwis Bastama
Wakil Bupati Pinrang

VISI:

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agropolitan secara Optimal dan Efisien dengan Penggunaan Teknologi Tepat Guna

MISI:

- Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang profesional
- Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustri
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal
- Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
- Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila, dan budaya lokal
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum

MOBIL LABORATORIUM PERTANIAN TERPADU DAN ASURANSI PERTANIAN DARI PINRANG

PERTENGAHAN Desember 2015 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Pinrang Sulawesi Selatan, meluncurkan mobil laboratorium klinik pertanian. Mobil laboratorium pertanian keliling ini dihadirkan sebagai solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, terutama saat terjadi serangan hama.

“Permasalahan yang dihadapi petani akan tertangani dengan cepat, karena mobil itu merupakan laboratorium,” kata Elvi Martina dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K). Jika terjadi serangan hama, misalnya, akan lebih mudah diketahui karena di dalam mobil ini terdapat mikroskop digital untuk memeriksa jenis hama yang menyerang tanaman maupun ikan.

“Petani bisa segera tahu jenis hama yang menyerang dan langsung bisa ditangani di tempat,” ujarnya. Mobil klinik tersebut akan keliling melayani petani, bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan dan pengamat hama.

Bupati Pinrang Aslam Patonangi mengaku bangga bisa mempersembahkan mobil klinik pertanian keliling ini kepada masyarakatnya. Maklum, di seantero Indonesia, baru Kabupaten Pinrang yang memilikinya dan mengoperasikan mobil laboratorium semacam ini. “Harapan saya, mobil klinik ini dapat membantu para petani dapat terlayani dengan cepat, sehingga produksi pertanian dapat lebih meningkat,” ujarnya.

Mobil yang dilengkapi peralatan laboratorium untuk pertanian,

perikanan, dan kehutanan ini berfungsi sebagai laboratorium terpadu. Sejak diluncurkan, mobil klinik ini terus berkeliling ke 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang untuk membantu petani maupun kelompok petani dalam menghadapi masalah seperti hama.

Melalui penggunaan mikroskop digital yang ada di dalam mobil klinik, akan dapat diketahui secara persis jenis hama apa yang sedang dihadapi para petani. “Lewat mobil klinik ini, kami bisa membantu petani menangani masalah hama dengan tepat dan cepat,” kata Dr. Elvi.

Petugas yang dilibatkan dalam operasional mobil klinik tidak hanya dari dinas pertanian dan peternakan, dinas perikanan, dan dinas kehutanan saja, melainkan juga pengamat hama. Mereka inilah yang membantu petani mengenali jenis hama dan bagaimana penanganannya. Termasuk pula berapa dosis yang tepat dalam penggunaan pupuk di hamparan sawah mereka.

Kepala Dinas Pertanian Pinrang, Ir Yohannes Sampebua. Ia menegaskan, dengan adanya mobil klinik pertanian ini, para petani dapat terlayani dengan cepat. Yohannes menambahkan, Bupati Aslam Patonangi memang memiliki perhatian sangat besar untuk mendorong keberhasilan sektor pertanian di wilayahnya. Aslam tak henti meluncurkan inovasi untuk mendorong keberhasilan sektor pertanian ini.

Menurut Yohannes, Bupati Aslam tak hanya punya perhatian besar pada keberhasilan sektor pertanian. Pada saat yang sama, bupati juga berusaha keras agar para petani di wilayahnya mampu hidup makmur dan berkecukupan. Dalam berbagai kesempatan, sang bupati bahkan kerap menyatakan bahwa para petani di Pinrang harus menjadi orang-orang kaya. Pemerintah Kabupaten menyadari bahwa orang tak boleh bermimpi sektor pertanian akan maju jika para petaninya tetap miskin.

Lantaran itu, selain mendorong perkembangan sektor pertanian, Bupati Aslam juga memperkenalkan asuransi areal pertanian. Artinya, jika pada saat tertentu tanaman padi di suatu areal mengalami kerusakan, misalnya akibat terendam banjir dan berbuntut kerugian materil terhadap para petani, maka para petani mendapat pembayaran uang dari pihak asuransi.

Asuransi pertanian ini wajib diikuti pemilik sawah yang lokasinya



rawan bencana. Sedikitnya, hingga sekarang ini, areal persawahan di Pinrang yang sudah diasuransikan sekitar dua ribu hektare. “Premi asuransi per hektarenya sebesar Rp36 ribu per musim tanam,” jelas Yohannes. Sebenarnya, premi yang dibayarkan bukan sebesar itu. Pemerintah Kabupaten Pinrang memberikan subsidi premi sebesar Rp 144 ribu.

Manfaat pengasuransian areal sawah ini lumayan besar. Asuransi memang tak memberikan klaim sebesar potensi keuntungan yang bisa didapat jika tanaman tak gagal. Untuk setiap hektare lahan sawah yang gagal panen, asuransi akan membayarkan klaim sebesar Rp6 juta. Tak sebesar keuntungan jika sawah itu bisa dipanen normal, tapi setidaknya uang itu bisa digunakan untuk membiayai pembukaan sawah menjelang musim tanam berikutnya.

Melihat pembangunan sektor pertanian Kabupaten Pinrang secara menyeluruh, nyata sekali manfaat dari *best practice* yang dilakukan Pemkab Pinrang ini. Manfaat besar juga bisa dilihat dari upaya Bupati Aslam Patonangi yang baru-baru ini membeli dua alat berat atau *becko* baru untuk perbaikan saluran-saluran air sehingga persawahan terhindar dari persoalan banjir.

Tak hanya itu, beberapa waktu sebelumnya, sebagai upaya memaksimalkan kinerja pemerintahan untuk mengatasi permasalahan

yang dihadapi para petani, seperti masalah kekurangan air akibat kemarau, Aslam Patonangi dan sejumlah pejabat di bawahnya, yakni wakil bupati dan Sekda, berkantor langsung di kecamatan-kecamatan. Kala itu, Bupati Pinrang bertugas di Kecamatan Mattiro Bulu dan Suppa, Sekda Pinrang di Kecamatan Lanrisang, dan Wakil Bupati di Kecamatan Cempa dan Mattiro Sompe.

Dengan berkantor di kecamatan, mereka dapat secara cepat meninjau lokasi sawah petani yang kekurangan air dan langsung mengusahakan air untuk menggenangi sawah tersebut. Aslam Patonangi juga menginstruksikan setiap kelompok petani menggelar doa bersama meminta turun hujan. "Selain berharap hujan turun, doa itu juga untuk memperkuat batin mereka," kata Aslam di kantornya.

Berkat berbagai upaya yang dilakukan itu, Pinrang berhasil meningkatkan produksi padinya. Pertanian di Pinrang tidak mengalami puso atau lahan rusak dan padi gagal berbuah. Sebaliknya, setiap hektare lahan terbukti mampu menghasilkan 7 ton padi. Lantaran ini, tak berlebihan, ketika upacara peringatan HUT Pinrang ke 56 yang digelar di halaman Kantor Bupati Pinrang, pada Jumat (19/2) silam, Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya mengatakan, meningkatnya sektor pertanian di Pinrang telah menunjang munculnya orang-orang kaya baru (OKB) di Pinrang.

Syahrul Yasin Limpo memaparkan, pendapatan per kapita masyarakat Pinrang sekarang ini mencapai Rp30 juta. Padahal, lima tahun lalu, hanya sekitar Rp10 juta. Lantaran ini pula, ia pun mengungkapkan rencananya untuk menjadikan pertanian di Sulsel menjadi pertanian teknis dengan menggunakan mesin dan teknologi modern. "Ini akan jadi uji coba pertama di Indonesia," tuturnya seraya menambahkan, rencana itu akan menjadi peluang investasi pengembangan sektor pertanian daerah ke industri pertanian modern, berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

Pernyataan Gubernur Sulsel bahwa sektor pertanian di Pinrang banyak memunculkan orang kaya baru diamini dan ditanggapi Aslam Patonangi dengan wajah yang sumringah. Lantas, ia pun mengungkapkan, bahwa pertumbuhan ekonomi di Pinrang memang cukup tinggi, mencapai 8,11 persen dan PDRB lebih dari Rp11 triliun. Meski begitu, dia mengakui semua itu akibat dari sinergitas dan



kolaborasi yang baik dari seluruh *stakeholder*.

Berbagai inisiatif dan kreatifitas Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melahirkan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat, khususnya para petani dengan menghadirkan mobil klinik pertanian, patut dicungi jempol. Hal itu menunjukkan konsistensi dan eksistensi Pemkab Pinrang sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung pangan nasional.

Patut diketahui, sejak awal era pemerintahan Orde Baru, tepatnya sejak pada Pelita I digulirkan, Kabupaten Pinrang sudah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Kala itu, di Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan program Lappoise. Hingga sekarang ini, posisi Kabupaten Pinrang sebagai lumbung pangan nasional ini tidak berubah.

Bahkan, berdasarkan pokok visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang 2014-2019, posisi sebagai lumbung pangan nasional semakin diperkuat. Di mana di dalam visi ditegaskan “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional”. Rumusan visi ini memiliki relevansi signifikan dengan



visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang, khususnya dalam penekanan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pencapaian produksi pangan.

Peran poros utama pemenuhan pangan nasional Kabupaten Pinrang selama ini telah nyata berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam pemenuhan pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Secara langsung, Pinrang telah menyumbang peningkatan produktivitas pertanian terutama komoditas beras. Bahkan, dalam 5 (Lima) tahun terakhir, peningkatannya mencapai 143,724 ton. Rinciannya, tahun 2013 mencapai 604.975 ton, 2014 mencapai 605,317 ton, dan 2015 mencapai 663,394 ton. Keberhasilan sektor pertanian ini tidak terlepas juga dari berbagai dukungan sistem irigasi yang baik, Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang proaktif, dan teknologi pola pengairan. ●



KABUPATEN SIDOARJO



KABUPATEN SIDOARJO



H. Saifullah, SH. M. Hum.
Bupati Sidoarjo



H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH.
Wakil Bupati Sidoarjo

VISI:

Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan

MISI:

- Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan itu ditempuh melalui beberapa misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo. Hal itu dijabarkan dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi. Lalu memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri.
- **Pertama**, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. **Kedua**, menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. **Ketiga**, meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- Lalu **keempat**, mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender. **Kelima**, meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima. **Keenam**, mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- Kemudian **ketujuh**, meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan **kedelapan**, menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.



PERCEPAT PELAYANAN DENGAN PONSEL

DENGAN tandatangan elektronik proses perijinan di Sidoarjo lebih cepat dan tidak merepotkan pemohon serta petugas.

Setiap memasuki ruangan kerja, Achmad Zaini selalu punya aktivitas rutin yang pertama kali dilakukan. Rutinitas itu bukanlah minum kopi atau berbincang dengan dengan kolega. Hal yang harus dilakukan pertama kali oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo ini adalah menandatangani surat-surat izin yang diajukan warga. “Jumlahnya bisa ratusan,” katanya sambil tersenyum.

Bahkan, sambung Zaini, jika dia harus melakukan perjalanan dinas luar kota, dokumen yang harus dihadapinya bertumpuk memenuhi ruang kerja. “Jadi kalau mendapat perintah dinas luar atau sekadar rapat dengan pimpinan, saya harus menyiapkan mental menghadapi sambutan rutin,” sambungnya. “Karena tak bisa ditunda, ini terkait dengan kebijakan yang sudah menetapkan batas waktu proses perizinan.”

Tapi, sejak Juni 2015 lalu, pria asal Madura ini tak harus mengalami rutinitas yang merepotkan itu. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki solusi untuk mempercepat pelayanan pada warga tanpa merepotkan petugas pelayanan. “Solusinya adalah tandatangan elektronik,” kata Zaini.

Dengan aplikasi tandatangan elektronik itu, surat ijin bisa diteken pimpinan institusi di mana pun berada. Lantaran aplikasi ini mengintegrasikan sistem yang ada di kantor BPPT dengan telepon seluler (ponsel) para pimpinannya. Alurnya, berkas yang masuk ke petugas di meja pelayanan masuk ke *back office*. Data yang telah diperiksa *back office* dan dinyatakan lengkap akan disalurkan ke





ponsel kepala bidang. Jika kepala bidang telah memverifikasinya, lalu diteruskan ke kepala badan.

“Cara kerjanya mirip notifikasi e-mail atau pesan singkat yang masuk ke ponsel,” kata Zaini. “Jika saya sudah menekan tombol persetujuan di ponsel, maka sistem di kantor akan langsung mencetak surat ijin itu lengkap dengan tandatangan saya dan barcode sebagai sistem pengamanan dokumen.”

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang mengawali penerapan pelayanan perizinan secara terpadu. BPPT merupakan hasil transformasi dan penyempurnaan dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang dirintis sejak 1997. Dalam konteks desentralisasi, Tahun 2001, daerah ini membentuk Dinas Perizinan Penanaman Modal (DPPM). Pada tahun 2003, DPPM menerapkan sistem manajemen mutu ISO9001:2000.

Sekretaris BPPT Reddy Kusuma mengatakan, pada tahun 2008 terjadi perubahan nomenklatur DPPM menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). “Hal itu merupakan implementasi PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sistem manajemen mutu yang diterapkan pun di-upgrade menjadi ISO 9001:2008 pada

tahun 2010,” paparnya.

Setahun kemudian, badan ini merintis inovasi pelayanan perizinan satu paket. Program ini diluncurkan pada akhir 2011 dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) No 39/2011 tentang Penerbitan Perizinan Satu Paket. “Dalam tataran implementasi, peraturan tersebut baru efektif berlaku pada Januari 2012,” imbuh Reddy.

Ada dua jenis paket perizinan yang ditawarkan. Paket I terdiri dari enam jenis perizinan dan paket II terdiri tiga jenis perizinan. Dalam pengurusan secara reguler (satu per satu), enam izin dalam paket I tersebut baru akan selesai dalam 24 hari kerja setelah semua syarat dinyatakan lengkap. Sementara itu, tiga jenis izin dalam paket II baru bisa selesai dalam 21 hari kerja.

Dengan sistem paket, waktu yang dibutuhkan dapat dipangkas menjadi 14 hari kerja (paket I) dan 10 hari kerja (paket II). Program tersebut dianggap menguntungkan masyarakat yang ingin membuka usaha baru seperti retail serta usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM).

Waktu pelayanan dapat dipangkas karena pemohon izin tidak perlu menyerahkan dokumen persyaratan satu per satu mulai awal. Sebab, beberapa izin yang digabung sebenarnya mensyaratkan dokumen yang sama. Dengan demikian, pemohon cukup sekali mengirimkan berkas untuk memenuhi persyaratan beberapa izin.

Tak hanya itu, pemohon perijinan paket juga bisa memantau status proses perijinan lewat situs web. “Meski ada sistem paket, kami tetap melayani perizinan secara reguler,” ujar Reddy. “Bahkan untuk Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Industri (TDI), asal syarat lengkap bisa selesai kurang dari tiga jam.”

Dengan semakin baik dan cepatnya sistem perijinan yang dikelola BPPT, maka lewat Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 1 Nopember 2014 kewenangan BPPT diperluas. “Dari 37 menjadi 73 jenis ijin,” kata Reddy.

Kemudahan pelayanan perijinan di Sidoarjo ini dirasakan oleh Maharani yang tengah membuat SIUP dan TDP pada awal Februari 2016 lalu. Menurutnya, pelayanan di BPPT sangat memuaskan dan susananya modern mirip di bank. “Pertama masuk ambil nomor

antrian digital, tak lama langsung dipanggil karena meja pelayanannya banyak,” katanya.

Bahkan, sambung Rani yang tinggal di Kecamatan Sedati itu, dengan dua layar komputer di meja pelayanan dia bisa mengoreksi data-data yang tengah diketik petugas. “Jadi kalau salah bisa langsung dikoreksi. Dan kita tahu petugas di depan kita memang mengerjakan permohonan kita, bukan mengerjakan berkas orang lain atau bermain *game*,” sambungnya.

Perempuan berjilbab itu pun merasa kaget saat dijanjikan petugas bahwa SIUP dan TDP yang tengah diurusnya dijanjikan selesai kurang dari tiga jam. “Makanya saya tunggu saja sampai selesai,” imbuh Rani.

INISIATIF DARI SUKODONO

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal di Kabupaten Sidoarjo tak hanya dilakukan di BPPT. Pelayanan serupa yang mempermudah masyarakat juga dilakukan di setiap kecamatan dengan julukan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten). Dengan Paten, pelayanan administrasi di kecamatan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dilayani secara online. “Bahkan, izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas bangunan maksimal 200 meter persegi juga bisa lewat Paten,” kata Camat Sukodono Ainur Rahman.

Dia juga mengatakan, kunci cepatnya pelayanan ini adalah terintegrasinya data di kecamatan dengan desa-desa. Koordinasi antara kecamatan dan desa semakin mudah, sebab semua administrasi bisa diakses dari data online. “Sekarang 19 desa yang ada di Kecamatan Sukodono bisa berkoordinasi dengan cepat via Paten. Bahkan saya bisa melihat kondisi pelayanan setiap desa lewat CCTV dari ruang kerja,” katanya.

Tak hanya itu, Paten juga akan dioptimalkan untuk memperluas pelayanan. Misalnya, menjadi kantor pembantu bank atau penempatan ATM Bank. Kerjasama pelayanan pensertifikatan tanah dengan BPN, perpanjangan SIM dengan Polres. “Selain itu dapat digunakan untuk penyusunan profil desa serta pelaporan penyusunan APBDes dan RPJMDes, serta surat menyurat lainnya. Sehingga ada efisiensi penggunaan kertas (*paperless*) dan efisiensi dalam berkoordinasi,” papar alumni STPDN ini.



Pria enerjik berdarah Madura ini juga tanpa sungkan membuka rahasia dapurnya soal biaya pembangunan Paten. “Untuk biaya sebenarnya tak banyak. Karena *hardware*-nya merupakan peralatan yang sudah ada, yakni peralatan administrasi kependudukan dulu. Hanya membuat aplikasi sederhana saja yang murah tapi tangguh,” katanya.

Dia pun menuturkan, embrio Paten sendiri adalah aplikasi yang dia rintis beberapa tahun lalu saat menjadi Sekretaris Kecamatan di Sukodono. “Setelah percaya diri dan yakin dengan sistem ini, saya sampaikan ke pimpinan untuk dikembangkan,” pungkas camat yang murah senyum ini.

Inovasi keren bernama Paten ini pun mengundang daerah lain di Indonesia untuk berguru. Pada pertengahan September 2015, Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo. Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Donggala, Vera E. Laruni itu menyambangi langsung Kantor Kecamatan Sukodono.

Rombongan yang didominasi camat itu mendapatkan penjelasan kesuksesan Paten Sukodono dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah Keluar, sampai pada rekomendasi Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK), Kartu Pencari Kerja (AK-1) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rombongan dari Provinsi Sulawesi Tengah itu pun berdecak kagum atas inovasi kecamatan yang telah mendapatkan sertifikat *quality management system* ISO 9001:2008 itu. “Tidak hanya dalam teknis administrasi yang sangat memuaskan, tapi juga dalam memanjakan masyarakat saat datang ke kantor ke kantor kecamatan juga,” kata Vera.

Bahkan, sambung Vera, sebagai perempuan dia sangat terharu dengan fasilitas di Kecamatan Sukodono yang menyediakan ruang ibu menyusui. “Ada air minum gratis, informasi televisi dan media cetak ada. Dan yang sangat istimewa adalah ruang menyusui,” ungkapnya. ●





KOTA BALIKPAPAN



KOTA BALIKPAPAN



H.M. Rizal Effendi, SE
Walikota Balikpapan



H. Heru Bambang, SE
Wakil Walikota Balikpapan

VISI:

Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman

MISI:

- Visi dan Misi Kota Balikpapan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Perda No. 1 Tahun 2013) adalah sebagai terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman.
- Untuk mencapai visi tersebut, Kota Balikpapan memiliki beberapa misi sebagai berikut. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Kedua, menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.
- Lalu, misi Kota Balikpapan yang keempat adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Lalu yang kelima adalah mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
- Sementara itu, misi Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi misi Kota Balikpapan periode 2011-2016 tertuang dalam delapan poin. **Pertama**, meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman. **Kedua**, membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
- Lalu yang **ketiga** adalah meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial. **Keempat**, meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja. Dan yang **kelima** adalah meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.
- Sedangkan misi **keenam** adalah meningkatkan infrastruktur kota yang representatif. **Ketujuh**, meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak. Serta yang **kedelapan** adalah memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotongroyongan.

MENGGENDONG BAYI BERIKUT AKTA KELAHIRANNYA

KINI warga Kota Balikpapan yang baru lahir otomatis akan membawa akta kelahirannya. Lewat program akta kelahiran online, si ibu langsung membawa bayi dan akta kelahirannya begitu pulang dari persalinan.

Akhir Februari 2015 lalu, Sri Wahyuningsih warga Gang Telindung melahirkan putri ketiganya di Rumah Bersalin Sayang Ibu, Balikpapan. Begitu pulang dari rumah sakit, Sri tak hanya membawa anaknya yang baru lahir. Melainkan dia juga membawa Akta Kelahiran anaknya.

“Cukup membawa kartu keluarga, KTP, dan surat nikah, sekarang sudah dapat akta kelahiran langsung di rumah sakit. Dulu waktu melahirkan kedua, akta harus mengurus ke kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” katanya.

Kemudahan yang dirasakan Sri Wahyuni itu kini dapat dirasakan semua warga Kota Balikpapan. Lewat Program Akta Kelahiran Online, akta kelahiran dilayani langsung di rumah sakit. Hingga saat ini, tak kurang dari 11 rumah sakit daerah maupun swasta di Balikpapan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah kota.

Kepala Disdukcapil Balikpapan Chairil Anwar mengatakan, dengan program ini pengurusan akta kelahiran menjadi sangat mudah. “Orangtua yang melahirkan, ketika pulang sudah memiliki akta kelahiran tanpa mengurus ke kelurahan, kecamatan, dan kantor Disdukcapil,” katanya.

Program ini mulai diuji coba sejak 28 Oktober 2014 di RS Bersalin Sayang Ibu dan Puskesmas Klandasan Ilir. “Pada masa uji coba itu, kami pelajari kekurangan dan kendalanya. Sehingga kini bisa berjalan lancar,” imbuh Chairil.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Disdukcapil, Hasbullah

JENIS KTP UNTUK ANAK

KIA
< 5 tahun



KIA
5-17 tahun



Orangtua memintakan KIA 5-17 tahun dengan menyertakan

- fotokopi kutipan akta kelahiran anak
- KTP dan KK orangtua
- 2 lembar pasfoto anak (ukuran 2 x 3 cm)

< 18
Definisi Anak
Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*

Sama syaratnya

KIA balita diberikan bersamaan dengan kutipan akta kelahiran anak

Jika anak balita lahir sebelum pemberlakuan KIA, kartunya dapat dimintakan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KTP Anak
Kartu Identitas Anak (KIA)

BUAT APA SIH KIA?



Bagi negara untuk pendataan kependudukan (terutama anak) dan meningkatkan upaya perlindungan anak**



KIA UNTUK SIAPA?



Anak WNI, termasuk yang baru datang dari luar negeri



Anak orang asing yang tinggal di Indonesia

Rujukan: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak

* Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak

** Tafsir redaksi Beritagar terhadap Bab 2 (Tujuan), Pasal 2, Permendagri No.2/2016

Helmi mengatakan kendala yang muncul hanya terkait dengan koneksi jaringan internet. “Dengan belum tersedianya fasilitas internet yang memadai di berbagai rumah sakit dan puskesmas, maka belum semua rumah sakit bisa berpartisipasi dalam program ini,” katanya.

Kendati demikian, dia yakin pada tahun 2016 ini pelayanan akta kelahiran online bisa berjalan di seluruh rumah sakit. “Puskesmas yang menerima jasa persalinan juga akan dipasangkan program pembuatan akta online ini. Sehingga prosesnya bisa cepat dan tidak perlu mengantri di kantor catatan sipil,” kata Helmi.

Adapun kunci sukses dari program ini adalah partisipasi dari rumah sakit. Menurut Helmi, mereka harus menyediakan perangkat, sumber daya manusia dan koneksi internetnya. “Padahal semua layanan terkait akta kelahiran ini gratis. Jadi peran rumah sakit dalam program ini sangat penting,” katanya.

Agar rumah sakit mau berpartisipasi, tentunya Pemerintah Kota Balikpapan punya resepnya. “Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2014 mengenai persyaratan dan tata cara pelayanan akta kelahiran secara online di rumah sakit dan Puskesmas di Balikpapan, sebagai payung hukumnya,” kata Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan, Chairil Anwar.

Setelah terbitnya payung hukum itu, lalu diselenggarakan sosialisasi ke sejumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin dan Puskesmas. “Lalu mereka diberikan pelatihan bagaimana memadukan data secara online,” imbuhnya.

Sukses dengan layanan akta kelahiran online, Pemerintah Kota Balikpapan tak berpuas diri. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid MN Fadli mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan layanan baru sektor catatan sipil ini. “Disdukcapil telah menyiapkan sistem untuk pencatatan kematian secara online,” katanya.

Saat ini, sambung Fadli, akta kematian pengurusannya masih secara manual melalui RT, kelurahan, kecamatan hingga Disdukcapil. Meski demikian ketertiban pencatatan oleh masyarakat mulai meningkat. Dari biasanya 10 akta kematian per bulan, saat ini mencapai 50-60 pelaporan kematian per bulan.

“Dengan rapuhnya pencatatan kelahiran dan kematian, maka jumlah penduduk Kota Balikpapan secara riil dapat diketahui. Sehingga dalam penyelenggaraan program pembangunan akan tetap

KOTA BALIKPAPAN

sasaran dan sesuai dengan kebutuhan,” pungkask Fadli.

Inovasi lain dari Kota Balikpapan terkait catatan sipil adalah kartu identitas anak (KIA) atau KTP Anak. Dengan program ini, pemerintah kota ingin semua warga memiliki kartu identitas diri. Jika sebelumnya hanya warga berusia 17 tahun ke atas dan berstatus telah menikah yang memiliki KTP elektronik, dengan program ini warga Balikpapan yang baru lahir sejak usia 0 sampai 16 tahun juga akan mendapatkan pelayanan pembuatan kartu identitas diri.

Pembuatan kartu identitas anak ini merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak. Setelah terbitnya Perwali itu, pada 14 November 2015 diluncurkan di gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome.

Rencananya, KTP Anak ini cikal bakal menuju pembuatan kartu insentif anak. “Jadi yang memiliki kartu identitas anak berpotensi ditingkatkan jadi kartu insentif, khususnya anak yang berstatus pelajar. Bahkan ada keuntungan jika punya kartu, nanti akan dikerjasamakan dengan Gramedia untuk diskon-diskon,” kata Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan, Chairil Anwar.

Namun, saat ini pelaksanaan dari inovasi itu dihentikan. Lantaran pemerintah pusat telah memberlakukan KIA nasional. Munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016, itu pun memupus inisiatif Kota Balikpapan untuk menerbitkan kartu insentif yang bisa menjadi kartu diskon itu.

KOTA NYAMAN DIHUNI

Kota bisnis terpenting di Pulau Kalimantan ini juga punya visi mewujudkan Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman. Menurut Walikota Balikpapan Rizal Effendi, kota nyaman dihuni atau *livable city* adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas.

“Hal itu dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik yang meliputi fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain. Juga aspek non-fisik seperti hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan sebagainya,” katanya.



Dengan kerja keras semua komponen di Balikpapan, lambat laun kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman itu terwujud. Pengakuan pun datang dari Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP). Pada tahun 2013, lembaga itu menobatkan Balikpapan sebagai kota paling nyaman dan layak huni di Indonesia.

Ketua Umum IAP, Bernardus Djonoputro, mengatakan Kota Balikpapan unggul dalam aspek tata kota dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang disurvei berdasarkan persepsi masyarakat. “Balikpapan mengalahkan Yogyakarta yang selama dua kali berturut-turut yakni tahun 2009 dan 2011 tampil sebagai kota ternyaman,” katanya.

Balikpapan unggul dalam aspek tata kota dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan lainnya yang disurvei IAP berdasarkan persepsi masyarakat. Sedangkan enam kota lainnya yang

masuk dalam kategori paling nyaman dan layak huni adalah Solo, Malang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, dan Bandung.

Ketujuh kota tersebut memenuhi 27 indikator diantaranya ketersediaan dan kualitas fasilitas meliputi kesehatan, pendidikan, rekreasi, energi listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu tingkat aksesibilitas tempat kerja, tingkat kriminalitas, interaksi hubungan antarpenduduk, informasi pelayanan publik, dan ketersediaan fasilitas kaum difabel juga jadi pertimbangan penilaian.

Untuk meranking kota yang dianggap layak huni itu, IAP melakukan jajak pendapat di 17 kota metropolitan dan sedang di Indonesia. Kota yang disurvei tersebut adalah Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Jayapura, Palembang, Medan, dan DKI Jakarta. Kota-kota ini dinilai dengan skala 0-80 dan hanya ada tujuh kota yang memiliki nilai di atas rata-rata nasional. Yang tertinggi adalah Balikpapan dengan skor 71,12.

Pada tahun 2015, giliran World Wildlife Fund (WWF) menobatkan Balikpapan sebagai Kota Paling Dicintai di Dunia. Kota Minyak ini menyisihkan 43 kota lain di dunia melalui voting yang diadakan melalui laman www.welovecities.org.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis Internasional WWF, Jean-Paul Paddock kepada Walikota Rizal Effendi di Seoul, Korea Selatan, 9 April 2015. “Atas nama warga Balikpapan, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam kampanye ini sehingga berhasil meraih predikat *‘The World’s Most Loveable City’*. Pencapaian ini merupakan dorongan tersendiri bagi pemerintah kota, menjadikan Balikpapan sebagai kota ramah lingkungan, layak huni dan kota percontohan,” papar Rizal. ●



KOTA BLITAR



KOTA BLITAR



**Muhammad Samanudi
Anwar S.H. M.M.**
Walikota Blitar



Drs. H. Santoso, M.Pd.
Wakil Walikota Blitar

VISI:

**Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera
yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan
dan Religius Melalui APBD Pro Rakyat**

MISI:

- Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
- Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.
- Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.

DI BLITAR BISA PINTAR TANPA HARUS BAYAR

BLITAR memang tak pernah mengklaim dirinya sebagai Kota Pendidikan. Tetapi, besarnya perhatian Pemerintah Kota Blitar terhadap dunia pendidikan memang sangat pantas dicontoh oleh daerah lain. Sejak 2012 lalu, Pemerintah Kota Blitar selalu mengalokasikan hampir 40 persen dana APBD-nya untuk penyelenggaraan program pendidikan.

“Di Kota Blitar, anak sekolah bukan hanya gratis SPP dan uang gedung. Seragam, sepatu, buku paket, lembar latihan siswa (LKS), dan alat tulis diberikan secara Cuma-Cuma oleh Pemerintah Kota,” kata Sekretaris Daerah Kota Blitar Drs. Santoso, MPd. Bahkan, bagi siswa yang membutuhkan, Pemkot Blitar juga menanggung transportasi pelajar dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dengan memanfaatkan 4 buah bus milik Pemkot dan 12 angkot yang bekerjasama dengan Pemkot. Boleh dikata, untuk bisa pergi ke sekolah, saat ini pelajar di Kota Blitar hanya perlu uang untuk membeli pakaian dalam saja, tak perlu memikirkan untuk membeli benda-benda lain.

Kepala Dinas Pendidikan Mokhamad Sidik S.Sos.,M.AP menambahkan, saat ini pihaknya bahkan tengah berusaha untuk mewujudkan satu impian lagi, yakni memberikan jajanan gratis yang sehat bagi para siswa semasa mereka di sekolah. Pemberian camilan gratis ini selain dimaksudkan untuk menjaga anak-anak dari jajanan tak sehat, juga dilakukan untuk memperbaiki gizi para pelajar.

Jangan bilang bahwa program ini mengada-ada dan tak ada manfaatnya. Kondisi riil di lapangan memang menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan ini sangat penting. Dalam riset kesehatan dasar (Riskesdes) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, misalnya, masih ditemukan cukup banyak anak yang



bermasalah dengan gizi. Dalam Riskesdes 2013, misalnya, ditemukan bahwa 11,2 persen anak Indonesia yang berperawakan kurus, 30,7 persen anak bertubuh pendek (stunting), 18,8 persen anak mengalami obesitas, dan 26,4 persen mengalami anemia.

Dibanding sebelumnya, hasil temuan Riskesdas 2013 itu sebenarnya sudah merupakan sebuah kemajuan. Populasi anak-anak SD yang mengalami stunting menurun dari 35,8% (Riskesdas 2010) menjadi 30,7% (Riskesdas 2013). Meskipun demikian, angka 30,7% itu masih belum boleh dianggap sebagai angka yang aman.

Apalagi, berdasarkan hasil review terhadap penelitian bidang gizi dan kesehatan, diketahui bahwa anak-anak usia 4-12 tahun di Indonesia mengalami defisit asupan energi sebesar 35% dan defisit asupan protein sebesar 20% dari angka kecukupan gizi (AKG).

Review itu juga menunjukkan bahwa 20% anak-anak memiliki kebiasaan makan kurang dari 3 kali sehari dan 20% anak berangkat ke sekolah tanpa sarapan (ACDP 2012). Padahal, sarapan yang baik memiliki peran strategis dalam tumbuh kembang anak.

Berbagai riset menyatakan bahwa sarapan sangat bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi belajar, meningkatkan ketahanan

fisik dan daya tahan tubuh, mengurangi resiko kegemukan, dan mencegah jajan sembarangan. Alhasil, jika rencana ini terwujud, Kota Blitar akan menjadi salah satu kota yang memiliki kepedulian tinggi pada persoalan gizi, yang pada akhirnya akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

Bukan itu saja, dengan alasan untuk meningkatkan kebugaran siswa dan mengurangi kemacetan lalu lintas, menurut Mokhammad Sidik, Walikota Blitar juga sedang berpikir untuk memberikan sepeda kepada para siswa SLTA agar mereka bisa pulang pergi ke sekolah dengan bersepeda.” Tujuannya untuk menjaga kebugaran dan mengurangi beban kemacetan lalu lintas kota,” ujar Sidik seraya menambahkan bahwa anak-anak SLTA kelak harus bersepeda pulang pergi sekolah setelah pemberian bantuan ini.

Saat ini, di sejumlah SMA di Kota Blitar, siswa SMA sudah pula dibekali dengan perangkat tablet. Diharapkan, perangkat itu dapat



memudahkan para siswa untuk mencari bahan pelajaran di dunia maya. Sebagai pendukung, Pemkot juga menyediakan wifi gratis di sejumlah titik. “Pada malam hari, wifi yang ada di kantor-kantor pemerintahan kami diperlebar jangkauannya hingga radius 300 meter. Lalu, di beberapa titik di pusat kota, kami juga menyediakan hot spot gratis,” ujar Sekda Kota Blitar.

Bahkan, lanjut Sekda, bantuan bagi para pelajar tak hanya sebatas itu. Setiap anak yang masuk ke jenjang pendidikan baru, seperti masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, dan masuk ke perguruan tinggi juga mendapatkan bantuan keuangan dari Pemkot. Masing-masing siswa mendapatkan Rp1 juta. “Tujuannya, untuk merangsang agar anak-anak lebih bersemangat belajar,” tambahnya. Lulusan SMA yang ingin kuliah di Akademi Komunitas Blitar juga digratiskan seluruh biaya pendidikannya.

Berbagai fasilitas ini bukan saja mampu mendorong partisipasi anak-anak usia sekolah di Blitar untuk belajar. Secara kualitatif, jumlah lulusan SLTA dari Blitar yang diterima di perguruan tinggi pun semakin meningkat.

Sekda menambahkan, ide pemerataan pendidikan ini awalnya datang dari Walikota Blitar Mohammad Samanhudi Anwar. “Pak Wali pernah drop out karena persoalan biaya. Karena itu Pak Wali berharap semua anak di Blitar tak perlu mengalami nasib yang sama dengan dirinya,” ujar Santoso. Keinginan itu kemudian dituangkan dalam sejumlah peraturan walikota yang mengatur mengenai besaran dan cakupan sumbangan pendidikan yang diberikan oleh Pemkot Blitar kepada para siswa di kota itu.

BUKAN MEMANJAKAN

Walikota Samanhudi menyatakan, pemberian aneka macam fasilitas bagi pelajar ini sebenarnya sama sekali tak dimaksudkan sebagai tindakan memanjakan. Yang sesungguhnya diinginkan oleh Samanhudi sesungguhnya adalah agar semua pelajar di Blitar bisa belajar dengan tenang, nyaman, dan tak dibebani dengan aneka macam pikiran tentang biaya sekolah.

Bukan rahasia lagi, anak tak akan merasa nyaman belajar manakala dia punya tanggungan kewajiban kepada sekolah. Apalagi, jika sekolah itu kemudian memberikan “hukuman” bagi pelajar yang menunggak



SPP. Anak akan merasa rendah diri dan tertekan.

Padahal, pada saat ini, Kota Blitar sedang berusaha keras agar tingkat pendidikan warganya dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pendidikan warga Kota Blitar belum sesuai harapan. BPS Kota Blitar baru saja merilis data yang menunjukkan bahwa warga Kota Blitar yang lulus S1 saat ini baru mencapai 16.908 orang, atau 15,72 % dari total jumlah penduduk usia kerja. Sementara lulusan SMA mencapai 21.136 orang dan lulusan SMK mencapai 23.249 orang.

Nah, dengan menggratiskan seluruh kebutuhan sekolah anak-anak, yang diinginkan oleh Walikota Samanhudi sesungguhnya adalah agar para orang tua di Blitar mampu menyisihkan penghasilannya dan ditabung untuk membiayai pendidikan tinggi sang anak. Dengan demikian, pada ujungnya, daya saing warga Blitar akan meningkat ke jenjang lebih tinggi.

PENDIDIKAN MENTAL SPIRITUAL

Selain mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan memberikan aneka fasilitas, Kota Blitar juga menerapkan system pendidikan yang mengedepankan aspek mental spiritual. Sejak 2012 lalu, Pemkot mewajibkan para pelajar untuk mengikuti tes kemampuan bidang agama.

Ujian ilmu agama ini berlaku bagi seluruh calon siswa SMP dan SMA pada tahun ajaran ini yang akan naik kelas atau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk masing-masing agama dibentuk tim penguji yang berasal dari tokoh agama setempat. Untuk siswa beragama Islam akan menjalani ujian baca tulis Al-Quran oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Blitar. Lembaga ini dinilai kredibel untuk melakukan uji pengetahuan agama siswa yang dilakukan di masing-masing sekolah. Mereka mendatangi setiap sekolah dan menguji siswa kelas tiga yang akan masuk ke jenjang berikutnya.

Sedangkan siswa nonmuslim akan diuji oleh tokoh agama mereka masing-masing. Selanjutnya mereka akan mendapatkan sertifikat dengan tiga kategori, yakni A untuk yang pintar, B untuk sedang, dan C untuk siswa yang kurang cakap. Sertifikat ini akan menjadi catatan bagi sekolah penerima. Mereka yang mendapatkan nilai C dalam ujian agama ini akan mendapatkan porsi pendidikan agama lebih banyak di kelas berikutnya. ●



KOTA MADIUN



KOTA MADIUN



H. Bambang Irianto, S.H., M.M.
Walikota Madiun



Sugeng Rismiyanto
Wakil Walikota Madiun

VISI:

**Terwujudnya Kota Madiun yang
lebih maju dan sejahtera**

MISI:

- Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

MENGENTASKAN KEMISKINAN DENGAN MENGATASI AKAR MASALAHNYA

PEMERINTAH Kota Madiun terkenal sangat serius dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayahnya. Hasilnya pun luar biasa. Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun dari waktu ke waktu terus menurun. Bappeda Kota Madiun mencatat, angka kemiskinan di wilayah itu rata-rata turun 0,37 persen sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Yang menarik disimak adalah cara Kota Madiun menangani masalah kemiskinan. Menurut Maldi yang didampingi para kepala SKPD, Kota Madiun menerapkan penanganan masalah kemiskinan dengan mengatasi akar masalahnya. “Keluarga miskin adalah keluarga yang di dalamnya ada 9 dari 14 indikator kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) itu,” kata Maldi, Sekretaris Daerah Kota Madiun.

Pemkot pun mengeluarkan program bedah rumah agar tak ada lagi rumah tak layak huni (RTLH) di Kota Madiun. RTLH adalah salah satu indikator kemiskinan versi BPS. Sejak 2009 hingga 2014, Pemkot Madiun melalui berbagai program terkait telah melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) hingga sebanyak 4.197 unit.

Pemkot juga aktif membantu masyarakat agar semua rumah memiliki jamban. Targetnya, pada 2016, semua keluarga harus memiliki jamban. Berdasarkan catatan yang ada, bantuan pembangunan jamban selama 2013 tercatat sebanyak 1.540 unit, 766 unit (2014), dan 974 unit (2015). Total dana untuk bedah rumah dan jambanisasi ini pada 2016 mencapai Rp40 miliar. Lewat dua program ini, tak ada lagi rumah berdinding bambu dan berlantai tanah di Madiun. Juga, tak ada lagi aktivitas BAB di ruang terbuka.

Akses terhadap pangan pun dibuka dengan memberikan raskin kepada keluarga tak mampu. “Banyak rumah tangga sasaran yang



belum memperoleh raskin dari Pemerintah Pusat. Kepada mereka, kami memberikan raskinda alias beras untuk kelompok masyarakat miskin yang dananya berasal dari APBD,” kata Maidi. Tak tanggung-tanggung, tahun ini, jumlah penerima raskinda ini mencapai 2.664 keluarga dengan total dana APBD Rp5 miliar.

Tak cuma itu, Pemkot Madiun juga merancang satu sistem yang memungkinkan warga kurang mampu untuk lebih mandiri. Salah satunya dengan memberikan ruang berjualan di tempat-tempat umum. “Sekarang ini lebih dari 2 ribu PKL yang berdagang di lapangan-lapangan yang kami beri penerangan,” ujar Sekda yang



berlatarbelakang seorang guru itu.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga dibuka lebar bagi masyarakat. Setiap anak usia sekolah diberi peluang belajar gratis selama 12 tahun. Bahkan, Pemkot Madiun berani memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp500 ribu per bulan bagi anak-anak yang kurang mampu namun mampu masuk perguruan tinggi negeri.

“Jika ada yang mau kuliah di PTN di Madiun, kami biayai 100 persen,” tambah Maidi. Di Kota Madiun, saat ini terdapat 2 PTN, yakni Politeknik Negeri Madiun dan Akademi Perkeretaapian.

Layanan kesehatan pun diberikan secara cuma-cuma. Pemkot Madiun akan membayar biaya pengobatan warganya, tak peduli kaya ataupun miskin, asal mau dirawat di kelas 3. Untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta ini, Pemkot Madiun menganggarkan dana Rp27 miliar dari APBD.

Inti dari semua program tadi, kata Maidi, adalah membuat seluruh rakyat Madiun terbebas dari status penyandang indikator kemiskinan. “Kami menggunakan sejumlah Peraturan Walikota untuk menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan ini,” tandas Maidi.

Lagipula, Pemkot tak pernah kekurangan dana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini.

PAD Kota Madiun dari waktu ke waktu terus meningkat. Jika pada 2012 baru Rp26 miliar, PAD Madiun kini sudah melesat menjadi Rp 135 miliar. “Tak kurang untuk membiayai program-program peningkatan kesejahteraan,” ujar Maidi.

TETAP JADI FOKUS

Persoalan penanganan kemiskinan hingga kini masih tetap menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan Kota Madiun. Bahkan, Walikota Madiun Bambang Irianto menyatakan bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016, masalah pengentasan kemiskinan menjadi satu dari 6 fokus pembangunan, yang meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan infrastruktur sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai salah satu fokus pembangunan, masalah pengentasan kemiskinan ini akan ditangani dengan pendekatan yang telah berjalan sebelumnya. Bambang Irianto menegaskan, pemberantasan kemiskinan memang tak bisa dipisahkan dari penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang baik.

“Pengentasan kemiskinan yang terbaik adalah dengan menyiapkan orang-orang yang berpotensi tidak miskin pada masa mendatang,” ujarnya. Artinya, untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang baik.

Pemikiran semacam itulah yang mendorong keluarnya Kartu Madiun Pintar (KMP) dan Jamkesmasta (Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta) pada 2012. Dengan dua kartu itu, Pemkot Madiun memberikan jaminan bahwa semua penduduk usia sekolah bisa mendapatkan layanan pendidikan, dan semua orang sakit bisa memperoleh layanan pengobatan.

Sebelumnya, kata Bambang, di Madiun masih banyak ditemui anak putus sekolah karena orang tuanya hidup di bawah garis kemiskinan.





Dia mengungkapkan, faktor kesehatan bisa memicu kemiskinan. Sebab, ketika sakit, dibutuhkan banyak biaya untuk berobat. Begitu juga, warga tidak akan sejahtera karena kurang terdidik.

Karena itulah, sejak 2012, Pemkot Madiun kemudian

memberlakukan wajib belajar 12 tahun. **Kota Bambang** menuturkan, program tersebut ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Selain itu, setidaknya mengangkat anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bangkit, menjadi tenaga ahli yang terdidik dan terlatih.

Masih dalam kerangka pengentasan kemiskinan, Kota Madiun juga terus didorong untuk terus tumbuh dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Pada saat yang sama, Bambang Irianto juga rajin menggaet pengusaha luar kota untuk menanamkan investasi mereka di Kota Madiun.

Hasilnya nyata. Investasi di Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya selama tiga tahun terakhir dari Rp61,91 miliar tahun 2013 menjadi Rp496 miliar, dan Rp1,5 triliun pada 2015. Sebagian besar investasi tersebut disumbang dari sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan tempat hiburan.

Menurut Sekda Maldi, banyaknya investor yang masuk ke Kota Madiun itu antara lain terjadi akibat makin kondusifnya situasi keamanan dan keyakinan bahwa Kota Madiun memang menjanjikan peluang bisnis yang baik. Ia menjelaskan, banyaknya investor yang masuk ke Kota Madiun akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Inovasi tersebut berdampak karambol hingga bisa menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja baru terus meningkat. Jika pada 2009 tenaga kerja yang terserap mencapai 1.516 orang, pada akhir 2014 jumlahnya sudah naik 10 kali lipat. ●



KOTA MALANG



KOTA MALANG



Ir. H. Mochamad Anton
Walikota Malang



Sutiaji
Wakil Walikota Malang

VISI:**Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat****MISI:**

- Selain memiliki visi Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik sebagai mayoritas penduduk Kota Malang
- Dalam rangka mewujudkan visinya, maka misi pembangunan dalam Kota Malang terdiri atas beberapa hal. Pertama, menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran, dan setara. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
- Ketiga, mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang yang bisa bersaing di era global. Lalu kelima, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. Dan yang keenam, membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
- Lalu yang ketujuh, mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif. Dan yang kedelapan, mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. Kemudian kesembilan, mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

MENSINERGIKAN POTENSI LEWAT OTONOMI AWARD

BERBAGAI inovasi pembangunan dilakukan pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Agar memiliki dampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Malang mensinergikannya lewat Otonomi Award Lurah Camat.

Bagi sebagian besar masyarakat, berurusan dengan aparat pemerintahan merupakan hal yang dihindari. Penyebabnya, selain sikap petugas yang acuh suasana kantor pemerintahan juga sangat tidak nyaman. Tapi hal itu tak berlaku bagi warga Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Jika mereka datang ke kantor kelurahan, dijamin mendapat sambutan ramah dan suasana lebih nyaman. Karena di kelurahan ini, telah diterapkan standar pelayanan mirip di bank. Saat antre menunggu pelayanan, warga tak perlu lagi berdesakan. Karena pihak kelurahan sudah menyediakan nomor antrean secara otomatis. Sekali klik, akan keluar kertas berisi nomor antrean.

Setelah itu itu, kita tinggal menunggu panggilan petugas menuju loket pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Sambil menunggu panggilan, warga juga bisa melihat-lihat informasi pelayanan kantor kelurahan lewat perangkat layar sentuh.

Pelayanan prima Kelurahan Kasin yang melakukan pemanfaatan teknologi informasi ini membuatnya menjadi kelurahan yang berjuluk

smart community. Upaya kelurahan yang dipimpin oleh Yuyun Nanik Ekowati memanjakan warga dan meningkatkan pelayanan ini menuai penghargaan. Pada puncak perhelatan penganugerahan Otonomi Award Lurah Camat 2016 di Graha Cakrawala, Universitas Negeri Malang, 1 April 2016 lalu Kelurahan Kasin kembali terpilih



sebagai Kelurahan terbaik.

Kasin mengulang sukses pada tahun 2015 lalu yang juga menjadi juara umum. “Saya sama sekali tidak menyangka bisa menjadi juara lagi tahun ini. Namun belum saatnya untuk berbangga diri, kemenangan ini justru menjadi motivasi bagi kami supaya bisa mempertahankan kualitas pelayanan serta kegiatan para *stakeholder*-nya,” kata Yuyun setelah menerima Trofi dari Walikota Malang H. Moch. Anton.

Penganugerahan Otonomi Award Lurah Camat 2016 yang digelar Pemkot Malang ini merupakan puncak dari penilaian terhadap 57 kelurahan dan 5 kecamatan selama dua bulan lebih. Penganugerahan ini terasa begitu istimewa karena tidak saja hadir para pejabat di lingkungan Pemkot Malang, tetapi juga dari berbagai daerah. Diantaranya dari Kementerian Pariwisata yang diwakili Sekretaris Deputi Pemasaran Pariwisata Manca Negara Ni Wayan Giri Adnyana, Direktur Utama Fasilitas Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif M. Meil El Hilman, Ketua Indonesia Creative Cities Network

(ICCN) Paulus Mintaraga, Bupati Jember Dr. Hj. Faida MMF, Wakil Walikota Padang Panjang Dr. Makardi MKM.

Selain Kelurahan Kasin sebagai juara pertama, Kelurahan Purwantoro dinobatkan sebagai Kelurahan terbaik kedua disusul Kelurahan Tasikmadu menempati urutan ketiga. Sementara Kecamatan Blimbing menjadi yang terbaik disusul Kecamatan Sukun.

Penghargaan juga diberikan kepada kelurahan lain berdasarkan kategori, yakni Kelurahan Blimbing (Kategori Pendidikan), Kelurahan Purwantoro (Kategori Kesehatan), Kelurahan Cemoro Kandang (Kategori Ekonomi Masyarakat), Kelurahan Kasin (Kategori Keamanan dan Ketertiban), Kelurahan Bandungrejo (Kategori Lembaga Masyarakat), Kelurahan Bunulrejo (Kategori PKK), Kelurahan Tasikmadu (Kategori Partisipasi Masyarakat) dan Kelurahan Sukun (Kategori Pemerintahan).

Otonomi Award adalah agenda tahunan Pemerintah Kota Malang untuk menggali potensi di semua kelurahan. Selama ini berbagai inovasi dilakukan warga, hanya saja masih berjalan sendiri-sendiri. Jika disinergikan, maka akan punya kekuatan besar dalam membangun kota. Dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan untuk melayani kebutuhan masyarakat, tampaknya disadari betul oleh Pemerintah Kota Malang.

Upaya Pemerintah Kota Malang yang dikemas dalam ajang “Otonomi Award” ini mengadopsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan. “Ini instrumen atau alat untuk SKPD bisa bersinergi dengan kecamatan dan kelurahan, sehingga pelayanan ke masyarakat menjadi lebih prima dan optimal,” terang Sekretaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono.

Ia menambahkan, melalui upaya tersebut, Pemerintah Kota Malang pada akhirnya lebih rinci mengetahui potensi masing-masing kelurahan. Kemudian, mendapatkan peta potensi kelurahan sesuai kearifan lokal, gambaran progres kepemimpinan camat selaku koordinator lurah, kapasitas perangkat menjadi lebih kompetitif, serta mendorong koordinasi antarinstansi dan organisasi kemasyarakatan menjadi lebih intensif.

Selain itu, tercipta inovasi baru yang mengedepankan akuntabilitas dan profesionalisme, tercapainya peningkatan hasil-hasil karya

kreasi dan mampu memberikan nilai tambah secara konkrit kepada semua potensi. Kedua, meningkatkan motivasi masyarakat untuk berlomba menciptakan kreasi baru dan bertukar informasi jenis teknologi baru yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Walikota Malang, Moch Anton mengungkapkan, perhelatan Otonomi Award teretus atas gagasan melihat banyaknya potensi ekonomi di kelurahan dan kecamatan. Lewat penghargaan tersebut semakin membangun kreativitas dan iklim persaingan pembangunan.

“Karena itulah muncul gagasan Otonomi Award agar bagaimana bisa mengangkat potensi mereka menuju ekonomi kreatif,” katanya.

Anton menambahkan, dalam membangun kota membutuhkan peran serta masyarakat dan seluruh elemen. Kolaborasi potensi masyarakat akan memberikan guna dan manfaat dalam proses mensejahterakan masyarakat. Dia mencontohkan, Kelurahan Tlogomas pernah ditetapkan sebagai kelurahan terbaik pada tahun 2014 dalam ajang Otonomi Award. Kelurahan tersebut kemudian bisa menyabet kelurahan terbaik nasional pada tahun yang sama. “Semangat bersama lurah dan camat membawa hasil yang sangat luar biasa,” tegasnya.



Manjakan Warga di *Front Office*

Dampak Otonomi Award di Kota Malang ini, selain mampu meningkatkan pelayanan masyarakat, juga punya banyak manfaat lainnya. Rino, Camat Klojen, yang dalam ajang tersebut menjadi juara 1 umum kecamatan terbaik, mengatakan, inisiatif Walikota Malang telah berhasil mengubah pola kepemimpinan di semua level, mulai dari SKPD, camat, sampai lurah. “Pelayanan lebih dekat, lebih cepat, dan semua sistem telah menggunakan IT. Muncul pula berbagai inovasi di semua level kepemimpinan sesuai kapasitas dan rel tupoksinya,” tuturnya.

Senada dengan Rino, Yuyun Nanik Ekowati, Lurah Kasin, Kecamatan Klojen, yang juga menjadi juara di bidang pemerintahan,



serta juara 1 umum kelurahan terbaik se-Kota Malang mengatakan kelurahan yang dipimpinnya dapat leluasa berinovasi dan berkreasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya.

Dalam bidang layanan pemerintahan, contohnya, Kelurahan Kasin sejak 2014 sudah menerapkan berinovasi memberikan pelayanan satu pintu sehingga urusan birokrasi tak lagi berbelit-belit. Kelurahan Kasin mempunyai *front office*. "Front office ini yang pertama kali ada di Kota Malang," aku lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) 2002 ini.

Tujuan utama *front office* adalah untuk memangkas birokrasi. Selama ini, orang yang hendak mengurus administrasi di kelurahan harus menemui banyak orang di kelurahan. Sehingga, pelayanan menjadi tidak efektif. "Warga menjadi bingung dan merasa ruwet karena harus ketemu staf ini, lalu ke staf lain dan ke lurah," jelasnya.

Dengan adanya *front office* ini, masyarakat yang minta pelayanan tidak perlu bingung lagi. Masyarakat cukup menyetorkan berkas ke staf

yang berjaga di *front office*. Setelah itu, staf-lah yang menyetor ke staf atau ke lurah untuk meminta tanda tangan. Selain memanjakan warga yang mengurus pelayanan, adanya *front office* juga berhasil meniadakan pungutan tidak resmi (pungutan liar) yang dilakukan oleh oknum kelurahan. Karena warga tidak lagi bersentuhan langsung dengan para staf.

Sementara, Deputy Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata, Ni Wayan Giri Adnyani mengapresiasi adanya Otonomi Award. Karena nantinya dapat tercipta sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah, serta bisa dicontoh oleh daerah lain. “Pariwisata yang benar adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan hasilnya adalah untuk masyarakat,” kata Ni Wayan.

Tak mau sukses sendiri, Pemerintah Kota Malang memproyeksikan konsep Otonomi Awards Kelurahan dan Kecamatan yang digelar beberapa tahun terakhir ini bisa menjadi percontohan nasional dan diterapkan di kota/kabupaten lain di Tanah Air. “Konsep ini sangat bagus dan hasilnya cukup jelas dan bermanfaat. Oleh karena itu, saya berharap konsep Otonomi Award di Kota Malang ini akan menjadi percontohan nasional,” kata Walikota Malang, Moch Anton.

Dia mencontohkan Kelurahan Tlogomas ditetapkan sebagai kelurahan terbaik 2014 di ajang Otonomi Awards, kelurahan itu bisa menyabet terbaik nasional pada tahun yang sama. Karena prestasinya itu, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, menjadi “jujukan” studi banding bagi banyak daerah di Indonesia.

Abah Anton, panggilan akrab Walikota Malang ini mengatakan, dalam membangun kota perlu peran serta masyarakat dan seluruh elemen agar kolaborasi yang terjalin antara berbagai pihak itu mampu membawa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Lantas dari mana ide awal perhelatan Otonomi Award Lurah dan Camat tersebut? Anton mengatakan teretus karena melihat banyaknya potensi ekonomi yang ada di tingkat kelurahan hingga kecamatan. “Karena itulah muncul gagasan Otonomi Award ini agar bagaimana bisa mengangkat potensi mereka menuju ekonomi kreatif,” ujarnya.

Gelaran Otonomi Award Lurah dan Camat Kota Malang 2016 tersebut, juga diapresiasi oleh Deputy Pengembangan Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Ni Wayan Giri Adnyani. “Konsep ini mampu menciptakan sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah, serta bisa dicontoh daerah lain,” ucapnya. ●



KOTA MOJOKERTO



KOTA MOJOKERTO



Drs. K.H. Mas'ud Yunus
Walikota Mojokerto



Ir. H. Suyitno, M.Si.
Wakil Walikota Mojokerto

VISI:

Terwujudnya masyarakat Kota Mojokerto yang sejahtera, tenteram dan damai serta berdaya saing tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

MISI:

- Untuk mewujudkan visi Kota Mojokerto yang masyarakatnya sejahtera, tenteram dan damai serta berdaya saing tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, disusunlah beberapa misi. **Pertama**, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat. **Kedua**, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
- Lalu yang **ketiga** adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. **Keempat**, mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada kegiatan usaha kecil, menengah dan rumah tangga. Lalu yang kelima adalah mewujudkan Kota Mojokerto menjadi penyangga Kota metropolitan Surabaya, khususnya di bidang jasa dan perdagangan.
- Kemudian misi yang **kelima** adalah mewujudkan pemerintahan yang bercirikan *Good Governance*. Dan yang **keenam** adalah memantapkan stabilitas kehidupan berpolitik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.
- Dari visi dan misi diatas diharapkan menjadi sebuah program kedepan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan berbagai sektor pembangunan di Kota Mojokerto, dan tentunya dengan seluruh dukungan masyarakat dan *stakeholder* untuk tetap mengawal dan berusaha menjadikan kota Mojokerto menjadi lebih baik dan jaya di masa depan.

BERKAH ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN menggunakan dana zakat, Kota Mojokerto bisa meningkatkan produktivitas usaha kecil menengah lewat pinjaman modal usaha tanpa bunga.

Universitas Brawijaya di Malang menjadi kampus yang paripurna bagi Emru Suhadak. Saat kuliah, dia nyambi berjualan sepatu. Hasilnya, bisa membeli empat bidang tanah dan satu rumah. Lulus kuliah, dia pun mendirikan pabrik sepatu di kampung halamannya, Mojokerto.



Kini di rumah yang sekaligus pabriknya di Jl Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto bersama puluhan perajin, Emru membuat sepatu sepatu bermerek Wardhana dan Dr Boots. Ia banyak melayani pesanan sepatu-sepatu *custom* yang desainnya sesuai keinginan pelanggan.

Sama halnya dengan pelaku usaha kecil lainnya. Begitu mendapat pesanan melimpah, Emru kesulitan modal usaha. Di tengah upaya mencari pinjaman modal usaha, dia mendengar program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar). “Akhirnya mendapat bantuan modal usaha hingga Rp50 juta dari Pusyar,” kata Emru awal Februari lalu.

Pusyar sendiri adalah pembiayaan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dengan sistem akad Murobahah. Adapun beban biaya margin, asuransi dan administrasinya ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infaq.

“Jadi dengan meminjam dana di BPRS melalui program Pusyar ini, masyarakat dapat meminjam dana tanpa bunga, tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya asuransi,” kata Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus.

Awal mula bergulir, BPRS menyediakan dana untuk peserta program sebesar Rp1,5 miliar. Sehingga masyarakat dapat memperoleh pinjaman yang besarnya minimal Rp750 ribu dan maksimal Rp10 juta dengan akad Murabahah. Sedangkan pada Pusyar Unggulan atau Pusyar jilid 2 di tahun 2015, nilai pinjamannya semakin besar. “Pusyar unggulan ini menyediakan permodalan mulai Rp10 juta hingga Rp50 juta rupiah,” imbuh Mas’ud.

Sedangkan yang dapat memperoleh pinjaman adalah UKM dan IKM yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif dengan produk unggulan khas Kota Mojokerto. Seperti usaha alas kaki, batik, handycraft, perajin miniatur perahu layar, makanan ringan dan catering.

“Jadi dengan Pusyar Jilid 2 ini, saya berharap masyarakat mampu menggerakkan ekonomi lokal dan dapat bersaing dengan produk nasional maupun internasional. Sehingga masyarakat Kota Mojokerto nantinya dapat bersaing dalam persaingan bebas masyarakat ekonomi asean (MEA),” harap Mas’ud.

Pada Pusyar jilid 2, modal yang diberikan kepada para pengusaha

kecil dan menengah di Kota Mojokerto itu besarnya antara Rp10 juta hingga Rp50 juta dengan masa pengembalian hingga 36 bulan. “Untuk itu, BPRS telah menyediakan dana sebesar 3 miliar untuk program Pusyar ini,” ungkapnya.

Program Pusyar yang sejatinya sudah diluncurkan sejak 2012, dan sudah dirasakan oleh ratusan pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di Kota Mojokerto. “*Alhamdulillah* dengan Pusyar ini pertumbuhan ekonomi di Mojokerto mencapai 6,9 persen,” imbuh Mas’ud.

Lantaran pembiayaan Pusyar ini dijamin oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang bersumber dari dana infaq dan shodaqah, maka kata Mas’ud, kedepan pihaknya berencana mengubah Peraturan Daerah tentang Zakat, Infaq dan Shodaqah. “Kita akan tingkatkan hingga 100 persen. Sehingga diprediksi potensi dana infaq dan shodaqah nanti mencapai Rp700 juta. Dan itu akan digunakan untuk menjalankan Pusyar,” jelasnya.

“Dengan adanya dana itu, maka BPRS bisa menyediakan dana hingga Rp7 miliar. Sehingga harapannya kedepan akan lebih merata lagi dan penerima manfaatnya akan semakin banyak,” tegas Mas’ud.

Dalam pelaksanaannya, BPRS bertugas menyediakan dana untuk digulirkan kepada UKM. Sementara itu, Baznas dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berfungsi menghimpun UKM dan supervisi. “*Alhamdulillah*, setelah setahun berjalan, yang macet hanya 0,9 persen dan banyak pengusaha kecil yang dulu penerima zakat sekarang sudah menjadi pembayar zakat,” kata Mas’ud.

Tak hanya zakat, bahkan ada juga penerima manfaat Pusyar yang juga memberikan infaq ke Baznas Kota Mojokerto. “*Alhamdulillah* selain bisa mengembalikan pinjaman, atas berkahnya dana Pusyar bisa memberi infaq Rp10 juta ke Baznas,” kata Emru Suhadak, salah satu pelaku usaha yang mendapat bantuan modal dari Pusyar.

Inovasi pengembangan ekonomi masyarakat bermodalkan dana zakat ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, salah satu pihak yang mengapresiasi program Pemerintah Kota Mojokerto ini. Ia berharap program itu bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Seandainya program Pusyar menjamur di wilayah Jawa Timur, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, berjanji akan membuat peraturan

daerah untuk menguatkan potensi dana Infaq dan Shadaqah.

“Harapannya apa yang telah dilakukan Mojokerto ini bisa menjadi inspirasi yang lain. Sehingga jika demikian, Kami juga bisa membuat Perda tentang Infaq dan Shadaqah ini,” ungkapnya.

Apresiasi juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus menerima Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah. Penghargaan diterima Mas’ud Yunus atas inovasinya menggagas program Pembiayaan Usaha Syariah alias Pусyаr sejak tahun 2012.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad kepada Walikota Mas’ud Yunus dan disaksikan Presiden RI Joko Widodo dalam Pertemuan Presiden RI dengan Perwakilan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta pada Januari 2016.

Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan ini diserahkan kepada tokoh dan institusi di luar industri jasa keuangan atas peran dan sumbangsih terhadap pengembangan industri jasa keuangan. Terdapat empat kategori untuk penghargaan tersebut yakni universitas, tokoh, pemerintah daerah dan asosiasi.

Selain Kota Mojokerto, pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut antara lain Ganjar Pranowo (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), Soekarwo (Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Walikota Mojokerto mendapatkan penghargaan dengan kriteria yaitu peran dalam pengembangan inklusi keuangan.

Menurut Muliaman, KH Mas’ud Yunus dinilai telah menegakkan industri jasa keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang belum *bankable* melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Kota Mojokerto.

“OJK mengapresiasi langkah Mas’ud Yunus menerbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung keuangan syariah dan mendirikan 2 LKMS yang pertama di Jawa Timur. Sehingga dapat meningkatkan akses keuangan dan mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Muliaman juga mengatakan, OJK mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. “Program percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas perhatian



kita bersama untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Harapan ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Kesuksesan Kota Mojokerto mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk pengembangan ekonomi masyarakat memikat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri untuk mempelajarinya. Pada Februari 2016 lalu, rombongan yang dipimpin Ketua BAZNAS Kota Kediri, Lilik Muhibbah berkunjung ke Kota Mojokerto.

Lilik Muhibbah yang juga Wakil Walikota Kediri berharap, kunjungannya ke Kota Mojokerto dapat memberikan pencerahan serta pembelajaran bagi BAZNAS Kota Kediri dalam menjalankan kepengurusan lima tahun kedepan. “Inovasi dari Kota Mojokerto ini merupakan pelajaran berharga dalam pengembangan ekonomi masyarakat,” kata Lilik.

BEBAS DB TANPA FOGGING

Selain inovasi di bidang ekonomi, Mas’ud memiliki program andalan di bidang pendidikan dan pembangunan moral. Kota

Mojokerto termasuk daerah yang cukup berhasil di sektor pendidikan. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat kelulusan ujian nasional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA adalah 100 persen. Kota Mojokerto juga selalu menempatkan siswanya di jajaran 10 besar nilai unas tertinggi se-Jawa Timur.

Salah satu kiatnya adalah menerapkan jam belajar bagi para siswa di Kota Mojokerto. Jam belajar berlaku pukul 18.00–19.00 WIB. Pada saat itu, semua televisi dan radio di Mojokerto harus dimatikan. Anak-anak juga tidak boleh keluyuran pada jam belajar tersebut.

Untuk memastikan jam belajar dipatuhi, Walikota Mojokerto yang merupakan mantan Kepala SMP Islam Brawijaya itu membentuk satgas di tiap-tiap RT. Satgas inilah yang melakukan *sweeping* ke perkampungan. “Kegiatan satgas dipantau pokja yang dibentuk pemkot,” kata Mas’ud.

Di saat sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur mendapat status kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah, Kota Mojokerto malah terbebas dari demam berdarah. Mas’ud menyebut Kota Mojokerto bebas demam berdarah tanpa *fogging*. Karena Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kader motivator kesehatan yang berjumlah 1.600 orang.

Mereka setiap hari, pukul 07.00–09.00, bertugas memantau jentik nyamuk dan sanitasi di rumah-rumah warga. Hasil pantauannya itu dilaporkan ke puskesmas, kemudian diteruskan ke dinas kesehatan.

“Jadi, kalau ada warga yang rumahnya kurang bersih dan rawan dijadikan sarang nyamuk, langsung ada tindak lanjut,” imbuh Mas’ud.

Lantas, setiap Jumat, Mas’ud menjadikannya sebagai Jumat berseri. Warga selama 60 menit melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). “Jadi, di sini tidak perlu ada *fogging*,” tegasnya.

Kepemimpinan Mas’ud telah membawa banyak kemajuan. Dari sisi APBD, terjadi peningkatan yang dulu hanya Rp200 miliar–Rp300 miliar kini menjadi Rp800 miliar. PAD-nya menjadi Rp98 miliar dengan pertumbuhan ekonomi 6,9 persen. Selanjutnya, *gini ratio* atau rasio kesenjangannya 0,22. Semua itu terjadi, salah satunya, karena program Pembiayaan Usaha Syariah alias PUSYAR. ●



KOTA PROBOLINGGO



KOTA PROBOLINGGO



Hj. Rukmini Buchori, S.H, M.Si
Walikota Probolinggo



HM. Suhadak
Wakil Walikota Probolinggo

VISI:

Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan

MISI:

- Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing.
- Membangun perekonomian Kota Probolinggo yang kompetitif, kokoh dan berkeadilan.
- Meningkatkan kinerja Pemkot Probolinggo didukung akuntabilitas, profesionalitas dan perluasan partisipasi publik.
- Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.
- Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo dalam bingkai kearifan lokal.

KONSISTEN DAN TERPADU KELOLA LINGKUNGAN

TAK bisa disangkal, upaya dan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, luar biasa bagus dan menarik. Tidak hanya diakui secara nasional dengan banyaknya daerah di Indonesia yang belajar ke Kota Probolinggo, tapi juga lembaga dari luar negeri. Lantaran ini, pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemkot Probolinggo, memang patut menjadi *best practice* untuk diterapkan daerah lain di Indonesia.

Lihat saja, misalnya, dalam program tamanisasi yang dimulai tahun 2006 lalu. Saat ini telah menjadi ikon Kota Probolinggo yaitu Kota Seribu Taman. Tentunya, bukan perkara mudah membuat ikon seperti itu. Ikon terwujud berkat partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, bahkan partai politik.

Selain tamanisasi yang bermanfaat sebagai penghijauan kota dan salah satu sarana melepas kepenatan, ataupun untuk menciptakan nuansa iklim investasi yang kondusif, lihat juga misalnya, kesadaran Pemkot Probolinggo untuk efisiensi energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan. Dalam kaitan ini, mengelola dan memanfaatkan sampah yang jumlahnya cukup melimpah. Di mana, pada umumnya sampah kota didominasi sampah organik dengan komposisi berkisar antara 55-70 persen.

Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pengelolaan sampah yang dilakukan kota-kota atau daerah lain di Indonesia. Akan tetapi, hebatnya, pengelolaan sampah di kota yang dikenal dengan penghasil buah mangga ini, lagi-lagi dapat dilakukan secara sistematis dengan melibatkan secara aktif komponen masyarakat (pemberdayaan masyarakat).

Alhasil, Kota Probolinggo 8 tahun berturut-turut dari tahun 2007 hingga 2015 lalu, mampu meraih Anugerah Adipura. Di tahun 2014, bahkan meraih Adipura Kencana. “Semua keberhasilan itu buah dari usaha panjang Pemkot Probolinggo beserta seluruh elemen masyarakat yang secara bersama-sama berupaya mengatasi, mencari solusi, serta mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan persampahan yang komprehensif, terpadu, dan konsisten,” papar Budi Krisyanto, Asisten II Pembangunan Perekonomian, Kota Probolinggo.

Pelibatan aktif masyarakat untuk peduli lingkungan oleh Pemkot Probolinggo, dilakukan dengan berbagai fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan. Mulai dari proses pembentukan hingga pelaksanaan kegiatan mitra-mitra kerja peduli lingkungan. Seperti misalnya, mitra kerja dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan, jaringan manajemen sampah (forjamansa), kelompok masyarakat (pokmas), paguyuban *eco* pesantren, paguyuban peduli sampah (papesa), paguyuban kader lingkungan (pakerling), paguyuban penarik gerobak sampah (PGS) ceria, dan lainnya.

Sementara dalam mitra pengelolaan keindahan kota dan penghijauan, ada paguyuban putri lingkungan, komunitas pelestari keanekaragaman hayati (komtari kehati), dan penyandang cacat peduli lingkungan Kota Probolinggo (Pecel Koprol). “Intinya, berbagai program pengelolaan lingkungan hidup harus berbasis masyarakat. Harapannya, agar masyarakat secara bertahap dapat mandiri dalam mengelola lingkungannya,” terang Budi. Harapan lainnya adalah akan terwujudnya sebuah pola interaksi antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya secara simbiosis mutualisme.

TERPADU

Pengelolaan sampah oleh Pemkot Probolinggo memang telah menjadi rujukan studi khusus bagi daerah lain. Pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) seluas 4 hektar yang terletak di Jl Anggrek, Mayangan, tidak seperti TPA pada tidak umumnya. Pasalnya, meski menjadi tempat berkumpulnya sampah dari segala penjuru Kota Probolinggo, memasuki kawasan ini tidak tercium bau sampah yang menyengat ataupun melihat lalat-lalat bertebaran. Bagaimana teknisnya?

Pengolahan akhir sampah di TPA Bestari memakai sistem *sanitary landfill*. Sistem penimbunan sampah secara berlapis-lapis lalu ditutup tanah secara bertahap. Dengan ini (sistem) mencegah timbulnya bau



dan berkembang vektor penyakit seperti lalat. Sistem TPA Bestari juga dilengkapi dengan sistem perpipaan gas metan, sistem pengolahan lindi, dan sistem *drainase*. Pada 2016 ini, terdapat satu tambahan 1 *sell sanitary landfill*, sehingga TPA Bestari memiliki 2 *sell sanitary landfill*. “Kita tambah satu *sell sanitary landfill* karena volume sampah yang masuk TPA Bestari rata-rata mencapai 45.844 ton/hari,” terang Budi.

Namun, sebelum diangkut ke TPA, pengelola TPA sudah menjalin kerjasama dengan paguyuban peduli sampah (Papesa). Kerjasama dalam hal ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sasarannya komunitas masyarakat (rumah tangga) menggunakan pengelolaan sampah dengan cara pemilahan dan pengolahan.

Kelebihan dari pengelolaan sampah di Kota Probolinggo sungguh-sungguh diperhatikan dari hulu hingga hilir. Pengelolaan sampah dilakukan terpadu. Sampah yang dibuang masyarakat, baik dari perumahan, industri, perumahan, pasar, toko, restoran, taman, pengairan, rumah sakit, dan lain sebagainya, semaksimal mungkin dikelola dan diolah hingga memberikan manfaat atau nilai ekonomis.

Pengelolaan sampah terpadu memang dimaksudkan antarlain untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan nyaman. Kedua, mengubah olahan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan berdaya guna. Cara yang ditempuh, salah satunya dengan mendirikan Bank Sampah. Saat ini, di Kota Probolinggo sedikitnya telah berdiri 43 Bank Sampah. Komoditas sampah yang diterima bank sampah terdiri dua kategori, yaitu sampah kertas dan plastik.

Lina P Nidya dari tim pemberdayaan masyarakat Kota Probolinggo memaparkan, meningkatnya produksi sampah saat ini seiring dengan meningkatnya pertumbuhan manusia dan perubahan gaya hidup, yang cenderung serba cepat sehingga berkembanglah produk-produk instan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari produk-produk instan tersebut hasil sampingnya adalah sampah anorganik yang semakin meningkat.

Sayangnya, tak banyak orang yang mengetahui kalau sampah tersebut khususnya sampah anorganik dapat didaur ulang dan mendatangkan rupiah, serta dapat menjadi peluang usaha yang cukup menyerap tenaga kerja. Di Probolinggo, usaha seperti ini biasa disebut sebagai usaha “rongsokan” atau usaha “urup-urup”. Tak sedikit dari usaha urup-urup yang sukses menjadi pengusaha dengan omzet per bulan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Adapun sampah atau barang rongsokan yang dapat di urup-urupkan yaitu sampah anorganik yang mengandung jenis seperti plastik, logam, kertas, karet, kain, barang elektronik, kaca, accu, dan lain sebagainya. “Usaha urup-urup selama ini dipandang sebelah mata karena kesannya yang kotor dan kumuh,” ujarnya.

Padahal, sambungnya, dari usaha tersebut mempunyai peranan yang cukup penting dan tidak bisa diabaikan yakni menyerap tenaga kerja untuk pengumpulan dan pemilahannya, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi sampah yang masuk ke TPA, mengurangi sampah yang dibakar maupun dibuang sembarangan, dan menciptakan lingkungan yang bersih.

Lina menyebut, hasil survey yang pernah dilakukan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah pada tahun 2013 lalu menunjukkan sampah dan barang bekas dari rumah tangga atau dari sumber yang lain biasanya diambil oleh para pemulung atau langsung ke urup-urup, sekitar 0,5 – 1 ton/bulan, sedangkan perolehan urup-urup antara 1-2 ton/bulan. Selanjutnya dari para pemulung ataupun urup-urup disetorkan ke pengepul urup-urup dengan

hasil perolehan mencapai 5 – 8 ton/bulan bahkan ada beberapa pengepul sampah jenis tertentu bisa mencapai 10 ton/bulan.

Dari hasil perolehan data juga diketahui bahwa di seluruh kecamatan di Kota Probolinggo terdapat 302 pemulung, 42 urup-urup dan 47 pengepul. Jumlah tersebut bisa jadi lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya di lapangan mengingat masih ada yang belum terdata di tiap-tiap kelurahan. Meskipun masih belum semuanya terdata namun dari jumlah 391 usaha urup-urup tersebut sudah signifikan dengan upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA yaitu sebesar 5.316 ton/tahun atau telah mereduksi sampah kota sebesar 8,7%.

Meski begitu, Lina mengingatkan, dibalik usaha urup-urup yang cukup menguntungkan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kesehatan pekerja dan keselamatan lingkungan. Utamanya beberapa dari jenis sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang biasanya juga turut serta dikumpulkan, seperti semua jenis accu dan baterai bekas dari baterai remote, mainan, jam tangan, telepon seluler, kamera digital maupun baterai yang bisa dicharge (rechargeable), berbagai wadah atau tempat bekas dari cat, oli, tinta, pestisida dan bahan-bahan kimia, dan sampah medis seperti spuit suntik, selang, botol infus dan sebagainya.

Agar terhindar dari dampak lingkungan dan kesehatan perlu diperhatikan cara penyimpanan dan penempatan barang urup-urup. Sebaiknya tempat penyimpanan beratap agar barang-barang dari kertas dan logam tidak terkena hujan sehingga dapat rusak dan berkarat, lantai tempat penyimpanan diberi alas supaya bila hujan tidak terjadi genangan atau tumpungan air hujan dapat menjadi celah berkembangnya vektor penyebab demam berdarah, sirkulasi udara cukup di tempat penyimpanan, dan pekerja menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker dan sepatu boot.

Secara umum, sistem pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dimulai dari pewadahan, penyapuan poros jalan, pengumpulan sementara, pengangkutan, tempat pengumpulan sementara (TPS), hingga berujung di Taman Pemrosesan Akhir (TPA). Masyarakat di tingkat RT/RW, secara aktif menempatkan wadah sampah di rumah masing-masing. Proses pengumpulan sampah menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung yang dilakukan dari rumah penduduk menuju TPS yang totalnya saat ini berjumlah 104 unit, terdiri dari 3 jenis TPS yakni TPS mini, permanen dan transfer depo. Dari TPS kemudian dipindahkan ke TPA.

Di TPA, sampah-sampah itu kemudian juga diolah menjadi pupuk organik dan dimanfaatkan untuk memupuk taman-taman di Kota Probolinggo sehingga terbangun sinergitas program dan kemandirian pupuk. Tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari pengelolaan sampah menjadi pupuk organik ini bisa menjadi unit pendapatan sendiri bagi Kota Probolinggo. Kegiatan itu pun berhasil menyulap wajah kota menjadi sehat, nyaman, asri dan sehat.

Tak hanya itu, di TPA Bestari yang berlokasi 1,5 km dari pusat kota, gas metan dari sampah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan di TPA. Proses pengambilan gas metan TPA dilakukan menggunakan pipa PVC ukuran 4 dim yang telah dilubangi pada bagian bawahnya, kemudian pipa dimasukkan ke dalam sel *sanitary landfill* hingga kedalaman 5-10 m, gas yang tertangkap oleh pipa utama kemudian dialirkan melalui pipa yang lebih kecil menuju instalasi pemisah yang berfungsi untuk memisahkan gas metan dengan air yang terkandung.

Pusponurani Trihayu, salah seorang pengelola TPA Bestari mengatakan, jika pengambilan gas metan tidak dilakukan penanganannya dengan benar akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena itu, untuk meminimalisir dampak tersebut, BLH Kota Probolinggo membangun instalasi penangkapan dan pemanfaatan gas metan. “Selain bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, juga untuk mengambil manfaat dari hasil pengembangan dan penerapan inovasi energi terbarukan,” jelasnya.

TPA Bestari juga mencoba memanfaatkan gas metan dengan sistem biodigester. Cara kerja dari sistem biodigester ini adalah dengan memasukkan sampah organik ke dalam 4 buah drum plastik yang saling terhubung melalui pipa atau selang. Pada bagian bawah drum plastik, dipasang kran untuk mengalirkan air lindi yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk cair.

Setelah gas metan yang ada di dalam drum telah habis dimanfaatkan dan tidak terbentuk lagi, maka sampah organik yang tersisa di dalam drum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Sistem ini dihitung dapat digunakan atau dimanfaatkan secara komunal untuk kurang lebih 5 rumah tangga. “Biogas dari digester dapat digunakan untuk memasak (pengganti LPG) oleh setiap rumah tangga, sedangkan pupuk cairnya dapat digunakan untuk memupuk tanaman di kebun rumah tangga,” terang Pusponurani. ●



KOTA SAMARINDA



KOTA SAMARINDA



H. Shaharie Ja'ang, SH, M.Si
Walikota Samarinda



Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si
Wakil Walikota Samarinda

VISI:

Terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

MISI:

- Penciptaan & peningkatan fasilitas umum dan *utilities* umum penunjang sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai basis untuk menuju kota metropolitan
- Penanggulangan masalah banjir secara tuntas dan menyeluruh
- Penanggulangan masalah kebakaran secara tuntas dan menyeluruh
- Mengembangkan sektor pendidikan & sdm yang profesional dan religius
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan *income percapita*
- Peningkatan kehidupan beragama, pemuda dan olah raga serta sosial budaya yang lebih dinamis & kondusif pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan
- Peningkatan *good governance* dan pemerintahan kota yang dinamis

SIKDA BERBASIS ANDROID, PERMUDAH LAYANAN KESEHATAN

PEMANFAATAN teknologi informasi komunikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah di mulai sejak dekade delapan puluhan. Pada masa itu, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) melalui Pusat Data Kesehatan (Pusdakes) memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem Electronic Data Processing (EDP).

Akan tetapi, hal ini baru diterapkan di tingkat pusat. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, baik di kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, secara optimal masih terkendala berbagai hambatan, termasuk kurangnya dana serta tidak adanya payung hukum.

Di era sembilan puluhan, Depkes RI lalu mengembangkan lagi teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan Sistem Informasi Puskesmas (SP2TP), Sistem Informasi Rumah Sakit, Sistem Surveilans Penyakit, dan Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Namun, masing-masing sistem itu belum terintegrasi dengan baik dan sempurna.

Baru pada tahun 2002, Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 511 tentang Kebijakan & Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau disingkat SIKNAS dan Kemenkes No 932 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA). Dalam kaitan ini, SIKDA di kabupaten dan kota adalah sebagai bagian sub sistem SIKDA yang ada di provinsi, dan SIKDA provinsi bagian sub sistem SIKNAS.

SIKDA bertujuan untuk mendukung SIKNAS. Namun,

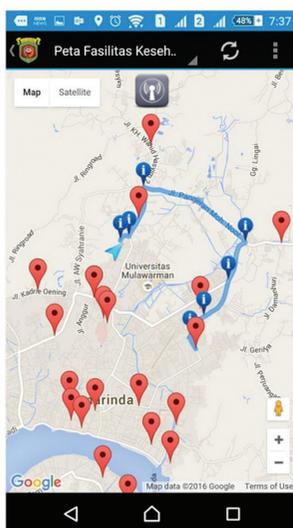
lantaran adanya desentralisasi sektor kesehatan, mengakibatkan kemunduran dalam pelaksanaan SIKNAS. Seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP, profil kesehatan, dan lainnya. Selain itu, belum adanya kebijakan tentang standar pelayanan bidang kesehatan, termasuk mengenai data dan informasi, menyebabkan persepsi masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda.

Hal itu mengakibatkan sistem informasi kesehatan yang dibangun juga tidak standar. *Variabel* maupun format *input* dan *output* berbeda, sistem dan aplikasi yang dibangun tidak dapat saling berkomunikasi. Di daerah bahkan di lingkungan kementerian kesehatan juga belum tersusun satu sistem informasi yang standar sehingga masing-masing program membangun sistem informasinya masing-masing dengan sumber data dari kabupaten, kota dan provinsi.

Akibat selanjutnya data yang dihasilkan dari masing-masing daerah tidak seragam. Ada yang tidak lengkap, dan ada pula data *variabel* yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berbeda dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Sehingga *validitas* dan akurasi data diragukan. Apalagi, jika diverifikasi data tidak terlaksana. Ditambah lagi dengan lambatnya pengiriman data baik ke dinas kesehatan (dinkes) maupun ke kementerian kesehatan. Informasi yang diterima sudah tidak *up to date* dan proses pengolahan serta analisis data menjadi terhambat. Pada akhirnya, para pengambil keputusan atau pemangku kepentingan mengambil keputusan dan kebijakan kesehatan tidak berdasarkan data yang akurat.

Lantaran itulah, pada awal 2012, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi meluncurkan aplikasi SIKDA Generik, yakni aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu





milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian kesehatan.

SIKDA ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Selain itu, aplikasi SIKDA Generik dirancang dan dibuat untuk memudahkan petugas puskesmas saat melakukan pelaporan ke berbagai program di lingkungan Kementerian Kesehatan. Harapannya, aliran data dari level paling bawah sampai ke tingkat

pusat dapat berjalan lancar, terstandar, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan yang diharapkan.

Ketersediaan informasi kesehatan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi & fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Informasi kesehatan ini dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Dengan berlakunya sistem otonomi daerah, maka pengelolaan SIK merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing pemerintah daerah.

Dampak dari otonomi daerah tersebut, setiap pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan pengembangan SIK berbasis teknologi informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga saat ini terdapat berbagai jenis SIK yang berbeda-beda di tiap daerah, baik itu berbeda dari sisi sistem operasi, bahasa pemrograman maupun data basenya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa SIK di Indonesia belum terintegrasi satu dengan lainnya. Informasi kesehatan masih terfragmentasi dan belum mampu mendukung penetapan

kebijakan serta kebutuhan pemangku kebijakan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut maka pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi kesehatan yang dapat mengintegrasikan dan memfasilitasi proses pengumpulan dan pengolahan data, serta komunikasi data antar pelaksana pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat pusat, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh. Pada saat bersamaan juga memperbaiki proses pengolahan informasi yang terjadi di daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia.

SIKDA dirancang untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan minimum yang dibutuhkan dalam pengelolaan informasi kesehatan daerah, dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, sampai dengan diseminasi informasi kesehatan. SIKDA dirancang untuk menjadi standar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi kesehatan di wilayahnya.

PERTAMA DI INDONESIA

Seperti daerah lain di Indonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Kalimantan Timur juga menerapkan SIKDA. Hanya saja, ada perbedaan yang cukup menarik dari penerapan SIKDA di Kota Samarinda. Yakni, mendaftar ke Puskesmas dengan menggunakan ponsel android pada aplikasi SIKDA Samarinda.

Walikota Samarinda, Syaharie Ja'ang, dalam *launching* layanan itu menyatakan, sistem pendaftaran online berlaku untuk semua pasien di seluruh Puskesmas. Mulai pasien umum, Jamkesda maupun BPJS. Sistem pendaftaran online melalui ponsel android ini sangat mempermudah warga Kota Samarinda. "Yang jelas lebih mempermudah warga dan efisiensi waktu," ujarnya.

Bagi warga Samarinda yang tidak punya ponsel android, sambungnya, bisa juga didaftarkan oleh saudara, tetangga atau orang lain yang mempunyai ponsel android. "Jadi tidak perlu lagi mengantre mendaftar di Puskesmas. Cukup sistem yang memudahkan," jelasnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Samarinda drg Nina Endang Rahayu. Ia pun menambahkan, bahwa SIKDA Kota Samarinda bisa diakses lewat ponsel dengan sistem operasi berbasis

android. Langkah pertama adalah masuk ke *AppStore* dan mengetik kata pencarian *SIKDA SAMARINDA*. Setelah *download*, aplikasi ini akan mudah digunakan.

Tak hanya mendaftar online ke Puskesmas, dengan aplikasi ini masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi kesehatan daerah mulai dari data demam berdarah, diare, ISPA, data kesehatan ibu hamil, hingga peta fasilitas kesehatan, serta jadwal rujukan dokter spesialis.

Menurutnya, sistem mendaftar ke puskesmas lewat android ini adalah yang pertama di Indonesia. Bahkan, dokter praktik umum maupun rumah sakit swasta juga belum ada menerapkan sistem mendaftar online lewat ponsel. “Alhamdulillah, SIKDA ini masuk indikator kinerja RPJMD kota Samarinda sebagai program pengembangan sistem informasi kesehatan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Nina mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga telah meng-*create* SIKDA Kota Samarinda terkait kepesertaan Jamkesda. Mulai tahun ini sudah tidak menggunakan kartu peserta lagi, cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Kalau mau daftar ke puskesmas cukup kasih NIK-nya. Begitu juga ketika mendaftar online juga memasukan NIK-nya,” ujarnya seraya menegaskan, SIKDA yang *dicreate* Kota Samarinda tidak menggunakan vendor. Tapi dilakukan oleh teman-teman di UPTD Surveilans Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

UPTD Surveilans Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr Osa Rafshodia, pun lantas menerangkan, SIKDA merupakan sistem informasi yang diperkenalkan sejak 2014 lalu dan dikembangkan di unit pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, poliklinik, praktek swasta, apotek dan laboratorium) yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan.

SIKDA yang dikembangkan Kota Samarinda memang berbasis individu menggunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Jadi, tidak lagi menggunakan nomor yang berbeda-beda. Dengan begitu, di manapun mengakses layanan kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, dokter praktek umum maupun spesialis, hanya akan ada satu rekam medis.

Bila ada warga Kota Samarinda yang mengakses layanan kesehatan di Kota Samarinda, entah itu di puskesmas, di RS pemerintah ataupun

swasta, maupun dokter praktek dan spesialis, akan terpantau dengan jelas.

Contoh, ibu muda bernama Risma pada 1 September 2015, pukul 09.00 WITA, memeriksakan kandungannya di praktek persalinan di Kecamatan Samarinda Ilir. Tapi, dua minggu berikutnya dia berobat ke Puskesmas yang berbeda. Begitupun pemeriksaan selanjutnya, tak menutup kemungkinan Risma berobat ke dokter spesialis anak atau ke bidan praktik yang berbeda.

“Semua pemeriksaan itu bisa dipantau oleh setiap tenaga kesehatan di mana ia memeriksa. Setiap tenaga atau pelayan kesehatan dapat memantau rekam medis pasien yang mereka periksa. Datang jam berapa, dokter siapa yang ditemui, dan sebagainya,” jelasnya.

Pertanyaannya, bagaimana tenaga kesehatan yang satu dengan yang lain bisa memantau itu? Ya, itu berkat penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Kota Samarinda yang sudah terintegrasi dan terpadu.

Dia menambahkan, penggunaan NIK dalam layanan bukanlah hal baru. Puskesmas di Kota Jakarta pun sudah menerapkan hal yang sama. Nah, di mana perbedaan kota Jakarta dengan SIKDA Kota Samarinda? Osa mengatakan, bahwa tenaga kesehatan di Kota Samarinda terlibat aktif di dalam SIKDA. SIKDA Kota Samarinda tidak berhenti hanya di Puskesmas dan melibatkan semua tenaga kesehatan dari semua tingkatan. Termasuk dokter spesialis. “Mereka ikut merekap dan memasukkan data ke dalam SIKDA,” tuturnya.

Melalui SIKDA ini pula, Kepala Puskesmas atau Rumah Sakit juga dapat mengetahui secara persis berapa pasien yang ditangani oleh tenaga medis mereka. Penderitanya berasal dari mana, dan seterusnya. Rekap hasil kinerja petugas kesehatan itu juga berhubungan dengan remunerasi. “Ini bedanya. Petugas kesehatan sudah langsung dihitung variabel kinerjanya,” tuturnya.

Osa juga mengatakan, bahwa Dinas Kesehatan Kota Samarinda selalu meng-*update* data layanan kesehatan yang telah mereka berikan. Setiap bulan Dinas Kesehatan Kota Samarinda meng-*update* data dari 25 Puskesmas, 43 Puskesmas Pembantu, 14 Rumah Sakit pemerintah dan swasta, 341 klinik bidan, dan 233 praktek dokter umum dan spesialis. “Kelebihan lain dari SIKDA Kota Samarinda adalah dapat mengantisipasi kecurangan dalam akses layanan kesehatan dalam program Jamkesda maupun BPJS,” tandasnya. ●



KOTA SEMARANG



KOTA SEMARANG



Hendrar Prihadi, S.E., M.M
Walikota Semarang



Hevearita G. Rahayu
Wakil Walikota Semarang

VISI:

**Terwujudnya Masyarakat yang berpendidikan,
berakhlak mulia, Menuju Kota Perdagangan dan
jasa yang berskala Metropolitan**

MISI:

- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
- Menerapkan multi metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara profesional.
- Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pembangunan.
- Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan dan memasuki pasar kerja.
- Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Pendidikan Untuk Semua (PUS).

LEWAT GEDUNG PIP, LAYANAN PUBLIK MENINGKAT

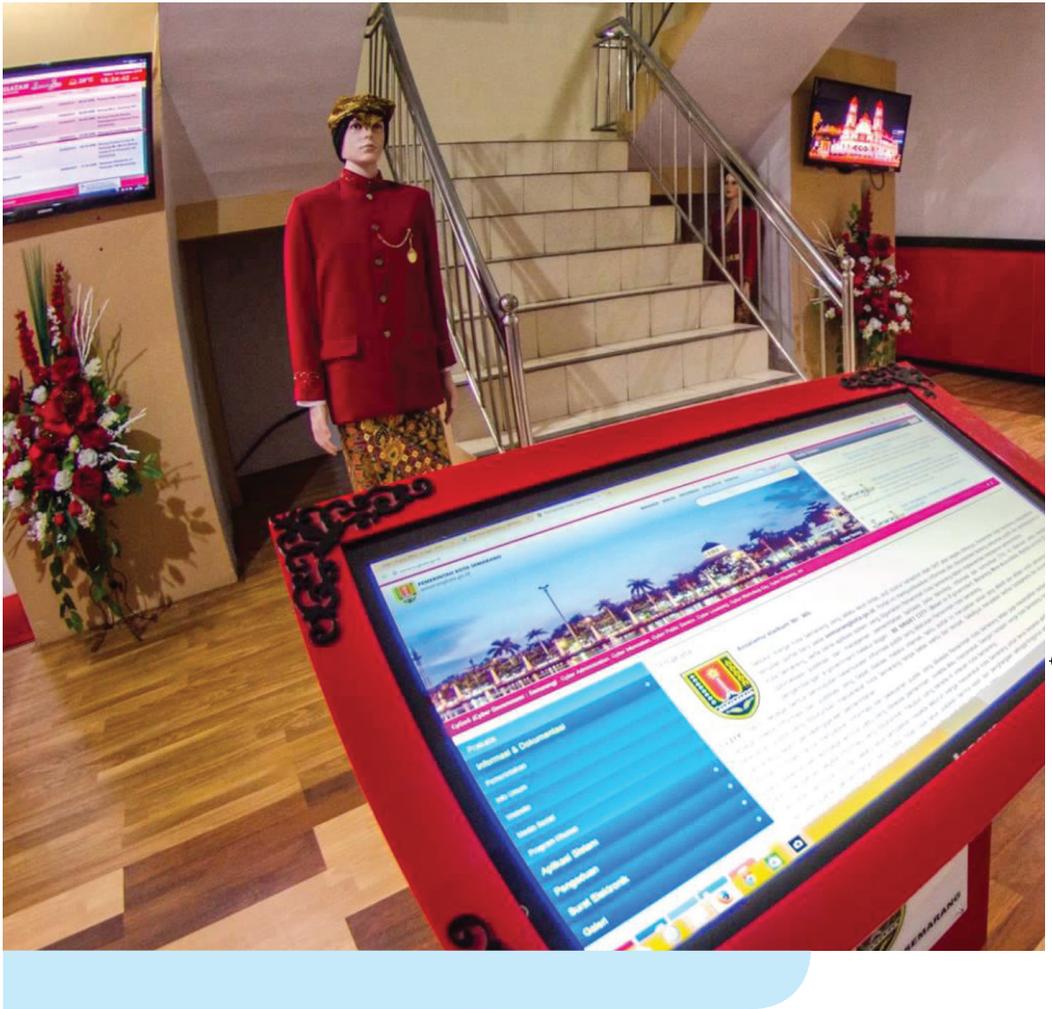
CUACA Kota Semarang pagi itu agak cerah berawan. Suasana masih lengang ketika taksi yang membawa kami memasuki pelataran parkir Balaikota Semarang. Tak berapa lama, kami pun menuju gedung Pusat Informasi Publik (PIP), yang posisinya persis di samping kiri Balaikota Semarang. Beberapa pengunjung sudah ada di fasilitas layanan yang mulai dioperasikan sejak 2 Februari 2016 itu.

Gedung PIP memang telah menjelma menjadi “ikon” baru dari Kota Semarang dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena di gedung PIP itu berbagai bentuk informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dapat dipenuhi Pemerintah Kota (Pemko) Semarang. Bukan hanya masyarakat Semarang yang dilayani di sini. Siapa pun yang datang dan ingin memperoleh informasi tentang Kota Semarang bisa datang dan memanfaatkan fasilitas dan layanan di gedung ini.

Gedung PIP diatur sedemikian rupa. Suasananya tenang dan nyaman. Di lantai 1 Gedung PIP Kota Semarang ini terdapat: Ruang *Broadband Learning Center BLC*, ruang operator pengelola, ruang komunitas, pusat pengaduan masyarakat, ruang internet dan telepon, dan ruang baca. Di lantai dua, terdapat ruang server, ruang dokumen, ruang desk kota, studio mini, ruang rapat. Sementara di outdoor, terdapat Hostspot area dan ruang pertemuan.

Di bagian kanan begitu memasuki ruangan, ada tempat administrasi dan juga ruang untuk pengaduan masyarakat. Lebih ke dalam sedikit, sejumlah peralatan komputer berjaringan internet berjejer rapi. “Di PIP ini warga dapat mengakses berbagai informasi tentang kota, baik dalam bentuk info berbasis teknologi informasi sarana publik, dan juga tempat pengaduan,” kata Sodik, Humas Kota Semarang.

KOTA SEMARANG



Gedung PIP sendiri memiliki tiga fungsi. Pertama sebagai tempat untuk pencarian informasi. Kedua, sebagai tempat atau ruang yang representatif buat masyarakat untuk melakukan aktivitas. Ketiga, sebagai tempat pengaduan masyarakat. Semua fasilitas yang ada di dalamnya dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa dipungut biaya atau gratis.

Sebagai Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M), Pemko Semarang menempatkan personelnnya di gedung ini. Mereka



melayani setiap pengaduan yang datang langsung ke gedung PIP ini. Pembukaan outlet pengaduan yang ada fisiknya ini dilakukan antara lain karena masih ada masyarakat yang belum terbiasa memanfaatkan pengaduan fasilitas teknologi informasi dan komputer (TIK). “Jadi, kita tetap menerima laporan pengaduan secara langsung. Mereka mengisi form dan melengkapi data-datanya,” kata Andri, salah satu staf P3M.

Sodiq menjelaskan, semenjak PIP dioperasikan, pengaduan masyarakat secara langsung menurun drastis. Setiap pengaduan yang masuk pun ditindaklanjuti dengan cukup baik oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Semua mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Gedung PIP yang juga memiliki ruang bioskop mini di lantai dua dan ruang pusat informasi, memang benar-benar dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Kota Semarang. Termasuk para mahasiswa yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet. “Hampir setiap hari saya ke tempat ini untuk internetan,” kata Dika, mahasiswa Universitas Dian Nusantara jurusan IT.

Hal senada dilontarkan Ivan, pelajar kelas dua SMK 8 jurusan multimedia. Hampir setiap hari ia datang ke PIP untuk belajar multimedia.

“Di sekolah sebenarnya juga ada, tapi selalu ramai,” ujarnya.

INFORMASI LENGKAP

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, memang sengaja membuka layanan PIP ini untuk umum. Selain untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar informasi dan tahu memanfaatkan informasi, pembukaan PIP –yang di kalangan anak muda Semarang disebut PIN Semar ini– juga dimaksudkan untuk mewedahi anak-

KOTA SEMARANG

anak muda yang ingin melakukan kegiatan positif tapi tak punya tempat untuk melakukannya.

“Siapa pun diperbolehkan menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Semarang ini. Kalau Anda punya komunitas atau perkumpulan, pakai saja ruangan yang ada di sana,” kata Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang. Untuk memanfaatkan



fasilitas di PIP ini, pengunjung hanya perlu mengisi buku tamu dan menemui *customer service* yang berada di sana.

Di gedung ini, Pemkot Semarang menyediakan komputer, internet, ruangan yang bisa digunakan untuk nonton dan *meeting*. “Bisa digunakan secara cuma-cuma karena itu merupakan wujud pelayanan dan keterbukaan informasi di Pemkot Semarang,” kata Hendi sembari menegaskan bahwa segala macam informasi tentang makanan khas Semarang, oleh-oleh khas Semarang, atau bahkan kondisi jalan yang rusak dan sebagainya dapat dilihat di layanan informasi ini.



LEBIH RESPONSIF

Yang pasti, kehadiran PIP ini mampu membuat Pemkot Semarang menjadi lebih responsif. Berbagai keluhan masyarakat yang masuk ke PIP ini langsung dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Keluhan warga tentang sulitnya pengurusan izin di Semarang, misalnya, langsung direspons dengan peluncuran layanan online. Kesulitan pengurusan izin pendirian bangunan, misalnya, diatasi dengan peluncuran website www.dtkp.semarangkota.go.id.

Melalui laman web ini, masyarakat dapat mengakses Keterangan Rencana Kota (KRK). Pengurusan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) pun juga bisa dilakukan secara *online lewat laman* www.iptb.semarangkota.go.id. “Keluhan warga tentang pengurusan berbagai izin disampaikan di PIP itu cukup mengemuka sehingga harus kami sikapi dengan tanggap. Layanan *online* ini menjadi gebrakan dan produk inovasi pemerintahan kami,” ujarnya usai acara peluncuran layanan KRK dan IPTB *online*, seperti dikutip *Tribun Jateng*.

Dengan adanya layanan online ini, pemohon dapat melihat sejauh mana proses perizinan yang dilakukan pihak DTKP sehingga mereka

KOTA SEMARANG

tidak perlu bolak-balik ke balaikota untuk mengecek berkas. Proses perizinan dapat dilihat langsung melalui gadget. Ini juga menyesuaikan perkembangan zaman karena warga sekarang banyak memanfaatkan smartphone dalam kehidupan sehari-hari.

Hendi mengakui, pihaknya memang terus berusaha memangkas birokrasi perizinan upaya percepatan pembangunan di Kota Semarang. Walikota ini yakin, makin mudah prosedur dan makin pendeknya birokrasi perizinan sangatlah penting untuk menarik investor agar mau datang ke Semarang.

Dibandingkan dengan proses perizinan manual, perizinan online memang menjanjikan proses yang lebih ringkas dan sederhana. Pemanfaatan KRK dan IPTB *online* ini misalnya. Pemohon cukup mendaftar secara *online* lalu mengunggah gambar rencana pendirian bangunan. Semua bisa dilakukan melalui jaringan online.

Apalagi, pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin juga diberi batas waktu pelayanan. Proses layanan KRK dibatasi maksimal dua minggu. Pemohon tidak perlu datang, cukup SMS akan tahu proses selesai dimana, bayar berapa, dan kapan selesai. Kalau sudah selesai, dua hari kemudian petugas akan mendatangi pemohon. Mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Namun demikian, Pemkot Semarang tak serta merta menutup layanan versi manual dengan alasan bahwa warga masyarakat yang belum melek internet harus tetap dilayani.

Yang pasti, keberadaan PIN Semar memang bukan saja menguntungkan masyarakat karena mudahnya mengakses informasi. Kehadiran PIN Semar juga sekaligus menjadi sarana “dialog dua arah” antara pemerintah kota dengan warganya. Hal-hal yang dianggap kurang sesuai oleh masyarakat bisa lekas disempurnakan melalui PIP ini. ●





KOTA SURABAYA



KOTA SURABAYA



Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T.
Walikota Surabaya



Wisnu Sakti Buana, S.T
Wakil Walikota Surabaya

VISI:

Menuju Surabaya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan

MISI:

- Visi pembangunan Kota Surabaya adalah Menuju Surabaya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan. Terwujudnya Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang cerdas dalam merespon semua peluang dan tuntutan global, didukung oleh kepedulian tinggi dalam mewujudkan struktur pemerintahan dan kemasyarakatan yang demokratis, bermartabat dalam tatanan lingkungan yang sehat dan manusiawi.
- Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Kota Surabaya, maka misi yang akan dijalankan dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan.
- Pertama, membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan. Kedua, menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan warga.
- Ketiga, mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreativitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional. Dan keempat, menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN.

MEMBANGUN TANPA KKN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMANFAATAN teknologi informasi telah menjangkau semua sektor, termasuk pemerintahan. Tapi, masih jarang daerah yang memanfaatkannya secara optimal seperti Kota Surabaya.

Semangat dan cita-cita menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel, sebenarnya keras bergema sejak era reformasi bergulir tahun 1998 silam. Berbagai program dan kebijakan coba dibangun pemerintahan Indonesia, baik pusat maupun daerah. Mulai dari program reformasi birokrasi, pencanangan zona bebas korupsi, hingga penerapan sistem *e-Government* dengan penggunaan teknologi informasi (IT).

Dari berbagai program dan kebijakan tersebut, penerapan *e-Government* merupakan salah satu program yang diyakini paling ampuh untuk menjalankan roda pemerintahan seperti yang diharapkan, yakni bebas praktik-praktik korupsi dan kolusi, layanan publik yang prima, transparan dan akuntabel.

Sayangnya, penerapan *e-Government* ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak pemerintah di daerah, bahkan di pusat yang belum mampu menerapkannya secara menyeluruh. Ini bukan lantaran persoalan anggaran untuk pembuatan pusat data ataupun aplikasinya, namun lebih disebabkan kurangnya kemauan dan komitmen dari pemimpin di dalam pemerintahan bersangkutan yang memang benar-benar menginginkan pemerintahan berjalan bersih dan transparan.

Berbeda halnya seperti dilakukan Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya. Sejak 2003 silam, Pemkot Surabaya secara bertahap membangun dan melaksanakan *e-Government*. “Kami bertahap membangun *e-Government*. Diawali tahun 2003, jaman Bu Risma

menjadi Kepala Bagian Bina Program. Beliau yang membangun *e-Procurement* yang sekarang dipakai LPSE tingkat nasional,” ungkap Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Surabaya.

Kemudian, pada tahun 2004 dikembangkan lagi dengan membangun *e-Budgeting*, *e-Project Planning*, dan *e-Controlling*. Setelah itu dibangun *e-Musrenbang* dan lainnya. “Terakhir ini Bu Risma minta dibangun konsep *e-Bencana*,” tambahnya.

Penerapan *e-Government* yang digaungkan sejak reformasi bergulir di Kota Surabaya memang bukan sekadar konsep di atas kertas. *e-Government* benar-benar diimplementasikan. Kini, sedikitnya ada 30 aplikasi *e-Government* yang diterapkan Kota Surabaya. Mulai dari pengelolaan keuangan dengan *e-Budgeting*, *e-Project*, *e-Procurement*, *e-Delivery*, *e-Controlling*, dan *e-Performance* hingga pelayanan masyarakat dengan *e-Musrenbang*, *e-Health*, *e-Siaga*, *e-Sapawarga*, *e-Kios* dan lain sebagainya.

Hasilnya, layanan publik yang diberikan Pemerintahan Kota Surabaya kepada warganya benar-benar prima dan memuaskan. Korupsi, pungli maupun kolusi berhasil diminimalisir, bahkan dihilangkan. Penghematan anggaran pun dapat dilakukan. Beragam penghargaan menjadi bukti nyata keberhasilan.

Asisten Pembangunan Kota Surabaya, Hj. Yayuk Eko Agustin Wahyuni, SH, M.Si., menegaskan, semua aplikasi dalam *e-Government* yang berbasis internet (*online*) tersebut terintegrasi satu sama lainnya. “Semua sistem *e-Government* terintegrasi. Awalnya, kami berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Antiek menambahkan, membangun *e-Government* itu tidak mahal. Utamanya, ada kemauan. Kedua, komunikasi sehingga sistem dapat terintegrasi. Kalau tidak ada komunikasi, pasti akan muncul ego sektoral. Dia menceritakan pengalaman membangun *e-Health*.

“Puskesmas ngomong bahwa data pasien itu rahasia. Data kesehatan adalah punya dinas kesehatan, ngapain Kominfo ikut-ikutan,” ungkapnya. Tapi, berkat komunikasi yang baik, akhirnya bisa terintegrasi. Masuk dalam sistem yang dibangun. Keamanan informasi pasien tetap terjaga.

Ketiga, adalah komitmen. “Komitmen ingin bersih dan transparan. Soalnya, kalau sudah menggunakan *e-Government* tidak akan bisa



berbuat macam-macam atau yang *engga bener* lagi, karena sudah transparan,” pungkas Antiek.

SURABAYA DALAM GENGAMAN

Bagi Walikota Surabaya Tri Rismaharini, penerapan semua aplikasi berbasis *online* tersebut tidak sekadar mengikuti tren. “Itu didasarkan pada kebutuhan mendesak dalam pengelolaan pemerintahan. Memang benar-benar butuh,” katanya.

Misalnya saja, pada sistem *Surabaya Single Window (SSW)*. Menurut Risma, sistem tersebut dibuat untuk menghilangkan tatap muka antara pemohon izin dan pejabat pemberi izin, termasuk dirinya. “Kalau untuk mengurus izin harus bertemu langsung dengan saya, berapa banyak waktu yang diperlukan. Akhirnya tak bisa mengurus apa-apa untuk pengembangan kota,” paparnya.

Tapi, dengan SSW memungkinkan alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini bisa memantau langsung perjalanan berkas dari satu dinas ke dinas lain secara *real time*. “Jadi, kalau ada komplain dari pemohon izin, bisa ditelisik di mana berkas tersebut nyangkut. Bahkan, pemohon bisa memantau sendiri

perkembangannya,” imbuh Risma.

Dengan demikian, sistem yang transparan seperti itu membuat pengurusan izin lebih *fair*. Dan para pegawai pemerintah kota juga menjadi lebih disiplin. Lalu, disiplin pegawai itu dinilai berdasar kinerja. “Mereka harus bekerja dengan tenggat waktu sesuai *standard operating procedure* (SOP). Sebab, sistemlah yang akan mencatat secara otomatis kinerja para pegawai itu. Tak ada lagi penilaian atas suka atau tidak suka, tapi berdasar kinerja yang tercatat sistem,” jelasnya.

Adapun manfaat lain dari penerapan sistem SSW itu secara langsung menghemat kertas. Sebab, pemohon hanya perlu memindai berkas. Berkas tersebut bisa dilihat oleh semua dinas yang mengurus perizinan. Kemudian jasa kurir juga bisa dihemat. Ujung-ujungnya, menimbulkan efisiensi anggaran yang cukup besar. “Karena tak perlu lagi kertas dan alat tulis,” tambah perempuan kelahiran Kediri, 20 November 1961 ini.

Tak hanya dari urusan kertas dan alat tulis, penghematan anggaran juga menyentuh segala belanjaan Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Risma, saat sistem *e-Budgeting* yang mengatur standar harga satuan barang dan jasa dipergunakan pertama kali, penghematannya mencapai Rp3 miliar. “Kalau sekarang ya sudah tidak terlihat, karena sistem telah berjalan,” katanya.

Sistem *e-Budgeting* yang dipakai Pemerintah Kota Surabaya juga bisa memperinci hingga satuan terkecil. Misalnya, menghitung kebutuhan bolpoin setiap pegawai per bulan. Penghitungan yang detail itu meminimalkan pemborosan. Di sisi lain, pegawai juga terbangun kesadarannya untuk berhemat.

Tak hanya urusan penghematan bolpoin, kinerja keseluruhan pegawai juga terhimpung lengkap dalam aplikasi e-SDM. Dan sistem itu terintegrasi dengan aplikasi lain seperti *e-Project*, *e-Controlling*, *e-Procurement*, *e-Delivery*, dan *e-Performance*. “Bagi guru misalnya, kalau waktunya kenaikan pangkat tidak perlu lagi menyiapkan berkas. Bahkan SK-nya sekarang datang sendiri,” kata lulusan SMA Negeri 5 Surabaya ini.

Penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya juga membuat beban kerja para pejabatnya lebih enteng. Mereka tidak harus lagi menghabiskan waktunya berjam-



jam duduk di ruang kerja untuk memproses dokumen yang harus diperiksa. Mereka bisa melakukannya dimana saja, bahkan saat berada di lapangann sekalipun.

Bagi walikota juga, dengan aplikasi berbasis internet itu memungkinkannya terus memantau Surabaya lewat komputer tablet miliknya dimana pun dia berada. Sehingga, sebagai orang nomor satu di Surabaya, dia bisa memastikan pelayanan tidak pernah berhenti.

Tak hanya urusan administrasi, dengan tablet mini yang kerap dibawa Risma ke mana-mana, dia bisa memantau semua kondisi Surabaya. Dari tablet itu, dia bisa memantau kondisi lalu-lintas Surabaya. Lantaran dia punya akses penuh ke semua CCTV (*closed circuit television*) yang dipasang di jalanan Kota Surabaya. "Lewat ini. CCTV bisa digerak-gerakan ke kiri, kanan, atas, dan bawah," tutur Risma. "Apapun yang terjadi di Surabaya bisa saya lihat dari sini."

Tentunya dalam mengelola Kota Surabaya, Risma tidak bisa



bergerak sendiri. Kepemimpinannya didukung oleh seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan memanfaatkan teknologi informasi, koordinasi dengan para pimpinan SKPD tak harus lewat tatap muka. Kini dia membangun komunikasi virtual dalam sebuah grup *chat* yang anggotanya seluruh kepala SKPD. Di grup itu, semua pihak bisa melaporkan kegiatan harian, diskusi, hingga sekadar bercanda.

Dalam kesehariannya, Risma juga kerap menggunakan *handy talky* (HT). Dengan perangkat itu, dia bisa memantau aktivitas para pegawai yang bertugas di lapangan. Mulai pengecekan saluran, rumah pompa, hingga lalu lintas. “Lewat HT juga kita bisa meminta petugas bergerak jika saya melihat sesuatu yang tidak beres lewat CCTV,” katanya.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau semua aspek di Pemerintah Kota Surabaya, tak ada masalah yang luput dari pantauan Walikota secara langsung. Dengan menggunakan tablet dan HT, Kota Surabaya seperti dalam genggamannya Tri Rismaharini. ●



KOTA SURAKARTA



KOTA SURAKARTA



F.X. Hadi Rudyatmo
Walikota Surakarta



DR. H. Achmad Purnomo, Apt
Wakil Walikota Surakarta

VISI:

Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa , Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga.

MISI:

- Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai "Sala Kota Budaya".
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendaya gunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
- Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan.

LAYANAN JEMPUT BOLA UNTUK TERTIB KIA

TAK salah jika dikatakan bahwa Surakarta merupakan salah satu pusat peradaban di Indonesia. Kehebatan Kota Surakarta bukan saja terjadi di masa lampau, ketika kota ini menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram. Hingga kini, Kota Surakarta, yang biasa juga dikenal dengan sebutan Kota Solo ini, masih mampu menunjukkan diri sebagai pioner.

Anda tentu sudah pernah mendengar tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang akan diterapkan oleh pemerintah mulai tahun ini. Tetapi mungkin Anda belum tahu bahwa kartu identitas bagi anak-anak usia 0 sampai dengan 17 tahun sebagaimana yang diatur dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 itu sesungguhnya adalah sebuah program duplikasi dari produk yang bernama Kartu Insentif Anak (singkatannya pun KIA) yang sudah diterapkan di Surakarta sejak 2009.

Adalah Walikota Surakarta kala itu, Joko Widodo, yang kini menjadi Presiden RI yang membidani kelahiran KIA di Solo itu. Kelahiran KIA pada 2009 di Solo awalnya dilakukan untuk mengejar status sebagai kota layak anak. Untuk menjadikan Kota Surakarta layak dipandang sebagai kota layak anak, persentase anak yang memiliki akte kelahiran haruslah ditingkatkan.

Maka, untuk mempercepat angka kepemilikan akte kelahiran, Walikota Solo Joko Widodo pun menerbitkan Peraturan Walikota nomor 21/2009 yang tentang Kartu Insentif Anak. Sebagai daya tarik, pada 2009 itu, Pemkot pun menggandeng 11 lembaga bisnis –mulai dari lembaga kursus, toko alat olahraga, sarana hiburan, tempat kuliner, hingga tokoacamata.

Lembaga-lembaga bisnis ini memberikan diskon kepada para pemegang KIA di Kota Solo. “Saat ini, jumlah lembaga yang memberikan diskon jumlahnya mencapai 51 badan usaha,” kata Suwarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta saat kami temui beberapa waktu lalu.

Bidang usaha dari para mitra pendukung KIA itu pun beragam. Ada toko buku, layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas olahraga, kuliner dan lain sebagainya. Bisa ditebak, dengan iming-iming diskon itu, Pemerintah Kota Solo berharap masyarakat akan semakin antusias mengurus KIA.

“Orang yang mengurus KIA sama artinya dengan mengurus akte kelahiran,” papar Suwarta. Kenapa demikian? Soalnya, untuk mengurus KIA, warga harus menunjukkan akte kelahiran terlebih dahulu. Alhasil, yang dapat memanfaatkan benefit dari KIA ini hanyalah warga di bawah 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran.

JEMPUT BOLA

Bukan hanya iming-iming diskon yang disediakan oleh Pemkot Surakarta agar warga mau mengurus akte kelahiran. Pemkot Solo juga mempermudah proses dan prosedur pengurusan KIA, dan dokumen kependudukan yang lain. KIA, kata Suwarta, selain bisa diurus dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga bisa diurus melalui sekolah-sekolah.





Sekolah yang menerima pengajuan KIA akan melanjutkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan akan melanjutkan permohonan ke Disdukcapil untuk diterbitkan KIA-nya. Selain lewat sekolah, KIA dan dokumen kependudukan yang lain juga dapat diurus di unit mobil layanan keliling. Mobil-mobil layanan



keliling bisa ditemui pada acara *car free day* dan pada malam-malam tertentu di kantor-kantor kelurahan.

Mobil layanan keliling ini juga melayani pembuatan KTP dan kartu keluarga. Masyarakat tak perlu berlama-lama menunggu dokumen-dokumen itu. Asal persyaratannya lengkap, semua dokumen kependudukan, baik itu KTP, Kartu Keluarga, maupun KIA, itu bisa diselesaikan saat itu juga.

Bukan itu saja. Khusus untuk pengurusan KIA bagi bayi yang baru lahir, Disdukcapil Pemkot Surakarta bahkan dapat memberikan layanan *three in one*. Maksudnya, jika ada bayi lahir dan orang tuanya mengurus akte kelahiran, Disdukcapil akan mengeluarkan tiga dokumen sekaligus. Yakni, akte kelahiran dan KIA bagi sang jabang bayi, serta kartu keluarga bagi orang tuanya. Dalam kartu keluarga yang baru ini sudah termuat nama sang jabang bayi yang baru lahir.

Bukan itu saja. Untuk mengurus tiga dokumen kependudukan tadi, orang tua tak perlu datang ke Disdukcapil. Soalnya, rumah sakit, rumah bersalin, dan sejumlah bidan praktik di Kota Solo sudah diberi kode akses untuk masuk ke halaman web milik Disdukcapil guna mendaftarkan kelahiran sang jabang bayi. “Kami

memberikan kode akses kepada rumah sakit dan bidan untuk masuk ke situs kami. Dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik ibu sang bayi, mereka dapat mendaftarkan kelahiran bayi baru ini,” ujar Suwarta.

Suwarta mengakui, strategi jemput bola ini pada akhirnya benar-benar efektif untuk mendorong kepemilikan akte kelahiran di Kota Solo meningkat pesat. Hampir semua anak yang lahir setelah 2009 kini telah memiliki akte kelahiran dan KIA. Sementara, anak-anak yang lahir sebelum 2009 secara bertahap juga diberi KIA. “Banyak orang tua yang masih enggan mengurus KIA,” ujar Suwarta. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) pertengahan tahun silam, dari total jumlah 155.653 anak di Surakarta, baru 49.300 anak yang memiliki KIA.

Namun, pada saat yang sama, Kota Surakarta patut berbangga karena kepemilikan akte kelahiran di wilayah Kota Surakarta saat ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Prestasi ini tentu saja menjadi awal yang baik untuk tertib administrasi kependudukan yang juga menjadi salah satu program unggulan pemerintah Republik Indonesia.

SATU PEMOHON SATU PETUGAS

Meski telah bekerjasama dengan sekolah, rumah sakit, dan bidan praktik, Dinas Dukcapil juga tetap memberikan layanan di kantornya, yang terletak di dalam Kompleks Balai Kota Surakarta. Ada inovasi yang diterapkan dalam pelayanan di kantor ini. Inovasi itu diberi nama *by system* yang akan membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi sangat mudah dan sederhana.

Pelayanan *by system* itu, menurut Suwarta, dilaksanakan dengan prinsip satu pemohon satu petugas. Artinya, tak ada lagi pemohon yang harus mengurus aneka macam dokumen di loket-loket yang berbeda. “Berapa pun jenis dokumen kependudukan yang dibutuhkan, bisa dilayani di satu loket,” kata Suwarta.

Cara ini, selain membuat pengurusan dokumen menjadi lebih mudah, juga membuat waktu pelayanan menjadi lebih singkat. Semisal pemohon datang mengambil nomor antrian, kemudian menghadap *costumer service* (CS) lantas mendapatkan penjelasan data yang dibutuhkan. Setelah itu langsung bisa diurus oleh konter



yang menangani sampai selesai.

Suwarta juga menambahkan bahwa instansi yang dipimpinnya juga telah menerapkan sistem *SMS Getway*. Artinya, orang tak perlu harus terus berada di Kantor Dinas Dukcapil untuk menunggu dokumennya selesai. Dia bisa pergi untuk menyelesaikan urusan lain. Saat dokumen yang dia butuhkan selesai, petugas dari Dinas Dukcapil akan menghubungi untuk memberitahu bahwa dokumennya sudah dapat diambil. "Kami berharap dengan pelayanan terpadu ini tidak ada lagi warga yang mengabaikan catatan kependudukan dengan alasan ribet dan dipingpong antar petugas," katanya. ●

Buku "Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah di Indonesia 2016" ini kami susun melalui proses pendokumentasian terhadap kinerja penyelenggaraan daerah di 3 (tiga) Provinsi, 10 (sepuluh) Kabupaten, dan 10 (sepuluh) Kota yang berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Dari masing-masing daerah itu, kami mengumpulkan dan menganalisa praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Harapannya, agar upaya-upaya inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat, dipelajari, atau bahkan jika perlu direplikasi oleh daerah lain. Harapannya, buku ini dapat mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. ●



ISBN 978-602-70629-2-4

